



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEMAJUAN SEKTOR PERBANKAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

T E S I S

JONI MARSIOUS

0706181290

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEMAJUAN SEKTOR PERBANKAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

**JONI MARSIOUS
0706181290**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
JAKARTA
JANUARI 2011**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebernarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarism sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarism, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Joni Marsius

NPM : 0706181290

Tanda Tangan

: 

Tanggal : Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Joni Marsius
NPM : 0706181290
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : **Pengaruh Kemajuan Sektor Perbankan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Dr. Telisa Aulia Falianty S.E., M.E** (.....)
Penguji : **Imam Rozani. SE., M.Soc.Sc** (.....)
Penguji : **Dr. Ir.Nining I.Soesilo, MA** (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim, Salawat dan Salam kepada junjungan Nabi Nan Mulia berserta kerabatnya, Muhammad SAW, yang risalahnya sampai kepada umat saat ini. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-nya telah berhasil diselesaikan tesis dengan judul: **“Pengaruh Kemajuan Sektor Perbankan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”** .

Saya sangat menyadari sepenuhnya dalam penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesediaan, dedikasi dan konsistensinya dalam memberikan arahan dan bimbingan sejak awal penyusunan rencana penelitian hingga kepada penyelesaian tesis ini.

Menyadari bahwa analisis dan penyusunan tesis ini masih memiliki berbagai kelemahan, baik sisi konsep, kualitas data, informasi yang dihasilkan dan kedalaman analisis serta interpretasi hasilnya, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mengharap kritik dan saran membangun dari sidang pembaca dan berbagai pihak demi perbaikan ke depan.

Akhirnya, harapan saya semoga tesis ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun masukan bagi para pemangku kepentingan (*stake holders*), baik sebagai penentu kebijakan maupun pengguna serta pihak-pihak lain yang terkait kemajuan sektor keuangan khususnya perbankan, serta berbagai pihak yang peduli dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan cara meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka terlepas dari himpitan kemiskinan.

Salemba, Januari 2011



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini, pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Telisa Aulia Falianty S.E.,M.E selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan akademik dan diskusi dalam penyusunan tesis, mulai dari tahapan penyusunan ide sampai dengan penyelesaian.
2. Bapak Dr.Andy Fahmi, S.E.,M.E., sebagai Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
3. Ibu/Bapak Imam Rozani. S.E., M.Soc.Sc sebagai Ketua Sidang yang telah memberikan masukan yang berguna mulai dari sidang proposal tesis sampai dengan sidang Tesis.
4. Bapak/Ibu Dr. Ir.Nining I.Soesilo, M.A sebagai Dosen Penguji utama yang memberikan masukan yang sangat berguna untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Secara khusus, terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda H.Usman Katmir Adenan,B.Sc.,(Alm), Ibunda Hj. Maryam Binti Murni yang saya sangat hormati yang senantiasa mendoakan agar keberhasilan dan kebarohan hidup bagi anak-anaknya, serta adik-adikku tercinta, Yusmarni SE.Ak., Dedy Syamsuar S.Kom.,M.Comp., Welly Miharja ST., MM., Mardiansyah, SE.Ak, dan Andy Aprizal S.E, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk menempuh program studi.
2. Istriku Mia Rosintha dan anak-anakku Fatihah Prima Uilly, Muhammad Faturrahman dan Nurul Camillah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah memberikan semangat yang terus menerus selama mengikuti perkuliahan, penyusunan tesis hingga selainya studi. Semoga limpahan barokah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa dilimpahkan bagi isteri dan anak-anakku tersayang.
3. Teman-teman sejawat di Bank Indonesia di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank (DPNP) dan Bank Indonesia Banda Aceh, serta teman-teman seperjuangan

program MPKP UI angkatan XXVII-B lainnya yang telah memberikan dorongan dan bantuannya.

4. Secara khusus terima kasih saya haturkan kepada Bpk. Putra Nusantara Stefanus, dan yang mendorong untuk meraih tingkat pendidikan lebih tinggi. Kepada Bpk.Mahdi Muhammad yang memberikan pengertian yang tinggi bagi saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Serta kepada Prof.DR.Nurimansyah Hasibuan yang telah memberikan kesempatan menjadi asisten dosen sehabis menyelesaikan strata satu, dan mendorong produktif dalam bidang ditekuni serta memotivasi untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Karib saat menjadi asisten dosen Prof.Dr.Nurimansyah Hasibuan, Sdr.Dr.Hamsar Lubis, dan Sdr.Ricko Nosandry S.E.
5. Kepada Ibu Dr.Ir Th.Widia S.,MM (Alm) mantan Ketua SMTIK Bina Nusantara yang telah memberi kesempatan untuk terlibat sebagai tenaga pengajar pada tahun 1992, dan menginspirasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi.

Salemba, Januari 2011



Penulis,

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joni Marsius
NPM : 0706181290
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Kekhususan : Ekonomi Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi
JenisKarya : T e s i s

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH KEMAJUAN SEKTOR PERBANKAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA”**, Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : Januari 2011

Yang Menyatakan



(Joni Marsius)

ABSTRAK

Nama : Joni Marsius
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Kemajuan Sektor Perbankan
Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Tesis ini membahas bagaimana pengaruh kemajuan sektor perbankan baik bagi penurunan tingkat kemiskinan Indonesia, di satu sisi dengan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di sisi lainnya melalui tersedianya kredit yang sesuai dengan masyarakat miskin. Dengan kemajuan sektor perbankan maka tabungan dapat dimobilisasi dan uang dapat dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, baik dengan peningkatan modal fisik maupun meningkatnya produktivitas dari modal fisik. Efek menetes ke bawah dari perubahan kelembagaan dan keekonomian yang disebabkan oleh kemajuan sektor perbankan membawa perubahan yang lumayan kompleks terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 – 2000, yang juga menghantam sektor perbankan membawa pengaruh sangat buruk terhadap kondisi kemiskinan, dan menahan pengaruh positif yang diakibatkan kemajuan sektor perbankan yang sebelumnya telah berhasil mereduksi jumlah penduduk miskin. Hipotesis mengenai kemajuan sektor perbankan dan dampak krisis keuangan selama periode 1971 – 2009, telah membawa pelajaran langsung yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.

Kata kunci :

Kemajuan Sektor Perbankan, Kemiskinan, dan Instabilitas Keuangan.

ABSTRACT

Name : Joni Marsius
Study Program : Master in Planning and Public Policy
Title : The Influence of Banking Sector Development
in Indonesia Poverty Alleviation

This thesis investigates how banking development is beneficial to the reduction of Indonesian's poverty, on the one hand by promoting growth and in the other hand directly by providing affordable loan. Banking Sector Development (BSD) mobilizes saving and allocates capital to more productive uses, both of which help increase the amount of physical capital and its productivity. The trickle-down effect of economic and institutional changes brought by BSD became more complex effect on living condition of the poor. At the same time, however, financial instability in 1997 – 2000 which accompanies financial development is disadvantageous to the poor and dampens the positive effect of banking development on the reduction of poverty. The hypothesis is tested successfully on Indonesia over the period 1971 till 2009, resulting in straightforward policy implication.

Key words:

Banking Financial Sector Development, Poverty, and Financial Instability.

DAFTAR ISI

| | Halaman: |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | viii |
| ABSTRAKSI | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GRAFIK | xiii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Hipotesis | 10 |
| 1.6 Ruang Lingkup dan Sumber data | 10 |
| 1.7 Kerangka Berpikir..... | 12 |
| 1.8 Sistematika Penulisan | 13 |
| | |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| | |
| 3. METODOLOGI PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Ruang Lingkup Penelitian | 30 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 32 |
| 3.3 Metoda Analisis Data | 33 |
| 3.3.1. Bentuk Fungsional dalam Model Regresi | 33 |
| 3.3.2. Pelepasan Asumsi Klasik | 35 |

| | |
|--|------------|
| 3.3.3. Memilih Model Yang Paling Baik | 39 |
| 3.3.4. Analisis Tabel dan Grafik | 40 |
| 3.4 Tools dan Software | 40 |
| 4. PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA..... | 41 |
| 4.1 Perkembangan Kelembagaan Keuangan Mikro di Indonesia | 41 |
| 4.2 Perkembangan Industri Keuangan Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia | 50 |
| 4.2.1 <i>Historis perbankan</i> | 50 |
| 4.2.2. <i>Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</i> | 55 |
| 4.2.3. <i>Lembaga Penjaminan Kredit</i> | 56 |
| 4.3 Perkembangan Perbankan Periode 1983 – 1996 | 60 |
| 4.4 Perkembangan Perbankan Periode Krisis 1997 – 2001 | 64 |
| 4.5 Perkembangan Perbankan Periode Recovery 2002 – 2006 | 71 |
| 4.6 Perkembangan Perbankan Periode Krisis Global 2007 – 2009 | 77 |
| 5. PEMBAHASAN | 82 |
| 5.1 Kemiskinan di Indonesia | 82 |
| 5.2 Kemajuan Sektor Perbankan, Krisis, IHK dan Kemiskinan | 87 |
| 5.3 Pertumbuhan Ekonomi, Kemajuan Sektor Perbankan, Instabilitas Politik, dan Kemiskinan | 90 |
| 5.4 Kredit Usaha Kecil, Pengangguran, dan Instabilitas Terhadap Tingkat Kemiskinan | 94 |
| 5.5 Belanja Pemerintah, Indikator Sektor Perbankan, IHK, dan Instabilitas Terhadap Tingkat Kemiskinan | 97 |
| 6. KESIMPULAN | 101 |
| 6.1 Kesimpulan | 101 |
| 6.2 Rekomendasi | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No.: | TABEL | Halaman: |
|------|---|----------|
| 1. | Tabel 4.1 Jumlah Bank Sekunder 1966-1969 | 44 |
| 2. | Tabel 4.2 Indikator Perbankan Selama Kurun Waktu 1998 – 2009 . | 72 |
| 3. | Tabel 5.1 Perkembangan Batas Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, 1976-2009 | 83 |



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

| No.: | Grafik | Halaman: |
|------|---|----------|
| 1. | Gambar 3.1 Share Lembaga Keuangan Indonesia | 30 |
| 2. | Gambar 3.2 Industri Keuangan di Indonesia | 31 |
| 3. | Grafik 4.1 Flow Dana Asing, SBI, Saham dan Votalitas Rp | 80 |
| 4. | Grafik 4.2 IHSG dan Imbal Hasil SUN Turun Tajam | 81 |
| 5. | Grafik 5.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1976-2009 | 85 |
| 6. | Grafik 5.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran dan Gini di Indonesia, 1976-2009 | 86 |
| 7 | Grafik 5.3 Perkembangan Tingkat Penggunaan Uang (M1/GDP dan M2/GDP), dan Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia, 1980-2009 | 88 |
| 7. | Grafik 5.4 Pertumbuhan GDP, Sektor Perbankan, dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 1975-2009 | 90 |
| 8. | Grafik 5.5 Pergerakan Bersama Kredit dan PDB Di Indonesia, 2001 – 2009 | 91 |
| 9. | Grafik 5.6 Perkembangan Rasio Kredit dan DPK terhadap Produk Domestik Bruto (CR/GDP dan DPK/GDP), dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 1980-2009 | 94 |
| 10 | Grafik 5.7 Kredit Usaha Kecil dan Kredit Di Indonesia, 1989 – 2009 | 95 |

| | | |
|----|---|----|
| 11 | Grafik 5.8 | |
| | Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Total | |
| | Di Indonesia, 1989 – 2009 | 96 |



BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa sedang berkembang seperti Indonesia adalah masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya jumlah rakyat miskin. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan sebagian besar kehidupan ekonomi rakyat Indonesia memiliki peran strategis sebagai solusi, dalam jangka pendek sektor ini diyakini untuk menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data kementerian Koperasi dan UMKM dan BPS 2006, menunjukkan bahwa UMKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau mencakup 99% dari unit usaha nasional, menyerap 85,4 juta tenaga kerja atau menyediakan lebih dari 96,2% kesempatan kerja nasional, dan menyumbang 53,3% dari total PDB nasional, serta menyumbang nilai investasi nasional sebesar Rp.369,8 triliun atau 46,2% dari nilai investasi.¹

Dalam permulaan pembangunan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan 1945 lebih ditekankan pada aspek stabilitas dan pertumbuhan, dan setelah itu baru berpaling pada aspek pemerataan (khususnya pada REPELITA III pada masa Orba). Telah disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari distribusi pendapatan masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1970 masih berjumlah 70 juta jiwa (sekitar 60% dari jumlah penduduk), sepuluh tahun kemudian turun tajam menjadi 42,3 juta jiwa (28%), dan pada tahun 1993 menurun kembali menjadi 25,9 juta penduduk atau 13,67% dari jumlah penduduk Indonesia.²

Menurut laporan dari Asian Development Bank pada tahun 2004, 53% dari penduduk Indonesia bertahan hidup dengan \$2 atau kurang perhari, dan 7%nya tergolong benar-benar miskin (*absolutely poor*). Dua perlima dari populasi penduduk mendekati garis kemiskinan dan mereka sangat rentan jika

¹ Sambutan DGBI (*Keynote Speech*) pada Sosialisasi dan Rakor Penjaminan Kredit, Semarang, 12 Desember 2007.

² BPS, Statistics during 50 years Indonesian Independence

terjadi guncangan pada perekonomian. Penduduk miskin Indonesia utamanya berada di pedesaan yang hampir mencapai 80% atau 26 jiwa.

Keterkaitan antara tingkat kemajuan sektor keuangan, disparitas, dan kemiskinan adalah suatu yang kompleks dan multi dimensi. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ekonom, pada kondisi tertentu, kemajuan sektor keuangan positif mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, meningkatkan peran uang dalam perekonomian telah diresepkan oleh ahli ekonomi yakni dengan membenahi sektor keuangan negara-negara berkembang agar meningkatkan taraf hidup rakyatnya menjadi lebih baik.³ Banyak negara-negara asia berkonsentrasi untuk meningkat kinerja sektor keuangan agar dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Konsentrasi tersebut biasanya pada berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem perbankan dan pasar modal sehingga mereka dapat memobilisasi dana domestiknya untuk meningkatkan kinerja ekonominya. Di lain pihak penelitian mengenai perbaikan sektor keuangan juga baik untuk mengurangi kemiskinan suatu negara juga mulai dilakukan oleh ahli ekonomi. Logikanya pembangunan sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan selanjutnya akan menciptakan peluang usaha termasuk lapangan kerja, selanjutnya dengan terbukanya lapangan kerja maka kemiskinan pun akan mereda.

Sektor keuangan, menurut Todaro, menyediakan setidaknya-tidaknya menyediakan enam fungsi utama yang sangat penting baik pada tingkat mikro maupun makro atau perekonomian secara keseluruhan,⁴ yakni; 1). *Menyediakan jasa pembayaran*, dengan jasa pembayaran yang disediakan perbankan seperti cek, kliring, RTGS⁵, kartu kredit. 2). *Mempertemukan para penabung dan investor*, sebagai intermediasor antara pihak kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan uang. 3). *Menghasilkan dan menyebarkan informasi*, baik di pasar saham maupun di perbankan informasi mengenai kemajuan usaha yang dibiayai menjadi informasi penting bagi kegiatan ekonomi secara makro. 4). *Mengalokasikan pinjaman secara efisien*, penyaluran dana investasi pada berbagai

³ Financial development dipercaya akan meningkatkan kemakmuran sudah dipercaya sejak lama. Resep ini dipercaya manjur sejak disarankan oleh ekonom kondang Ronald I. McKinnon dan Micheal J. Fry.

⁴ Todaro, M P dan Smith, Stepen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan, Penerbit Erlangga, 2004, hlm 289-291.

⁵ RTGS adalah singkatan Real Time Gross Settlement, yang merupakan transaksi jumlah besar (saat ini diatas Rp100juta) yang diberlakukan di perbankan Indonesia.

penggunaan yang menghasilkan tingkat pengembalian tertinggi. 5). *Resiko penentuan harga, resiko pengumpulan, dan resiko perdagangan*, diversifikasi resiko tersebut dapat dilakukan di pasar modal atau sindikasi pinjaman perbankan. 6), *Meningkatkan likuiditas asset*, pasar keuangan yang baik akan menyediakan pasar yang likuid untuk berbagai jenis surat berharga dengan berbagai jangka waktu.

Sementara Insukindro (1987) berpendapat bahwa lembaga keuangan sebagai badan yang dalam kegiatannya di bidang keuangan menarik uang/dana dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat mempunyai fungsi; (1) Penghimpun dan penyalur dana, (2), pemberi pengetahuan dan informasi, (3), pemberi jaminan dan (4), likuiditas. Sebagai penghimpun dana, dia harus mampu memberikan jaminan hukum maupun moral kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan aman. Di samping berkaitan dengan fungsi likuiditas, dia harus mampu memberikan jaminan kepada nasabah akan dapat diambil saat dibutuhkan atau saat jatuh tempo. Jika lembaga keuangan fungsi pemberi informasi, dia harus mampu sebagai analis kredit dan ekonomi, sehingga mampu memberi gambaran mengenai kegiatan ekonomi kini dan di saat yang akan datang. Diapun harus mampu memberikan gambaran mengenai prospek perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan bagi nasabah dan calon nasabah. Lembaga keuangan dapat bertindak memperlancar pertukaran barang-barang dan jasa dengan menggunakan uang dan, membantu menyalurkan dana dari penabung ke investor yang membutuhkan dana untuk investasi.⁶

Menyadari pentingnya sistem keuangan dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah membantu menciptakan kondisi tersebut dengan menerapkan kebijakan makroekonomi yang tepat, yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai, dengan membentuk pasar keuangan di daerah-daerah (bagi daerah yang belum punya), dan menerapkan peraturan dalam sistem keuangan dengan dasar kehati-hatian (*prudential principles*).⁷

Banyak sudah penelitian, dilakukan pada masa lalu dan saat ini tetap menjadi perhatian, melihat hubungan antara pengembangan sektor keuangan

⁶ Insukindro, *Pengantar Ekonomi Moneter, Teori, Soal dan Penyelesaiannya*, BPFE, Yogyakarta, Ed. 1, 1987. Hlm 24-25.

⁷ Todaro, M P dan Smith, Stepen C., *Op Cit*, hlm 289-291.

dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi.⁸ (Roubin and Sala-i-Martin 1992, King and Levine 1993, Easterly 1993, Pegano 1993, Gertler and Rose 1994, Levine 1997, Levine, Loayza and Beck 2000, Khan and Senhadji 2003, Christopolus and Tsionas 2004). Namun jika mempertanyakan bagaimana hubungan antara sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan, belum terlalu banyak literatur ekonomi yang mengungkapkannya, misalnya penelitian Honohan (2004) dan Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2004), dan penelitian Sylviane Guillaumont Jeanneney and Kangni Kpodar (2005). Honohan menganggap terdapat hubungan antara sektor keuangan dan kemiskinan absolute, sementara Beck et al meneliti sektor keuangan mendorong pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dari rata-ratanya. Peneliti pertama dengan menggunakan data antar negara, pengembangan sektor keuangan mengurangi porsi penduduk miskin dengan penghasilan kurang dari satu dollar perhari dengan mengontrol GDP per kapita. Peneliti kedua menemukan bahwa kemajuan di sektor keuangan akan mengurangi disparitas pendapatan melalui peningkatan pendapatan penduduk miskin. Peneliti berikutnya menyimpulkan bahwa kemajuan sektor keuangan *pro* terhadap penduduk miskin, namun instabilitas sektor keuangan mengganggu penduduk miskin. Baik kemajuan maupun instabilitas sektor keuangan utama disalurkan melalui jalur investasi secara fisik maupun human capital atau dari tabungan mereka.

Dampak kemajuan sektor keuangan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi telah terbukti secara empiris, berikut dampaknya terhadap penurunan penduduk miskin adalah sesuatu yang berkaitan pula (Bruno, Ravallion and Squire 1998). Namun demikian, dimungkinkan di negara tertentu pertumbuhan bukan hanya menurunkan penduduk miskin namun juga menciptakan ketimpangan pendapatan. Sebagaimana yang diteliti oleh Ravi Kanbur (2001), terdapat bukti empiris bahwa pertumbuhan pada pendapatan nasional perkapita berhubungan dengan pengurangan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Khusus untuk negara Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman di tahun 2003 yang menguji kemajuan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi mengkonfirmasi kebenaran penelitian sebelumnya.

⁸ Pionernya adalah dilakukan oleh John G Gurley dan Edward S.Shaw (1960)

Penelitian Abdurohman melihat peran kemajuan sektor keuangan melalui jalur kredit ke sektor swasta selanjutnya ke pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kecuk Suhariyanto et al di tahun 2009, dengan menggunakan data panel provinsi dari tahun 2002 sampai dengan 2007, menyimpulkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan signifikan menurunkan prosentase penduduk miskin.⁹

Marguerite S Robinson, seorang penasehat pemerintah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menyebutkan keberadaan lembaga keuangan mikro komersial di pedesaan dan daerah pusat penduduk miskin kota lah yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara nyata. Dikarenakan mereka secara langsung, dengan bantuan permodalan dari lembaga keuangan mikro komersial, dapat membiayai usahanya dan menghasilkan pendapatan secara mandiri dengan skema pasar, sehingga mereka keluar dari garis kemiskinan. Dalam buku yang ditulis oleh Robinson menyebutkan bahwa keberhasilan dari keuangan mikro dalam bentuk Unit Desa BRI dengan peningkatan laba secara konsisten adalah terletak pada pengenalan perilaku usaha oleh pada mantri kredit BRI dan penerapan suku bunga pasar, tanpa subsidi sejak tahun 1987.¹⁰

Pembangunan ekonomi selama periode booming minyak telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun sebaliknya saat periode badai krisis moneter yang juga melanda. Pada saat negara kita jaya dengan kekayaan minyak berbagai proyek pemerintah dibuat, banyak tenaga kerja berhasil diserap untuk mengerjakannya. Namun periode krisis, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana hampir seluruh sektor ekonomi mengurangi tenaga kerjanya atau tidak menerima pekerja baru. Kedua kondisi booming minyak dan krisis moneter (berlanjut ke krisis ekonomi) merupakan kedua kondisi ekstrem antara banyak lapangan pekerjaan disediakan dan banyak PHK. Setelah priode booming minyak ada periode liberalisasi perbankan yang ditandai dengan dipermudahnya pendirian bank baru, sampai dengan dibebaskannya penetapan bunga pinjaman oleh perbankan di tahun 1980-an. Sejarah perbankan mengenalnya dengan sebagai Paket Oktober (pakto),

⁹ Suhariyanto, Kecuk, et al, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, Sub Direktorat Analisis Statistik, Katalog BPS:1306030, Desember 2009.

¹⁰ Pendapat Robinson, Marguerite S dalam bukunya berjudul *"Revolusi Keuangan Mikro – Pembiayaan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin"* (versi Bhs Indonesia), The World Bank, GTZ, Open Society Institute, 2001.

liberalisasi perbankan ini sempat membuat pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia mencapai 6,5%. Sebaliknya terjadi pada krisis melanda di mana bukan saja pertumbuhan ekonomi, pengangguran merajalela, masyarakat miskin juga bertambah banyak.

Indonesia memulai reformasi ekonominya, khususnya sektor keuangan, pada tahun 1983 sebagai jawaban terhadap penurunan kinerja ekonomi pada tahun 1982 yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ada dua penyebab utama penurunan pertumbuhan ekonomi (Hanna, 1994, dan Booth, tahun 1992); pertama sebagai akibat melemah permintaan ekonomi dunia pada awal tahun 1980an yang menyebabkan ekspor berbagai komoditi yang dihasilkan Indonesia terkena dampaknya, khususnya produk-produk pertanian; kedua, kedua turunnya harga minyak dunia, yang menyebabkan turunnya pemasukan devisa berasal dari minyak. Karena Indonesia sangat tergantung nasibnya pada berbagai komoditi yang bersifat primer (minyak, pertanian dan tambang), maka kedua guncangan (*shock*) tersebut sangat memukul ekonomi Indonesia.

Tujuan pembangunan Indonesia di bidang ekonomi sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 45 adalah salah satu dari makna yang tersirat dari kegiatan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan. Berikut beberapa pasal yang berhubungan dengan ekonomi, tenaga kerja atau kemiskinan. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu pada pasal 28D ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 33 ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹¹ Selain itu pada dasar negara, Pancasila, pada sila ke lima menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada sila ini dengan sangat jelas menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mengurangi penduduk miskin setiap gerak (kebijakan) pembangunan yang diselenggarakan aparat pemerintah dan masyarakat agar memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

¹¹ UUD 1945 perubahan I, II, III, dan IV.

Pembangunan ekonomi Indonesia pada tiga dekade terakhir telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi para ahli pembangunan ekonomi. Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1990-an adalah paling mengesankan. Dari tahun 1980 sampai dengan 1996, pendapatan nasional bruto Indonesia meningkat 6,5% per tahun, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di berbagai provinsi meningkat, pada saat bersamaan juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk perkapitanya. Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi juga telah mengurangi prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Diperkirakan 42,3 juta orang (28,56% dari jumlah penduduk) pada tahun 1980 tergolong pada penduduk miskin, kemudian menjadi 27,2 juta orang (15,08% dari jumlah penduduk) pada tahun 1990, dan secara perlahan namun pasti kembali menurun menjadi 22,6 juta orang (11,2% dari jumlah penduduk) pada tahun 1996 (BPS, 1997).

Namun demikian, badai krisis yang menyapu Asia pada tahun 1997 telah menghapus kemajuan ekonomi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh Indonesia. Krisis ekonomi tersebut telah membawa pencapaian kemajuan ekonomi makro Indonesia kembali kebelakang termasuk kelompok masyarakat yang paling retan. Pendapatan perkapita turun dari 1.118,8 USD pada tahun 1996 menjadi masing-masing 375,2 dan 540 USD pada tahun 1997 dan 1998. Pertumbuhan ekonomi menurun dari 7,82% pada tahun 1996 menjadi 4,70% di tahun 1997, dan anjlok ke -13,20% pada tahun 1998. Akibat dari penurunan kegiatan ekonomi salah satunya pada penduduk yang tadinya hidup sedikit di atas garis kemiskinan kembali jatuh ke dalam kubangan kemiskinan. Penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan meningkat tajam dari 22,6 juta orang (11,2% dari total penduduk) pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta (24,23%) pada tahun 1998 (BPS,1999). Yang pasti krisis diawali dengan bergejolaknya nilai tukar tersebut diperkuat pengaruhnya oleh perbankan, menjadi krisis ekonomi yang akut yang pernah diderita oleh Bangsa Indonesia. Perbankan, bukan hanya memperkuat kemajuan sektor keuangan tetapi juga kemunduran sektor keuangan.

Krisis finansial yang menimpa negara maju dan *emerging economies* terbukti memberikan dampak negatif berupa penurunan output rata-rata sebesar 9% dan meningkatnya angka pengangguran (Reinhart: 2009).¹²

Dengan menggunakan analisis *convergence*, Haryanto (2001) melihat sebaran (dispersi) GDP perkapita riil di Indonesia terjadi penurunan dari 0,266 di tahun 1983 0,242 di tahun 1993, namun kemudian mengalami peningkatan selama krisis 1998 menjadi 0,297. Menurut Haryanto hal ini menunjukkan terjadi perbaikan distribusi pendapatan saat pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat yang tinggi. Kesimpulan penting lainnya dari penelitian Haryanto adalah distribusi pendapatan di daerah miskin akan lebih cepat diperbaiki dengan ditingkatkannya akumulasi modal, perbaikan infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan tingkat pendidikan dan transfer pengetahuan kepada industri lokal, dan kontrol terhadap pertumbuhan penduduk.¹³ Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Philips Aresis dan Asena Caner, liberalisasi keuangan akan mengurangi kemiskinan melalui jalur pertumbuhan ekonomi.¹⁴

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penulisan penelitian ini maka akan dilihat efek dari pembangunan sektor keuangan, khususnya pada otoritas moneter dan perbankan, terhadap penduduk miskin melalui baik efek langsungnya maupun tidak langsung yakni;

- a. Bagaimana pengaruh kemajuan sektor perbankan, yang ditandai dengan liberalisasi perbankan tahun 1983, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- b. Melalui jalur mana kemajuan sektor perbankan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia?

¹² _____, Outlook Ekonomi Indonesia 2010-2015, Edisi Juli 2010, Jakarta, hal 72.

¹³ Haryanto, *Indonesian Regional Economic Development: A Neoclassical Growth Analysis*, 2001

¹⁴ Arestis, Philip and Caner, Asena, *Financial Liberalization and The Geography of Poverty*, Cambridge Centre For Economic and Public Policy, CCEPP WP-09, University of Cambridge, 2009

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apakah kemajuan sektor perbankan telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengetahui dampak dari instabilitas sistem keuangan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Indonesia.
- b. Untuk mengetahui jalur kemajuan sektor perbankan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian.

- a. Bagi Ilmu pengetahuan. Penelitian yang menghubungkan antara kemajuan sektor perbankan (atau secara umum sektor keuangan) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif jarang, sehingga penelitian ini akan memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi lembaga Otoritas Keuangan, khususnya perbankan: Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan referensi bagi otoritas perbankan atau keuangan secara umum terhadap kebijakan yang telah diambilnya selama ini, selain memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan di masa yang datang. Seperti kebijakan pemerintah untuk memberikan permodalan langsung kepada masyarakat miskin, program kredit dengan bunga ringan (murah) bagi golongan masyarakat (nelayan) atau daerah tertentu (bencana atau terpencil), dukungan bagi pengembangan kelembagaan keuangan mikro (BPR atau Non BPR) yang dimiliki atau didukung permodalannya di pedesaan atau kantong-kantong kemiskinan.
- c. Bagi Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah): Penelitian ini memberikan masukan mengenai beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan perbankan (termasuk perbankan yang dimiliki pemda seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPR) atau lembaga keuangan lainnya, seperti keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit (termasuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah) dan lembaga keuangan (mikro) bukan bank bukan koperasi.

1.5. Hipotesis

Kemajuan sektor perbankan akan mengurangi jumlah penduduk miskin Indonesia, baik melalui pertumbuhan ekonomi maupun dari tersedianya layanan perbankan.

1.6. Ruang Lingkup dan Sumber Data.

Rentang waktu penelitian adalah sejak tahun 1970an sampai dengan 2009. Penelitian terutama dikonsentrasikan pada setelah tahun 1983, pertimbangannya adalah Bank Indonesia selaku otoritas moneter sekaligus perbankan melakukan liberalisasi perbankan sejak 1983. Sebelum tahun 1983 perbankan dipandang relatif belum berkembang.

Keterkaitan antara kemiskinan, kemajuan perbankan, dan pengangguran hanya akan dianalisis di level nasional. Sumber data utama berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). BPS melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), atau survey lainnya (misalnya Sakernas) menghasilkan data yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, serta produk domestik bruto riil (tahun dasar 2000) atau Gross Domestic Bruto Riil (GDPR). Sementara data yang berkaitan dengan sektor moneter dan perbankan berasal dari Bank Indonesia.

Kemajuan sektor perbankan akan dilihat dari dua hal yakni, pertama, berkaitan dengan luasnya jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit (*financial widening*), dan kedua, semakin dalamnya struktur keuangan (*financial deepening*).

Semakin meluasnya pelayanan perbankan (*banking outreach*) dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat menunjukkan semakin luas *financial widening*. Bila dikaitkan dengan indikator kemiskinan maka secara sederhana dapat dituliskan menjadi;

$$\text{Miskin} = f(\text{Pertumbuhan kredit, IHK, Pengangguran, Krisis}).$$

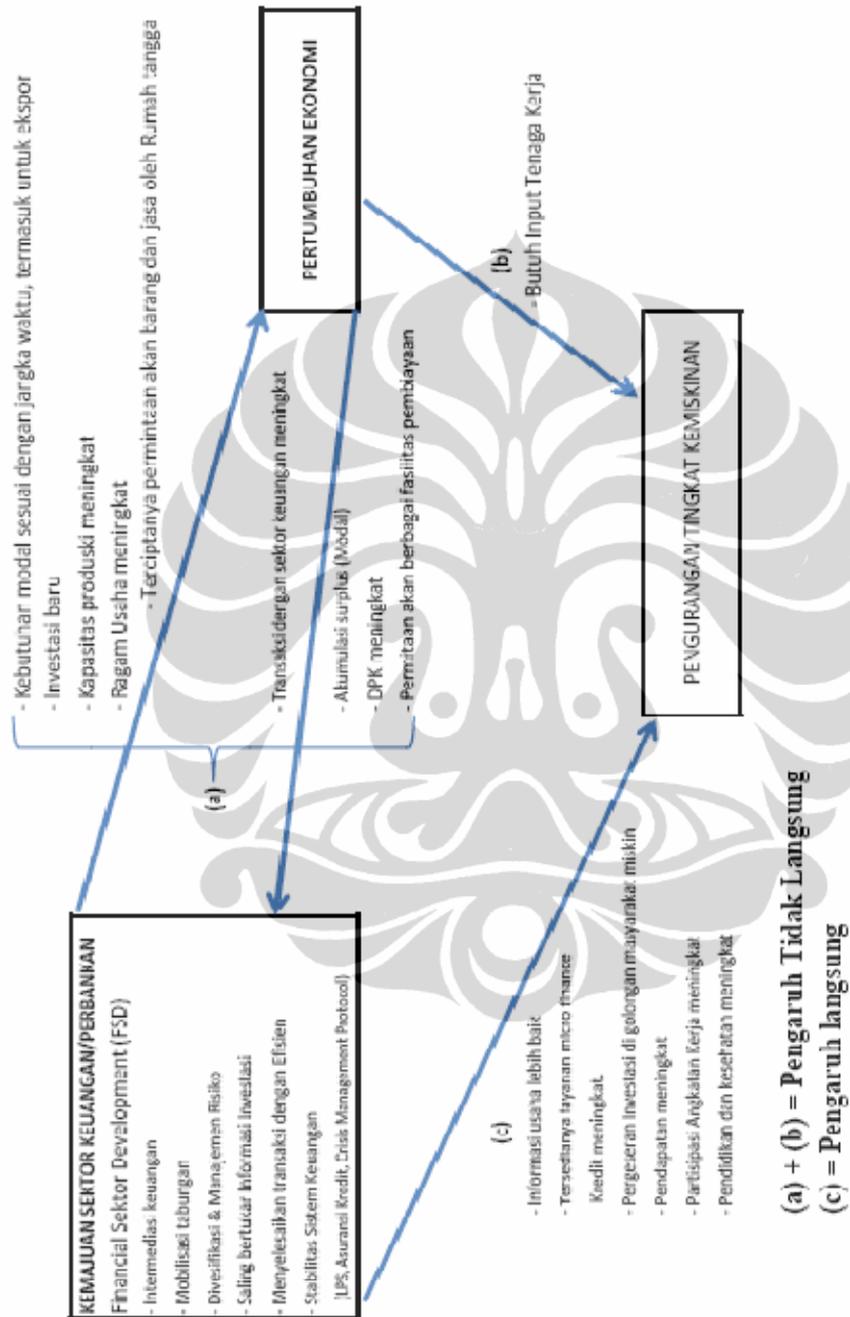
Selain itu kemajuan perbankan dilihat pula jumlah uang beredar dalam perekonomian atau dikenal dengan kedalaman sistem keuangan (*financial deepening*) yang lazim diukur dengan jumlah uang beredar (M2) per GDP.

Semakin dalam sistem keuangan maka semakin baik kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi indikator kemiskinan. *Financial deepening* juga dikaitkan dengan likuiditas perekonomian. Secara sederhana dapat dituliskan menjadi;

$$\text{Miskin} = f(\text{M2/GDP}, \text{Kredit}, \text{Krisis}).$$



1.7. Kerangka Pemikiran¹⁵



¹⁵ Adopsi dari Departemen for Internasional Development (DFID), *The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction*, Glasgow, UK, August 2004, p.5

1.8. Sistematika Penulisan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup dan sumber data, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan hasil penelitian ekonomi terdahulu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, peranan uang (modal) dalam perekonomian, kemajuan sektor keuangan, independensi bank sentral, inflasi, pengangguran yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan kemiskinan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian akan memuat ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, tools dan software.

BAB 4 PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

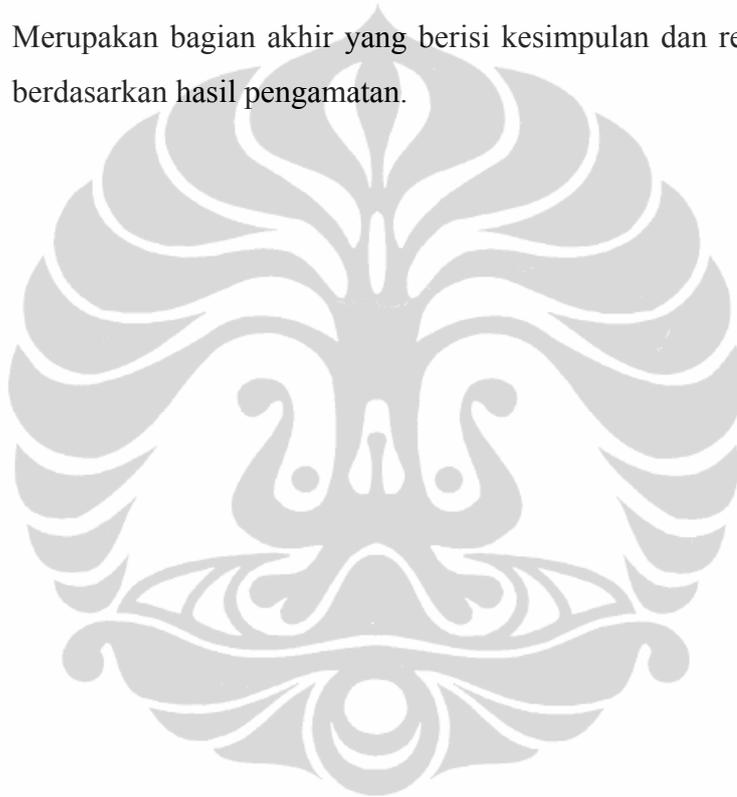
Dalam bab ini akan diuraikan kondisi kemajuan sektor keuangan (*financial*) baik dari sisi perbankan, non perbankan maupun dari sisi pasar bursa saham di Indonesia lalu dilanjutkan dengan perkembangan kinerja perbankan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009, berikut beberapa peristiwa ekonomi yang menyertainya. Selain itu beberapa kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, d.h.i Bank Indonesia, sepintas akan disertakan saat membahas perkembangan perbankan. Khusus pada saat periode krisis ekonomi yakni tahun 1997/1998 dan 2008/2009 akan dijelaskan sedikit lebih mendalam.

**BAB 5 PENGARUH KEMAJUAN SEKTOR PERBANKAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dianalisis keterkaitan antara kemajuan perbankan termasuk moneter, peranan pemerintah, dan kegiatan produksi bersama dengan IHK, pengangguran, serta kondisi krisis terhadap kemiskinan di Indonesia.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengamatan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan disampaikan teori atau hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan uang (modal) dalam perekonomian, hubungannya dengan inflasi, output, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Pada tahun 1928 Charles Cobb (ahli matematika) dan Prof. Paul Douglas (seorang ekonom, yang akan menjadi senator Amerika Serikat) menyimpulkan fungsi produksi yang dapat menjelaskan hubungan antara output dengan modal fisik dan tenaga kerja di Amerika Serikat antara tahun 1899 sampai dengan 1922. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:

$Y = f(L, K)$, atau $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ di mana Y adalah Output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal, α adalah angka antara nol dan satu.

Menurutnya, pembagian pendapatan nasional di antara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama periode jangka panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang mengesankan, pendapatan total pekerja dan pendapatan total pemilik modal tumbuh pada tingkat yang nyaris sama.¹⁶ Secara implisit model Cobb-Douglas ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan akan meningkatkan pendapatan pekerja sekaligus juga pendapatan pemilik modal.

Selanjutnya berdasarkan fungsi *Cobb-Douglas* ini, seorang ekonom bernama Robert M. Solow mengajukan suatu model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan.¹⁷ And ¹⁸

Arthur Okun (ahli ekonomi penasehat presiden Kennedy) yang melihat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan tingkat output yang dihasilkan. Hubungan ini dikenal sebagai "*Okun Law*". Jika terjadi peningkatan

¹⁶ Mankin, N Gregory, *Makroekonomi*, Edisi ke 6, Penerbit Erlangga, 1997, hlm 54-55

¹⁷ Mankin, N Gregory, *Op Cit.*, hlm 182 - 183

¹⁸ Dornbusch, R; Fischer Stanley and Startz, *Macroekonomi*, PT. Media Global Edukasi, 2008, Bab 3, hlm 53-72

output, misalnya sebanyak A %, maka pengurangan menurun sebanyak B%.¹⁹ Secara matematik *okun law* dapat dituliskan sebagai berikut;

$$\mu_t - \mu_{t-1} = -\beta (g_{yt} - g_t),$$

μ adalah tingkat pengangguran dan g adalah pertumbuhan output.

Pembangunan sektor keuangan mempunyai pengaruh ekonomi ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang bersamaan juga menurunkan tingkat pengangguran. Menurunnya tingkat pengangguran berarti juga menurunnya penduduk miskin.

Pada tahun 1958, A.W.Phillips menghubungkan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di United Kingdom antara tahun 1861 sampai dengan 1957. Ia menemukan bukti yang jelas bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dengan tingkat inflasi. Dua tahun kemudian Paul Samuelson dan Robert Solow mengulangi penelitian phillips dengan menggunakan data antara 1900 sampai dengan 1960 di Amerika Serikat, membuktikan kembali kebenaran temuan Phillips. Kedua ekonom ini, Samuelson dan Solow, menyebut hubungan ini sebagai “**Kurva Phillips**”, dan menjadi pemikiran *central* dalam kebijakan dan ilmu ekonomi makro. Suatu negara memiliki pilihan kombinasi antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran.²⁰ Pengambil kebijakan ekonomi makro suatu negara dapat memilih kebijakan mengurangi tingkat pengangguran secara dratis namun mentolerir tingkat inflasi yang relatif tinggi, atau memilih tingkat inflasi sangat rendah atau harga sangat stabil namun mentolerir tingkat pengangguran yang tinggi.²¹

Namun demikian, pada tahun 1970an logika kurva phillips ini terpatahkan. Saat itu di Amerika Serikat dan mayoritas negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), memiliki kondisi tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi. Hubungan antara inflasi dengan pengangguran disesuaikan menjadi tingkat pengangguran berhubungan dengan *perubahan* tingkat inflasi. Saat ini di Amerika Serikat, tingkat

¹⁹ Blanchard, Oliver, *Macroeconomics*, 4th Edition, 2006, chapter 9 p.186-187

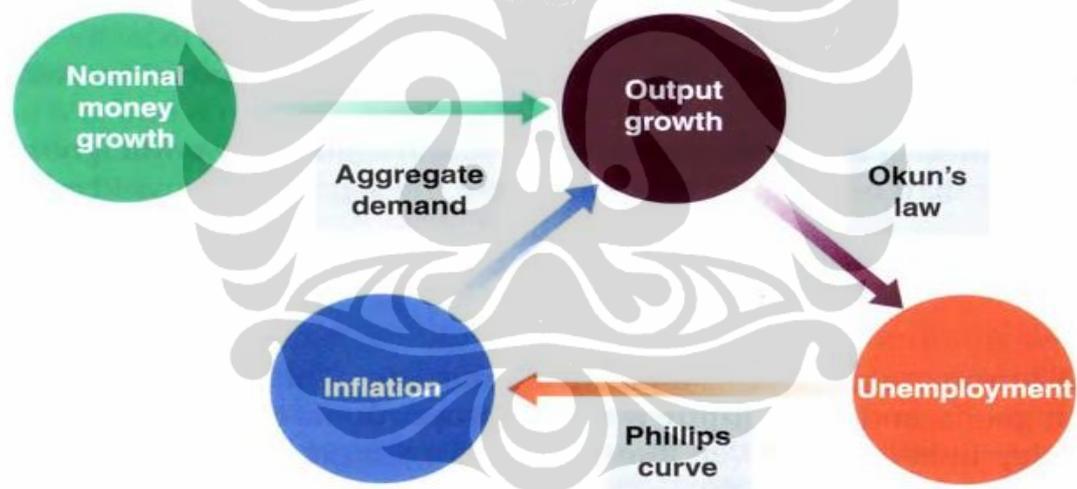
²⁰ Dornbusch, R., Fischer Stanley and Startz, *Op Cit*, Bab 6, hlm 120 - 126

²¹ Blanchard, Oliver, *Op Cit*, chapter 3 p.165

pengangguran yang tinggi tidak menyebabkan tingkat inflasi menjadi rendah, namun mendorong tingkat inflasi ke tingkat yang lebih rendah.²²

Pada tahun 2007, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat signifikan menjadi 6,2% dari -13% pada tahun 1998. Tetapi tingkat pengangguran justru meningkat drastis menjadi 10,3% dari 5,4% tahun 1998. Menurut Blanchard ada dua hal yang dapat menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap pengangguran, yaitu: (i), meningkatnya partisipasi kerja; dan (ii), penimbunan tenaga kerja. Kelompok partisipasi kerja (*labor force participation*) merupakan kelompok yang bukan angkatan kerja namun aktif dalam perekonomian. Meningkatnya aktivitas kelompok ini dapat mengurangi peluang angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan.²³

Berikut ini diagram yang menggambarkan kaitan antara pertumbuhan output, pengangguran, Inflasi, dan pertumbuhan jumlah uang beredar.²⁴



Blank and Card (1993) melakukan penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa kini menjadi kurang sensitif terhadap terhadap penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan situasi tahun 1960an. Penelitian Formby et al (2001) memberikan kesimpulan yang sama yaitu dampak pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terhadap pengurangan kemiskinan menurun. Riset yang dilakukan oleh Torm (2003) di enam bekas

²² Blanchard, Oliver, *Op Cit*, chapter 3 p.165

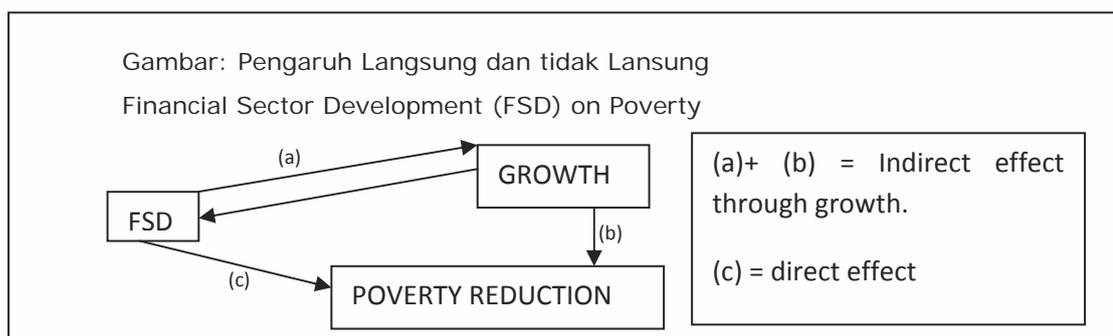
²³ Soekro, Shinta R.I. dkk, *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*, Bank Indonesia, Gramedia, 2008, hlm 57-58.

²⁴ Blanchard, Oliver, *Op Cit*, chapter 9 p.190

negara Uni Soviet menghasilkan temuan yang cukup komprehensif. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan hanya terjadi di tiga dari enam negara yang diteliti. Dari penelitian ketiga kelompok peneliti secara umum dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak terjadi seketika, tetapi ada *time lag* yang lama tergantung pada situasi perekonomian di negara yang bersangkutan. Ada hubungan yang jelas dan langsung antara penurunan ekonomi dan peningkatan kemiskinan, namun antara hubungan ekonomi yang tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan kurang jelas dan tidak langsung.²⁵

Seorang ekonom bernama Robert Lucas dan Thomas Sargent mengatakan bahwa analisis yang digunakan oleh ahli ekonomi bank sentral Amerika Serikat dengan menggunakan model ekonomi di era tahun 1970an, mengenai cara mengurangi kemiskinan bisa *misleading*. Model sederhana tersebut diangkat dari persamaan kurva phillips, dengan model tersebut kemiskinan akan dikurangi sejalan dengan pengurangan pengangguran. Kritik terhadap pendekatan ini disebut juga dengan **Lucas Critique**. Menurut Lucas, para penetapan upah (*wage setters*) tidak akan menganggap bahwa tingkat inflasi sama dengan yang lalu merupakan asumsi yang tidak dapat berlaku lagi. Menurut Lucas, *wage setters* akan memperkirakan kedepan bahwa bank sentral (*The Fed*) akan menjaga inflasi dalam derajat yang rendah.²⁶

Keterkaitan antara Kemajuan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dapat juga digambarkan sebagai berikut.²⁷



²⁵ Suhariyanto, Kecuk et al, *Analisis kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan*, BPS, Desember 2009, hlm 60-61

²⁶ Blanchard, Oliver, *Op Cit*, chapter 9 p.195

²⁷ Departemen for Internasional Development (DFID), *The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction*, Glasgow, UK, August 2004, p.5

Teori yang menganggap perbaikan sektor keuangan mempunyai **pengaruh langsung**²⁸ terhadap berkurangnya angka kemiskinan melalui ketersediaannya mikrofinance bagi masyarakat miskin, pergeseran bentuk investasi dengan keuntungan dan resiko rendah ke yang tinggi, perbaikan informasi (*perfect information*) tentang sektor keuangan.

Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat *pengaruh langsung* kemajuan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan karena meluasnya layanan sektor keuangan (termasuk microfinance) yang dapat langsung diakses masyarakat miskin sehingga meningkatkan penghasilan mereka (Jalilian & Kirkpatrick, 2001; Robinson, Marguete S, 2001). Jalilian dan Kirkpatrick menggunakan Bank Deposit Money Assets dan Net Foreign Asset sebagai pengukur FSD.

Dengan kemudahan akses terhadap kredit dan layanan keuangan lainnya oleh masyarakat akan menggeser perilaku investasi dengan penghasilan (*return*) dan resiko rendah atau untuk berjaga-jaga (seperti emas) kepada investasi dan penghasilan tinggi (pendidikan, traktor dlsb) yang akan langsung meningkatkan pendapatan masyarakat (Deaton 1991).

Masyarakat miskin di negara berkembang umumnya tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan formal, dan menyebabkan mereka terpaksa berhubungan kepada peminjam uang lepas (*rentenir*) dengan harga dan resiko tinggi. Hal ini menghalangi mereka untuk dapat masuk ke pasar secara efisien dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan kemajuan sektor keuangan, sehingga sampai ke daerah mereka, dan pemberian informasi yang baik (*versus imperfect information*) mengenai tatacara berhubungan dengan perantara keuangan (perbankan) akan menyebabkan mereka dapat mengakses kebutuhan modal selanjutnya digunakan untuk berusaha selanjutnya akan memperbaiki pendapatan mereka (e.g Stigliz & Weiss, 1981).

Sementara **pengaruh tidak langsung**²⁹ adalah melalui pertumbuhan karena pertumbuhan ekonomi menyebabkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya sehingga membutuhkan input tenaga kerja yang berarti peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin cenderung mempunyai

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

usaha yang tidak berijin maka kemajuan sektor keuangan formal tidak dapat langsung menyalurkan kredit kepada mereka. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana kemajuan sektor keuangan formal mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi melalui, mobilisasi tabungan, manajemen resiko, memperlancar transaksi.

Saving mobilisation. Levine (1997) melihat bahwa kemajuan sektor keuangan akan menyebabkan mobilisasi tabungan menjadi baik, yang sekaligus juga berarti membaiknya kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan pinjaman.

Dengan kata lain fungsi intermediasi sektor keuangan berjalan baik (McKinnon, 1973), sehingga petani dapat membeli teknologi baru melalui kredit, yang hal tersebut sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan tabungan pribadi petani. Kredit juga dapat menyebabkan investasi terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, atau memperbaiki human capital (De Gregirio, 1996). Mobilisasi tabungan juga berpengaruh baik pada pertumbuhan melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan berarti juga memperbaiki human capital.

Risk Management. Proyek-proyek atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha membutuhkan permodalan dengan jangka waktu menengah (*mid-term*) hingga panjang (*long-term*), dilain pihak penabung lebih cenderung dalam jangka yang pendek atau bersifat lancar (*likuid*). Karena perbankan dan lembaga keuangan lainnya merupakan kombinasi dari banyak penabung, yang hampir tidak mungkin menarik dalam waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan lembaga perantara keuangan ini menginvestasikannya ke permodalan jangka menengah dan panjang, selain mereka juga menyiapkan sejumlah tertentu untuk menjaga likuiditasnya (e.g. Levine, 1991).

Risk diversification. Menginvestasikan kepada usaha perorangan akan lebih berisiko jika dibandingkan dengan menginvestasikan ke pada usaha yang beragam. Sebagai penabung umumnya tidak menyukai resiko tinggi, lembaga keuangan menyebar resiko yang akan timbul, misalnya antara perbankan dengan pasar modal, memungkinkan pemisahan antara usaha dengan resiko (*risk*) tinggi dan ber-keuntungan (*return*) tinggi secara agregat (Saint-Paul, 1992, and

Obstfeld, 1994). Diversifikasi resiko memungkinkan perusahaan menyebarkan pembiayaan melakukan inovasi-inovasi yang sekaligus resiko kegagalannya tinggi, sedang dan rendah. Dengan demikian lembaga keuangan memungkinkan peningkatan produk dengan teknologi baru, yang juga bersamaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (King, Levine, 1993).

Acquiring Information. Perantara keuangan, seperti bankir dan fund manager, yang mengumpulkan informasi atas nama investor, dapat berbagi saling pengeluaran dalam mendapatkan informasi investasi yang menguntungkan (Greenwood & Javanovic, 1990). Selain itu pengaturan baik dalam lembaga keuangan dapat dengan cepat mengakumulasi modal yang dibutuhkan dan meningkatkan penggunaannya yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan (Bencivenga and B.Smith, 1991).

Facilitating Exchange. Lembaga keuangan memfasilitasi transaksi dalam ekonomi dengan menyediakan mekanisme pembayaran, dan mengurangi ongkos sehingga transaksi menjadi efisien. Dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan transaksi ekonomi menjadi lebih efisien lagi, sehingga akan menambah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran ini kembali pada ide Adam Smith (1776) untuk melakukan spesialisasi dalam memproduksi yang menghasilkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Spesialisasi pada lembaga keuangan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas (dibandingkan dengan barter) dalam bertransaksi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Walaupun kemajuan sektor keuangan dapat (secara langsung maupun tidak) mengurangi angka kemiskinan, tetapi krisis (instabilitas) ekonomi dapat menghapuskan pencapaian yang diperoleh dari kemajuan sektor keuangan sebelumnya (ADB report, 2004).³⁰

Berthelemy & Varoudakis (1996) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan yang tidak baik (*insufficient*) dapat membawa suatu bangsa ke dalam jebakan lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Menurut mereka karena pengaruh *increasing return to scale* di sektor keuangan, lingkaran dapat tercipta, saat intermediasi sektor keuangan rendah menyebabkan hanya sedikit pemain di

³⁰ Stefan Jansen, Michael Hamp, Alferd Hanniq, *Mikrofinance in Rural Financial System and the Development of Local Ekonomi, Key Issues for a Comprehensive Strategy to Develop the Indonesia Microfinance Industry*, GTZ-ProFI, Jakarta.

pasar. Rendahnya persaingan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghasilkan penghimpunan dana masyarakat (deposito dan tabungan) menjadi rendah, dan membawa jumlah uang yang dapat diputar lembaga keuangan kecil, dan seterusnya.³¹

Peranan uang dalam perekonomian sangat penting dalam memperlancar kegiatan transaksi. Setelah dimulai dengan era barter, memasuki era uang yang menggunakan media emas dan perak berlanjut ke penggunaan uang kertas yang sekaligus juga berarti kemunculan dunia perbankan. Fungsi uang tidak hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpanan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Pengertian yang tidak terbatas pada uang kartal, yaitu uang kertas dan logam, tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk variasinya, dari uang giral, simpanan di bank, kartu kredit, dan sebagainya, seiring dengan perkembangan pesat di sektor keuangan. Alhasil, perkembangan jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga investasi.³²

Pada abad ke 19 juga telah dibicarakan mengenai peran kredit dalam perekonomian, diinspirasi oleh Fredrich List yang membagi masa pembangunan ekonomi menjadi 5 masa, Hildebrand yang membagi kemajuan perekonomian suatu bangsa menjadi 3 tingkat yaitu; 1), perekonomian natura, 2), perekonomian dengan memakai uang, dan 3), perekonomian dengan menggunakan kredit.³³

Dalam membicarakan uang dalam perekonomian, adalah penting untuk membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam beredar adalah uang kertas dan uang logam yang diedarkan oleh bank sentral. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang beredar dalam perekonomian.³⁴ Uang beredar dalam batasan dikelompokkan menjadi uang dalam arti sempit (M1) yakni uang kartal ditambah uang giral, dan uang dalam arti luas (M2) yakni M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi adalah tabungan dan

³¹ Departemen for Internasional Development (DFID), *Op Cit*, 2004, p.15-16

³² Perry Warjiyo dkk, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*, PPSK-BI, 2004, bab I, hlm 1.

³³ Hatta, Muhammad, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Intidayu Press, Jakarta, 1985, hlm 13

³⁴ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Bina Grafika, 1981, bab 6, hlm 236-238

deposito.³⁵ Pengertian dan cakupan uang beredar tidak sama di berbagai negara. Di Indonesia hanya dikenal uang beredar dalam arti sempit (M1) yang terdiri dari uang kartal (C) ditambah uang giral (D), dan uang beredar dalam arti luas (M2) yang terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi. Di Amerika Serikat, Kanada dikenal uang beredar yang terdiri dari M1, M2, dan M3, dan Inggris dikenal dengan M4, masing-masing dengan definisi dan cakupan yang berbeda-beda.^{36 37}

Kemajuan sektor keuangan dapat dilihat dari banyaknya jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar memiliki hubungan dengan variabel ekonomi yang bernama inflasi. Teori klasik yang membicarakan hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan tingkat inflasi adalah teori kuantitas uang (*quantity of money*), yang berasal dari pemikiran dari ahli teori ekonomi moneter pertama yang juga seorang filsuf dan ekonom, David Hume (1711-1776). Teori tersebut masih dipandang sebagai alat utama untuk menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi ekonomi jangka panjang. Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi, kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah uang yang dibutuhkan dalam bertransaksi. Hubungan antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yang disebut dengan persamaan kuantitas (*quantity equation*);

$$MV = PT,$$

M (Uang-Money) x V (perputaran-*velocity of money*) = P (Harga-Price) x T (Transaksi-trade).

Ketika mempelajari peranan uang dalam perekonomian, para ekonom seperti Milton Friedman, (*kaum monetaris*) biasanya menggunakan versi persamaan kuantitas yang agak berbeda dengan persamaan pertama, karena transaksi (T) sulit diukur maka perannya digantikan dengan output total dari perekonomian Y. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga

³⁵ Mishkin, S Frederic, *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, Peason Internasioinal Ed, 8th Ed., 2007, Chapter 3, p.56-60

³⁶ Suseso & Abdullah P, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, seri kebanksentralan No.7, PPSK-BI, 2003. Hlm 8-9.

³⁷ Dornbusch, R; Fischer Stanley and Startz, *Op Cit*, Bab 15, hlm 369 - 372

satuan unit output, maka nilai uang dari output adalah PY . Y juga dikenal sebagai GDP Riil, dan P adalah deflator GDP, dan PY adalah GDP nominal. Persamaan kuantitas menjadi $MV=Y$.³⁸

Beberapa tahun sebelum Irvin Fischer mengembangkan persamaan pertukaran, Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan persamaan sisa tunai untuk menerangkan ciri-ciri perkaitan di antara uang beredar dan tingkat harga-harga. Analisa Marshall tersebut kemudian dikenal dengan teori sisa tunai. Seperti telah dinyatakan teori sisa tunai mempunyai pandangan yang tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya terhadap harga-harga. Bentuk persamaan adalah $M = k PT$, di mana M , P , T adalah sama dengan persamaan $MV=PT$, sementara k adalah bagian dari pendapatan yang ingin tetap dipegang masyarakat dalam bentuk tunai.³⁹

Teori lainnya yang melihat hubungan antara pendapatan (Y) dengan tingkat tabungan masyarakat (S) adalah teori permintaan uang berdasarkan motif memegang uang yang disampaikan oleh John Maynard Keynes atau lazim juga disebut *liquidity preference theory*. Menurut Keynes, seseorang (termasuk negara) dalam memegang uang berdasarkan tiga motif yakni, motif untuk bertransaksi (*transactions motive*), berspekulasi (*speculative motive*), dan untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*). Teori permintaan uang tersebut dibangun berdasarkan *trade off* antara keuntungan memegang uang lebih banyak dengan beban bunga yang diakibatkannya. *Trade off* disini adalah biaya peluang dari memegang uang (*opportunity cost of holding money*) sama dengan selisih antara pendapatan dari aset lain dengan tingkat bunga itu sendiri. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (Y), sementara permintaan uang untuk berspekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga (i).⁴⁰ Ketiga motif memegang uang dapat disederhanakan menjadi persamaan: $Md/P = f(i, Y)$; di mana tanda fungsi i negatif dan Y positif.⁴¹

Selain itu juga Simon A **Kuznets curve** memberikan pengetahuan tentang strategi pembangunan ekonomi suatu bangsa berikut periodeisasi pembangunan

³⁸ Mankin, N Gregory, *Op Cit*, hlm 82-84

³⁹ Sukirno, Sadono, *Op Cit*, bab 4, hlm 243-244

⁴⁰ Dornbusch, R., Fischer Stanley and Startz, *Op Cit*, Bab 15, hlm 375

⁴¹ Mishkin, Frederic S., *Op Cit*, p 449

ekonomi suatu bangsa. Temuannya dikenal dengan “kurva kuznets”, yang menggambarkan bahwa disparitas akan meningkat selama masa awal pembangunan ekonomi, namun jika pertumbuhan ekonomi berlanjut ditandai meningkatnya investasi fisik jika sampai pada rata-rata pendapatan tertentu disparitas akan menurun. Kurva kuznets juga kenal karena berbentuk huruf U, pada sumbu Y mewakili disparitas atau koefisien Gini dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu X nya mewakili pendapatan perkapita.

Teori pembangunan sektor keuangan berdasarkan pemikiran kuznets (1955) yang menggambarkan pembangunan ekonomi, termasuk sektor keuangan, akan menyebabkan migrasi penduduk berpenghasilan rendah, yang umum di sektor pertanian, ke penduduk berpenghasilan tinggi di sektor modern (industri dan jasa), pada saat yang bersamaan disparitas mulai meningkat.⁴²

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Jauh sebelum Simon Kuznet menyampaikan hipotesanya mengenai ketidakmerataan pendapatan, Pareto (1897), telah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidak mengikuti distribusi normal, tetapi mengikuti perumusan sebagai berikut: $A = N/X^b$. A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari pada X; N : jumlah penduduk total dan b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2. Berdasarkan hasil tersebut, Pareto, menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, di mana kelompok penduduk yang terkaya mendapat porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuan ini selanjutnya dikenal dengan *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80% dari pendapatan nasional.⁴³

Sementara Clarke & Fou (2002) dengan menggunakan kredit kepada pihak swasta untuk menunjukkan fungsi intermediasi sektor keuangan, menyimpulkan bahwa hubungan antara perbaikan sektor keuangan dengan ketimpangan pendapatan bersifat negatif, dan tidak berbentuk U seperti pada kurva kuznets.

⁴² DFID., *Op Cit*, 2004, p.17

⁴³ Nursyahrizal dan Chyssanti, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*, Katalog BPS: 3205015, BPS, Jakarta, 2009, hlm 36 – 37.

Hubungan negatif antara FSD dengan ketimpangan pendapatan akan lebih besar terjadi pada negara kecil dengan sektor pertanian yang dominan.⁴⁴

Beck, Demirgüç-Kunt & Levine (2004) dengan menggunakan kredit kepada sektor swasta terhadap distribusi pendapatan menyimpulkan bahwa pendapatan 20% masyarakat berpenghasilan terendah tumbuh lebih cepat dari pendapatan rata-rata perkapita nasional untuk negara dengan tingkat perkembangan sektor keuangan baik, dan juga mengakibatkan turunnya ketimpangan pendapatan.⁴⁵

Peranan mikrofinance terhadap turunnya kemiskinan juga telah diteliti. Mck Nelly & Dunford (1999) menemukan bahwa dua per tiga debitur kredit CRECER dengan program edukasi di Bolivia telah dapat menikmati kenaikan pendapatan setelah mengikuti program itu. Studi lainnya oleh Remenyi & Quinones Jr (2000) di Indonesia menemukan bahwa bagi masyarakat yang mengikuti program mikrofinance mengalami peningkatan pendapatan sebanyak 12,9% dibanding peningkatan 3% yang tidak ikut. Kandker (1998) meneliti pengaruh dari BRAC, Grameen Bank dan RD-12, tiga mikrofinance di Bangladesh, menemukan bahwa 5% dari peserta dapat membebaskan keluarganya dari garis kemiskinan setiap tahunnya dengan meminjam kredit dari salah satu tiga program kredit mikro.⁴⁶ Studi lainnya pada debitur (peminjam) *Bank Rakyat Indonesia* di pulau Lombok Indonesia menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat 112% dan 90% dari rumah tangga peminjam telah keluar dari garis kemiskinan.⁴⁷

Profesor Muhammad Yusuf yang mengajar ekonomi di Universitas Chittagong, Banglades, mendirikan Grameen Bank atau bank desa untuk memberikan modal bagi penduduk miskin untuk berusaha sehingga mereka keluar dari garis kemiskinan. Saat ini grameen bank bekerja di lebih dari 46.000 desa di Banglades, melalui 1.267 cabangnya, dengan lebih dari 12.000 pegawai, meminjamkan lebih dari US\$4,5 milyar, dalam bentuk pinjaman berkisar antara 12 sampai dengan 15 dollar.⁴⁸ Untuk keberhasilannya membawa penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan Muhammad Yusuf mendapatkan hadiah nobel.

⁴⁴ DFID., *Op Cit*, 2004, p.17

⁴⁵ *Ibid*, p.18

⁴⁶ *Ibid*, p.19

⁴⁷ Panjaitan-Drioadisuryo, D.M. Rositan, and Kathleen Cound, *Gender, Self-Employment, and Mikrofinance Program: An Indonesian Case Study*, Quarterly Review of Economic and Finance 39, 1999.

⁴⁸ Covey, Stephen R, *The 8th Habit, Melampaui Efektivitas Menggapai Keagungan*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 16.

Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa peran suatu bank sentral adalah menjaga inflasi pada kondisi yang relatif stabil, dan memberikan kenyamanan bagi perekonomian untuk tumbuh dan selanjutnya mengurangi pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh bank sentral selama ini juga, sebagaimana kebijakan fiskal, dapat ditujukan untuk mengurangi laju inflasi pada level tertentu, selanjut memantik pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja tanpa mengakibatkan penurunan output agregat dan peningkatan pengangguran. Menurut Milton Friedman, fenomena inflasi yang berada pada tingkat yang tinggi sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan uang beredar pada tingkat yang tinggi pula. *“Whenever a country’s inflation rate is extremely high for a sustained period of time, its rate of money supply growth is also extremely high.”* Untuk menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang relatif rendah adalah dengan menurunkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar.⁴⁹

Berkaitan dengan peran bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneternya dalam mengendalikan inflasi, beberapa ahli ekonomi mensyaratkan bank sentral harus mempunyai *kredibilitas* tinggi, sehingga tujuan dari penerapan kebijakan anti-inflasinya menghasilkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Bank Sentral Amerika Serikat pada priode kepemimpinan Paul Volker pada tahun 1980-an memberikan komitmen bahwa bank sentral cukup kredibel untuk menjaga inflasi. Salah satu indikasi kredibilitas volker adalah walaupun tingkat pertumbuhan uang beredar meningkat namun tingkat inflasi masih terjaga dibawah 5%, dan tingkat pengangguran tidak terlalu bergejolak.⁵⁰

Selain itu terdapat pula ekonom, Robert Lucas dan Thomas Sargent, yang memberikan sumbangan terhadap dampak dari suatu kebijakan dengan memasukkan unsur ekspektasi dari masyarakat. Mereka menyarankan bagaimana suatu kebijakan dijalankan, yang juga dikenal dengan *rational expectaions revolution*. Diawali dengan Kritik Lucas (*Lukas Critique*), yang menyatakan bahwa model ekonometrik konvensional bukan hanya tidak dapat digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan, tetapi juga perubahan perilaku sebagai akibat

⁴⁹ Mishkin, Frederic S., *Op Cit*, p 613

⁵⁰ Mishkin, Frederic S., *Op Cit*, p 634-635

ekspektasi publik akan mempengaruhi respon terhadap kebijakan yang diambil. Jika publik mengantisipasi suatu kebijakan maka kebijakan yang ditempuh menjadi tidak efektif. *Rational expectation* juga menekankan penting kredibilitas dari pembuat kebijakan anti inflasi agar dapat kebijakan yang ditempuh efektif.⁵¹

Khusus terkait dengan keberadaan lembaga keuangan mikro kaitannya dengan pengurangan penduduk miskin, seorang ahli antropologi bernama Dr Maguerite S Robinson terjun ke dalam bidang keuangan mikro, yang menghabiskan banyak tahun di desa desa India, Indonesia, dan Sri Langka, berpendapat bahwa pemberian kredit non subsidi kepada masyarakat pedesaan yang mempunyai usaha produktif secara nyata dapat menyediakan lapangan kerja pada masyarakat miskin. Lembaga keuangan dalam skala kecil menjadi pintu masuk mereka kedalam sistem perbankan sesungguhnya. Diyakininya bahwa penyediaan keuangan mikro seperti yang diresepkannya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan pendirian BRI Unit – menguntungkan secara luas – telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 11 persen pada tahun 1996. Pada tahun 1997, ketika krisis Asia Timur mulai terjadi dan kemiskinan di Indonesia mulai meningkat, sistem keuangan mikro BRI telah membantu masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan, untuk memulai usaha sektor Non Formal. Sistem tersebut juga menyediakan bagi mereka, fasilitas tabungan yang aman dan nyaman terutama bagi masyarakat miskin di masa-masa krisis.⁵² Dari penjelasan Robinson dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro membantu penduduk miskin dari dua cara yakni dari sisi kebutuhan akan kredit dan sisi tempat penyimpanan uang yang handal.

Senada dengan Robinson, penelitian yang dilakukan oleh GTZ-Profi di Indonesia menyatakan bahwa peranan lembaga keuangan mikro bukan saja lembaga keuangan formal (legal) seperti BRI Unit, tetapi juga lembaga keuangan informal⁵³ turut serta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan di pedesaan.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, Chapter 25, p 639-658

⁵² Robinson, Marguerite S., *Op Cit*, 2001, hlm xxl

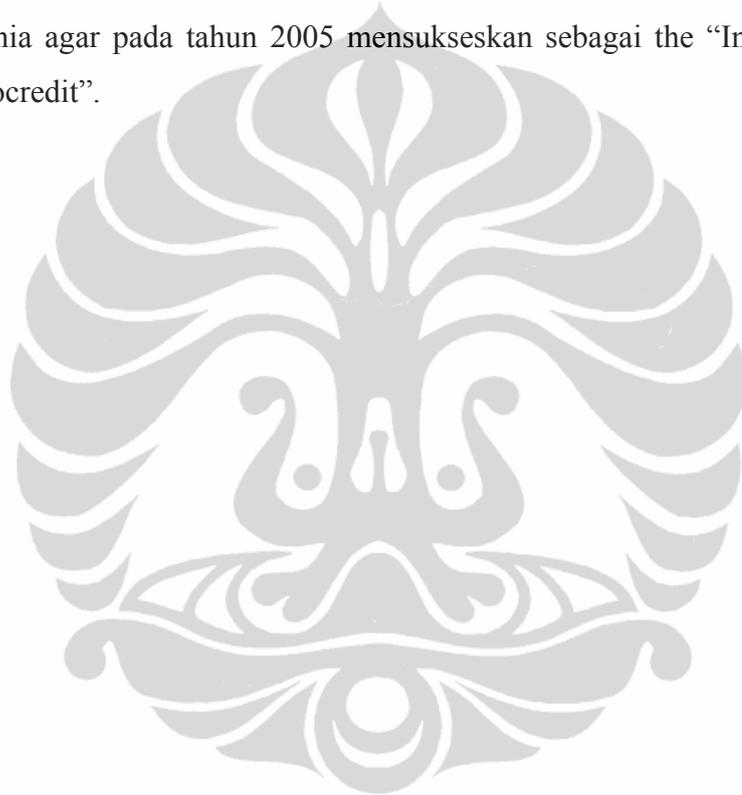
⁵³ Sampai dengan 1982 Bank Indonesia menggunakan istilah **Bank Sekunder** untuk menggambarkan Bank Pasar, BK, BKK, KURK, Pith Nagari dan lembaga sejenis.

⁵⁴ Hamp, Michael *Pleading for Sustainable Mikrofinance on Both Sides of the Globe; Nasional Strategies of Mikrofinance Development: Good Practices in Germany, India, Malaysia, and Philippines*, ProFI-GTZ.

Kofi Annan, UN Secretary-General, dalam pernyataan yang fenomenal tentang peran kredit mikro menyebutkan,⁵⁵

“How can US \$ 100 change an economy? // One small loan can change a family, but several can strengthen a community, and thousands could transform an entire economy. // (UN Secretary-General Kofi Annan)”

Menyadari besarnya peran kredit mikro, Kofi Anan mengajak bangsa-bangsa di dunia agar pada tahun 2005 mensukseskan sebagai the “International Year of Microcredit”.



⁵⁵ Ibid p.1-2

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Rentang waktu penelitian adalah sejak tahun 1970an sampai dengan 2009. Penelitian terutama dikonsentrasikan pada setelah tahun 1983, pertimbangannya adalah Bank Indonesia selaku Otoritas perbankan melakukan liberalisasi perbankan sejak 1983. Sebelum tahun 1983 perbankan dipandang relatif belum berkembang.⁵⁶

Kemajuan sektor keuangan dapat dilihat kemajuan sistem keuangan, yang terdiri dari sistem moneter dan non moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter dan perbankan. Sementara sistem non moneter terdiri dari perusahaan pembiayaan dan perusahaan keuangan lainnya. Perusahaan pembiayaan paling tidak terdiri dari perusahaan modal ventura, *leasing*, anjak piutang (*factoring*), kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Sedangkan perusahaan keuangan lainnya paling tidak terdiri dari perusahaan asuransi, sekuritas, peminjaman, gadai, dan pialang pasar uang.

Mengingat peran sektor perbankan masih sangat dominan (79%) di Indonesia, maka sesungguhnya dalam konteks Indonesia, membicarakan kemajuan sektor perbankan sama halnya membicarakan kemajuan sektor keuangan.

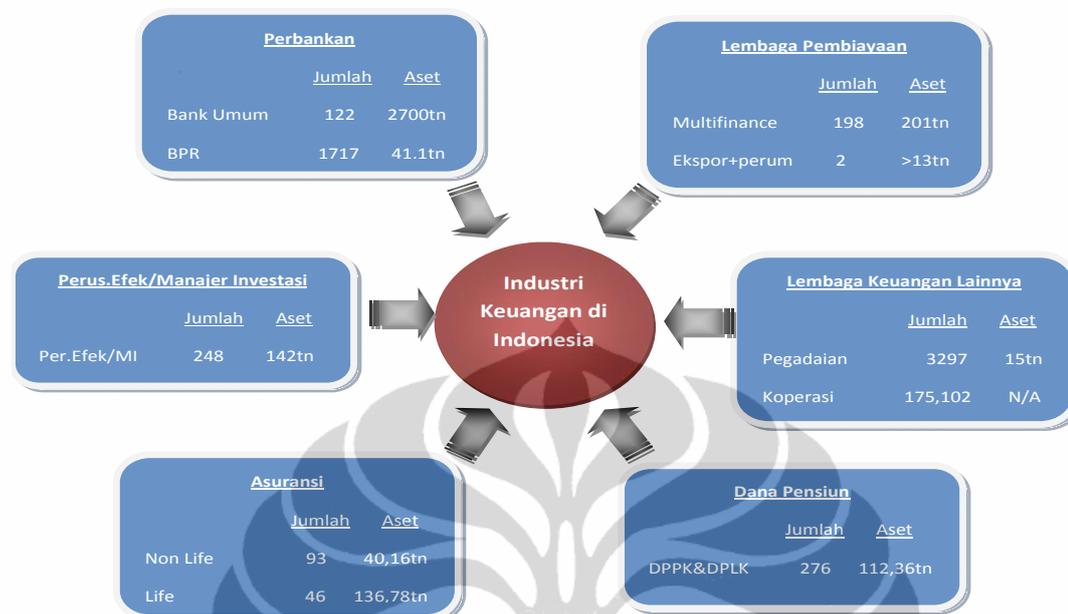


Sumber : Umar et al., 2010

Gambar 3.1

⁵⁶ Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia periode IV: 1983-1997, Bank Indonesia Pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*. 2006, UKMBI

Industri Keuangan di Indonesia



Sumber: Rofikoh Rokhim (2010)

Gambar 3.2

Untuk memantau kondisi sektor keuangan Bank Indonesia mengembangkan Financial Stability Index (FSI). FSI dilakukan untuk mengukur kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan, mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan. FSI dibentuk dari index individual 3 sektor di sistem keuangan Indonesia: Perbankan (NPL), *stock market* (IHSG) dan *bond market* (yield Govt bond RBON), di mana masing-masing sektor tersebut diberi bobot 0.8, 0.1 dan 0.1:⁵⁷

$$FSI_t = \left(0.8 \frac{|NPL_t - \overline{NPL}|}{\hat{\sigma}_{a,b}^{NPL}} \right) + \left(0.1 \frac{|IHSG_t - \overline{IHSG}|}{\hat{\sigma}_{a,b}^{IHSG}} \right) + \left(0.1 \frac{|RBON_t - \overline{RBON}|}{\hat{\sigma}_{a,b}^{RBON}} \right)$$

Dengan demikian sepertinya halnya Umar et al, Bank Indonesia selaku otoritas moneter memandang pentingnya posisi sektor perbankan dalam sistem keuangan Indonesia.

⁵⁷ Agusman, *Bank Indonesia dan Fungsi Macroprudential*, Denpasar, November 2010.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Indikator/ukuran (batas/garis) kemiskinan yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah mengacu pada definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), yakni adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan penduduk Indonesia untuk kebutuhan makan untuk 2100 kalori ditambah dengan pengeluaran untuk membeli kebutuhan penting lainnya yang bukan makanan seperti untuk perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Selanjutnya berdasarkan garis kemiskinan tersebut ditentukan prosentase penduduk miskin.

Untuk menggambarkan penduduk miskin Indonesia digunakan variabel jumlah penduduk miskin Indonesia menurut kriteria BPS, dan atau prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (*head count index*).⁵⁹

Khusus data perbankan meliputi Dana Pihak Ketiga, Kredit, serta Jumlah Uang Beredar dalam bentuk M1 dan M2, adalah berasal dari data yang dihimpun oleh Bank Indonesia dari bank komersial yang beroperasi di Indonesia selama kurun waktu penelitian.

Seperti yang telah disebutkan pada Bab I, Indikator kemajuan keuangan diwakili dari beberapa variabel yang menggambarkan *financial widening* dan *financial deepening*;

- a. M1/GDP dan M2/GDP, variabel ini mengukur *financial deepening* yang merupakan tingkat penggunaan uang dalam masyarakat atau jumlah uang beredar dalam perekonomian.⁶¹
- b. Total Kredit yang disalurkan oleh Bank Umum, pertumbuhannya. Variabel bebas ini mengukur seberapa luas penggunaan layanan perbankan (keuangan) oleh masyarakat (*financial widening*). Selain itu juga digunakan Kredit Usaha Kecil (KUK) variabel ini dapat memberikan gambaran tingkat permintaan kredit dari masyarakat, khususnya masyarakat dengan usaha kecil.
- c. Kredit/GDP, adalah kredit terhadap GDP.⁶²

⁵⁹ Diadopsi spesifikasi model dari Dollar dan Kraay, yang pada modelnya menggunakan pendapatan penduduk 20% terendah dan atau prosentase penduduk yang hidup dibawah 1 dollar amerika.

⁶¹ Variabel ini digunakan oleh S.Guillaumont and K.Kpodar (2005) dalam *financial Development, Financial Instability and Poverty*, juga digunakan oleh R.Levine N.Loayza and T Beck (2000), yang merupakan rasio aset likuid dalam sistem keuangan terhadap GDP (M2/GDP).

⁶² Ibid

Sementara informasi mengenai instabilitas pada M1 dan M2 serta politik adalah dengan mengamati pergerakan trend masing-masing data, yang terjadi pada periode 1997 sampai dengan 2000.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah rencana variabel-variabel yang akan diamati:

| No | Jenis Data | Sumber |
|----|---|------------|
| 1 | Penduduk miskin menurut kriteria Biro Pusat Statistik | BPS |
| 2 | GDP | BPS dan BI |
| 3 | GDP/Capita | BPS dan BI |
| 4 | Prosentasi penduduk miskin menurut kriteria BPS (<i>head count index</i>) | BPS |
| 5 | M2/GDP | BPS dan BI |
| 6 | Instabilitas dari M2/GDP | BPS dan BI |
| 7 | M1/GDP | BPS dan BI |
| 8 | Instabilitas dari M1/GDP | BPS dan BI |
| 9 | Kredit/GDP | BPS dan BI |
| 10 | Instabilitas dari Kredit/GDP | BPS dan BI |
| 11 | Pertumbuhan Kredit dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga | BI |
| 12 | Tingkat Inflasi | BPS |
| 13 | Kredit Uaha Kecil (KUK) | BI |
| 14 | GDP/Kapita growth | BPS |
| 15 | DPK/GDP | BPS dan BI |
| 16 | Konsumsi pemerintah/GDP | BPS |
| 17 | Instabilitas politik | BI |
| 18 | Tingkat Pengangguran Terbuka | BPS |

3.3. Metoda Analisis Data

3.3.1. Bentuk Fungsional dalam model regresi^{63, 64 dan 65}

Untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas akan digunakan pemodelan regresi linear majemuk dengan mengharapkan residual model tersebut tetap terkecil, atau metode kuadrat terkecil (*Ordinary least square/OLS*). Dalam model OLS, sesuai dengan teorema Gauss-Markov, estimator yang baik adalah mempunyai sifat BLUE (*best linier unbiased estimator*) yang memiliki sifat-sifat;

1. Estimator $\hat{\beta}_1$ bersifat linier terhadap variabel dependen

⁶³ Nachhrowi, Djalal dan Hadius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, LP FE UI, Jakarta, 2006, hlm 65-67

⁶⁴ Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi ke Dua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, Maret 2009, hlm 4.1- 4.4

⁶⁵ Gujarati, Damodar N, *Basic Econometrics*, 2003, McGraw-Hill, 4th Ed., P. 175-177

2. Estimator $\hat{\beta}_1$ bersifat tidak bias, berarti nilai rata atau β_1 yang diharapkan atau $E(\hat{\beta}_1)$ sama dengan nilai β_1 yang sesungguhnya.
3. Estimator $\hat{\beta}_1$ mempunyai varian yang minimum, sehingga disebut efisien.

Model Double Log. Untuk memudahkan analisis dari model yang tidak linier menjadi model linier. Salah satu model tersebut adalah **Model Double Log** atau **Model Elastisitas Konstan**. Model log-log ini terbentuk melalui transformasi logaritma dari model tidak linier sehingga didapat model yang linier. Dalam model double log sederhana dapat dituliskan, $\ln Y = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \mu$. Salah satu keunggulan dari model double log adalah koefisien slope β_2 dalam model yang merupakan elastisitas Y terhadap X_1 , atau dengan kata lain koefisien slope merupakan tingkat perubahan Y (dalam persen) bila terjadi perubahan variabel X_1 (dalam persen) dengan asumsi *ceteris paribus* (X_2 dianggap konstan). Hal lain yang dapat diperhatikan dalam model log-log adalah elastisitas antara Y dan X selalu konstan, artinya bila $\ln X$ berubah 1 unit, perubahan $\ln Y$ akan selalu sama meskipun elastisitas tersebut diukur pada $\ln X$ yang mana saja. Oleh karena itu, model ini disebut juga **model Elastisitas Konstan** (*Constant Elasticity Model*).

Walaupun model double log banyak keunggulan bukan berarti tidak mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan dari model log-log tidak dapat dibentuk dari data yang mempunyai data nol atau minus. Kerena ketika dilakukan transformasi ke bentuk logaritma, maka nilai nol atau nilai minus menjadi tak terhingga.

Model Semi Log. Sebagaimana model log-log, model semi log juga mentransformasi logaritma model yang tidak linier, namun demikian, jika pada model double log dilakukan transformasi baik pada variabel bebas maupun terikat, pada model semi log hanya di bagian variabel bebas dan atau variabel terikatnya saja. Misalnya terdapat model semi log, atau *model log-lin*⁶⁶, $\ln Y = \beta_1 + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \mu$ berarti koefisien *slope* β_2 harus diinterpretasi berbeda dengan model double log, karena jika dituliskan;

⁶⁶ **Model Log-Lin** = model yang ditransformasi **Log** pada variabel terikatnya, namun **Linier** pada variabel bebasnya. Selain itu dimungkinkan pula bentuk **Model Lin-Log**, yakni linier pada variabel terikat, namun log pada variabel bebas.

$$\beta_2 = \frac{\text{perubahan relatif dalam } Y}{\text{perubahan absolut dalam } X_1}$$

interpretasi β_2 adalah rasio perubahan relatif pada variabel Y sebagai akibat perubahan absolut variabel X_1 (*ceteris paribus*).

Berikut ini bentuk persamaan matematika untuk kemiskinan adalah;

$$Pv_t = \alpha_0 + \alpha_1 (GDPR_t) + \alpha_2 (Fd_t) + \alpha_3 (Fi_t) + \alpha_4 (Inf_t) + \alpha_5 (Unemploy_t) \dots\dots\dots(1)$$

$$Pv_t = \alpha_0 + \alpha_1 (Gov_t) + \alpha_2 (Fd_t) + \alpha_3 (Fi_t) + \alpha_4 (Inf_t) + \alpha_5 (Unemploy_t) \dots\dots\dots(2)$$

Selanjut persamaan untuk Modeling adalah⁶⁷:

$$Pv_t = \alpha_0 + \alpha_1 (GDPR_t) + \alpha_2 (Fdt) + \alpha_3 (Fi_t) + \alpha_4 (Inf_t) + \alpha_5 (Unemploy_t) + e_t \dots\dots\dots (3)$$

$$Pv_t = \alpha_0 + \alpha_1 (Gov_t) + \alpha_2 (Fdt) + \alpha_3 (Fi_t) + \alpha_4 (Inf_t) + \alpha_5 (Unemploy_t) + e_t \dots\dots\dots (4)$$

Di mana;

Pv = adalah indikator kemiskinan; $GDPR$ = Gross Domestik Product Real tahun dasar 2000; Gov = Belanja Negara; Fd = level perkembangan sektor perbankan (keuangan); Fi = menunjukkan dummy instabilitas ekonomi dan politik; Inf = tingkat inflasi; $Unemploy$ = tingkat pengangguran terbuka; t = periode t ; e = error term.

3.3.2. Pelepasan Asumsi Klasik (*Relaxing The Assumption Of Classical Model*)⁶⁸

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa model yang baik agar dapat menjadi alat prediksi yang baik sebaiknya memenuhi beberapa asumsi. Namun sering dijumpai hasil perhitungan berhadapan dengan masalah seperti multikolinieritas (*multicollinierity*), heteroskedasitas (*heteroscedasity*), dan autokorelasi (*autocorrelation*).

Multicolineritas. Dengan penggunaan beberapa variabel bebas dalam penelitian ini mengakibatkan berpeluang variabel bebas tersebut saling berkorelasi (terjadi hubungan linier antar variabel bebas), atau dikenal dengan adanya *mutikolieritas (multikol)* diantara variabel bebas. Bila hal ini terjadi, maka akan

⁶⁷ Modelling yang digunakan oleh Syviane Guillaumont Jeanneney dan Kangni Kpodar (2005).

⁶⁸ Ibid

mengganggu ketepatan model yang dibuat. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikol;

1. Nilai R^2 tinggi, tetapi variabel independent banyak yang tidak signifikan.
2. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisiennya rendah, maka terdapat multikol.
3. Dengan melakukan regresi *auxiliary*.

Pengaruh multikol akan menyebabkan; (a) estimator masih bersifat BLUE, tetapi varian dan kovarian yang besar, sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi, (b) interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistik uji t akan kecil, sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen.

Ada beberapa alternatif untuk menghadapi Multikolinieritas, alternatif tersebut adalah;

1. Biarkan saja model kita mengandung multicol, kerana estimator masih bersifat BLUE. Sifat BLUE tidak terpengaruh oleh ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Namun harus diketahui bahwa multikol akan menyebabkan *standard error* yang besar.
2. Tambahkan data jika memungkinkan, karena multikol muncul karena jumlah observasinya sedikit. Tapi apabila data tidak dapat ditambah, teruskan dengan model yang sekarang digunakan.
3. Hilangkan salah satu variabel independen, terutama yang memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lainnya. Namun bila menurut teori variabel independen tidak mungkin dihilangkan, berarti harus tetap dipakai.
4. Transformasi salah satu (atau beberapa) variabel, seperti dengan melakukan *deferensi*, atau membuat *rasio*, atau *transformasi lainnya*.

Heteroskedastisitas (heteros). Terjadinya heteros bila varian tidak konstan atau berubah-ubah. Dampak dari heteros adalah; (a). Estimator metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum (tidak lagi *best*), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (*linier unbiased estimator*). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linier dan tidak bias. (b). Perhitungan standar error tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena varian tidak minimum.

Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien. (c). Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan F tidak dapat dipercaya, karena standar error-nya tidak dapat dipercaya.

Jika dijumpai heteros dalam penelitian ini akan dihilangkan dengan menggunakan metode *White* atau metode dengan varian heteroskedasitas terkoreksi (*heteroscedasticity-corrected variances*). Sehubungan dalam penelitian terdiri lebih dari dua variabel bebas maka akan pendeteksian dengan menggunakan program *evIEWS* akan menggunakan pilihan *no cross term*. Metode ini menggunakan residual kuadrat e_i^2 sebagai proksi dari σ_i^2 yang tidak diketahui, sehingga varian estimator β_i dapat dihitung dengan;

$$\text{Var}(\hat{\beta}_i) = \frac{\sum x_i^2 e_i^2}{(\sum x_i^2)^2}$$

Program jadi *EvIEWS* telah menyediakan fasilitas metode *White* dan *Newey-West HAC Standard Errors & Covariance*. Selain itu salah satu cara untuk menghilang heteroskedasitas akan dilakukan transformasi dengan logaritma.

Autokorelasi (*Outocorrelation*). Permasalahan yang kerap dijumpai dalam analisis regresi adalah masalah autokorelasi. Secara sederhana autokorelasi adalah keterkaitan antara observasi dalam satu variabel, yang memang sifatnya data yang ada saat ini dipengaruhi oleh data sebelumnya. Menurut Gujarati (2003), beberapa penyebab terjadinya autokorelasi adalah;

- a. Data mengandung pergerakan naik turun, misalnya kondisi perekonomian suatu negara yang kadang menaik dan kadang menurun.
- b. Kekeliruan menipulasi datam misalnya data tahunan dijadikan data kuartalan dengan membagi empat.
- c. Data runtut waktu, yang meskipun bila dianalisis dengan model $y_t = a + bxt + e_t$, karena datanya bersifat runtut, maka berlaku juga $y_{t-1} = a + bxt-1 + e_{t-1}$. Dengan demikian terjadi hubungan antara sekarang dan data periode sebelumnya.
- d. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner.

Apabila terjadi autokorelasi, maka estimator yang didapatkan memiliki karakteristik;

- Estimator metode kuadrat terkecil masih linier.
- Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias.
- Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*).

Dengan demikian seperti juga pada heteroskedasitas, autokorelasi juga menyebabkan estimator hanya bersifat LUE, tidak lagi BLUE. Untuk mendeteksi masalah outokorelasi dengan uji Durbin-Watson dan Breush-Godfrey.

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya Autokorelasi adalah dengan;

- Uji Durbin-Watson (DW)
- Uji Breush-Godfrey

Uji DW merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Program E-views sudah menyediakan penghitungan uji DW untuk menghitung nilai d (yang menggambarkan koefisien DW). Nilai d akan berada di kisaran 0 hingga 4.

| Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi positif | Tidak dapat diputuskan | Tidak menolak H_0 , berarti tidak ada autokorelasi | Tidak dapat diputuskan | Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi negatif | | |
|--|------------------------|--|------------------------|--|-----------|---|
| 0 | d_l | d_u | 2 | $4 - d_u$ | $4 - d_l$ | 4 |

Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (d_l) dan batas atas (d_u). Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW, dengan aturan sebagai berikut;

- Bila $DW < d_l$; berarti ada korelasi yang positif
- Bila $d_l \leq DW \leq d_u$; kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa
- Bila $d_u < DW < 4 - d_u$; berarti tidak ada autokorelasi negatif maupun positif
- Bila $4 - d_u \leq DW \leq 4 - d_l$; kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa
- Bila $DW > 4 - d_l$; berarti adak korelasi negatif

Ada kelemahan dari uji DW yakni jika koefisien dw berada di daerah kelabu, karena tidak dapat diputuskan apakah ada autokorelasi apa tidak.

Mengatasi kelemahan uji DW tersebut muncul Uji Bruesh-Godfrey atau uji BG ini adalah uji Lagrange-Multiplier (pengganda lagrange) juga disediakan oleh program E-Views.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, harus diketahui terlebih dahulu besarnya koefisien autokorelasi, ρ .

Setelah diketahui nilai ρ , maka dapat ditentukan cara menghilangkannya dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Bila struktur autokorelasi (ρ) diketahui: menambahkan (AR)1 sebagai variabel bebas yang bersama-sama dengan variabel bebas lainnya akan diregresi terhadap variabel terikat.

Koefisien AR(1) adalah nilai ρ . Dengan demikian jika kita memiliki persamaan;

$$Pv_t = \alpha_0 + \alpha_1(Gov_t) + \alpha_2(Fdt) + \alpha_3(Fi_t) + \alpha_4(Inf_t) + \alpha_5(Unemploy_t) + e_t \dots (2).$$

maka memasukan variabel AR(1), maka modelnya adalah;

$$Pv_t - \rho Pv_{t-1} = (\alpha_0 - \rho \alpha_0) + \alpha_1(Gov_t - \rho Gov_{t-1}) + \alpha_2(Fd_t - \rho Fd_{t-1}) + \alpha_3(Fi_t - \rho Fi_{t-1}) + \alpha_4(Inf_t - \rho Inf_{t-1}) + \alpha_5(Unemploy_t - \rho Unemploy_{t-1}) + (e_t - \rho e_{t-1}) \dots (2a)$$

- b. Bila struktur autokorelasi (ρ) tidak diketahui;
- Bila ρ tinggi: Metode Diferensi tingkat pertama
 - Bila ρ rendah: Metode OLS
 - Bila ρ rendah: Metode Cochrane-Orcutt

3.3.3. Memilih model yang paling baik.

- Menguji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Jika telah diperoleh hasil regresi majemuk, perlu dilakukan pemeriksaan *goodness of fit* nya dengan memeriksa koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R^2 yang telah disesuaikan (*adjusted R square*). Misal dari hasil perhitungan regresi majemuk diperoleh $adjusted R^2 = 0,85$, artinya set variabel

bebas dapat menjelaskan sebanyak 85 persen, sementara 15 persen lain dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Jika dihadapkan dengan beberapa model, maka model dengan *adjusted R2* yang paling tinggi adalah yang paling baik. Dalam banyak kesempatan regresi yang menggunakan data secara runtut waktu (*time series*) menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi dibandingkan regresi yang menggunakan data seksi silang (*cross section*), sehingga nilai R^2 yang tinggi tidak menjamin baiknya model yang dihasilkan.

- AIC (*Aikaike Information Criterion*) dan SIC (*Scharz Information Criterion*)

Selain dengan menggunakan *Adjusted R²* untuk memilih model yang baik adalah dengan menggunakan AIC dan SIC yang formulasinya sbb;

$$\begin{aligned} \text{AIC} &= \ln \text{AIC} = \left[\frac{2k}{n} \right] + \ln \left[\frac{\text{RSS}}{n} \right] \\ \text{SIC} &= \ln \text{SIC} = \left[\frac{k}{n} \right] \ln n + \ln \left[\frac{\text{RSS}}{n} \right] \end{aligned}$$

Bila kita membandingkan beberapa model regresi, maka model yang memiliki AIC dan SIC terkecil adalah model yang terbaik.

3.3.4. Analisis Tabel dan Grafik.

Selain dengan itu juga digunakan analisis grafik/trend dan tabel.

3.4. Tools dan Software

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan software E-Views versi 6 sehingga dihasilkan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

BAB 4

PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Dalam bab berikut ini akan diuraikan kondisi kemajuan sektor keuangan (*financial*) baik dari sisi perbankan, non perbankan maupun dari sisi pasar bursa saham di Indonesia lalu dilanjutkan dengan perkembangan kinerja perbankan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009, berikut beberapa peristiwa ekonomi yang menyertainya. Selain itu beberapa kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, d.h.i Bank Indonesia, sepintas akan disertakan saat membahas perkembangan perbankan. Khusus pada saat periode krisis ekonomi yakni tahun 1997/1998 dan 2008/2009 akan dijelaskan sedikit lebih mendalam.

4.1. Perkembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Di Indonesia

“How can US \$ 100 change an economy? // One small loan can change a family, but several can strengthen a community, and thousands could transform an entire economy. // (UN Secretary-General Kofi Annan)”

Jika mengaitkan perkembangan sektor keuangan kaitan dengan kemiskinan selanyak diberikan tempat untuk membahas pasang surutnya lembaga keuangan mikro Indonesia. Lembaga keuangan mikro sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia adalah sub-sektor keuangan yang cukup penting dalam perekonomian, yang secara nyata telah membantu rencana pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa keuangan mikro membantu mengurangi kerawanan sosial, meningkatkan aktivitas dan kapasitas bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lembaga keuangan mikro merupakan pintu masuk awal bagi pengusaha mikro, sebelum mereka menjadi kecil dan menengah, lalu ke layanan lembaga keuangan formal. Sektor usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) adalah sektor di mana 98% tenaga kerja mencari pekerjaan (sensus 1996).

Kebutuhan masyarakat pedesaan cukup banyak; menurut Eric Wolf kebutuhan itu adalah; (1), *replacement fund*, dana untuk menggantikan peralatan

produksi dan konsumsi, (2), *ceremonial fund*, dana untuk membiayai kegiatan sosial, (3), *funds of rent*, dana untuk sewa tanah (bagi yang tidak memiliki tanah). Lembaga keuangan mikro Indonesia sudah dimulai sejak abad ke sembilan belas. Saat itu terjadi kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia terutama yang ada di daerah pedesaan di pulau Jawa dan Madura, karena itu kebutuhan akan kredit makin meningkat. Untuk mendapatkan kredit dikala itu hanyalah dari para pelepas uang (*rentenir*) dengan bunga antara 100 sampai dengan 200% pertahun. Karena keadaan demikian timbulah gerakan-gerakan yang menghendaki hadirnya lembaga perkreditan untuk penduduk Indonesia dengan bunga ringan guna menahan kemerosotan lebih lanjut pada kesejahteraan para petani, serta meningkatkan daya tahan terhadap bencana atau kesulitan yang dihadapi.

Sejarah kehadiran Lembaga keuangan Perdesaan.⁶⁹ Gagasan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) di Indonesia tersebut timbul atas prakarsa perorangan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda.^{70 71} Beberapa orang Belanda yang mendorong pendirian LPR adalah F.Fokkens (1894), De Wolff Van Westerrode (1897), Cremer (1900), Mr.C.Th.Van Deventer (1904) dan orang-orang Belanda lainnya. Tetapi kebetulan pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang pertama adalah orang Indonesia yaitu R.Bei Aria Wirjaatmadja Patih di Purwokerto yang dalam tahun 1895 mendirikan "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan Bangsa Indonesia) yang memberikan pinjaman kepada pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang dan petani, dengan tujuan membebaskan mereka dari jeratan *rentenir* dan pengijon.

Pada tahun 1897, W.P.D.De wolff Van Westerrode diangkat menjadi asisten Residen di Purwokerto, ia mengadakan perbaikan dan reorganisasi terhadap bank bantuan dan tabungan tersebut di atas dan menjadikan bank itu Bank Tabungan, Bantuan dan Kredit Pertanian. Pendirian bank di Purwokerto tersebut diikuti pula oleh bank-bank yang serupa di berbagai daerah, yang

⁶⁹ Diringkas dari buku "*Lembaga dana dan kredit pedesaan*" terbitan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ringkasan Seminar, 1987, disuting oleh Anwar Hafid, Jusuf M. Colter, dan Pandu Suharto.

⁷⁰ Loekman Soetrisno seorang peneliti pada Pusat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM pada tahun 1987, berpendapat bahwa pendirian LPR di Indonesia didorong rasa "penyesalan" dan keinginan membalas budi kepada petani Indonesia yang telah lama mereka eksploitasi.

⁷¹ Staatsblad Tahun 1929 No.357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.

kemudian disebut Bank Kredit Rakyat (BKR) atau Bank Rakyat. Bank-bank tersebut merupakan lembaga-lembaga kedermawanan (*filantropische instellingen*).

Sejak tahun 1898 didirikan pula lembaga perkreditan di daerah pedesaan yang memberikan pinjamannya dalam bentuk natura, yaitu padi secara besar-besaran. Lembaga tersebut adalah Lumbung Desa yang menolong petani yang tidak mempunyai bibit atau mengalami kekurangan padi untuk konsumsi pada masa paceklik. Karena peredaran uang makin meresap ke dalam masyarakat pedesaan, maka didirikan pula Bank Desa sejak tahun 1904. Lembaga perkreditan tersebut dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD) dan semula dicita-citakan dapat diselenggarakan secara koperasi, juga tidak dapat dijadikan koperasi.

Pada saat itu terdapat anggapan bahwa di pulau Jawa mudah untuk mendirikan koperasi-koperasi kredit, ternyata dalam kenyataannya tidaklah mudah. Di desa-desa belum ada ahli-ahli keuangan yang diperlukan untuk menjalankan koperasi, selain itu dukungan dana yang berasal dari tabungan masyarakat tidak dapat dihimpun karena mereka tidak biasa menabung uang.

Pada tahun 1934 Bank-bank Rakyat digabung dalam “*Algemeene Volkscredietbank* (AVB), dengan demikian berakhirilah peranannya, tetapi pendirian AVB tetap bertujuan mensejahterakan rakyat. Setelah kemerdekaan *Volkscredietbank* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dijadikan bank umum kemudian juga bank devisa untuk melayani golongan menengah bangsa Indonesia, tanpa menyinggah kredit kecil kepada masyarakat pedesaan.

Selain BKR juga muncul pula bank-bank pasar dan bank-bank desa dalam bentuknya yang baru. Masih ada lagi lembaga-lembaga perkreditan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan⁷², Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Bank Karya Produksi Desa dan di Jawa Barat, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat, Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Bantuan Dukuhan di Daerah Istimewa Jogyakarta. Juga organisasi perekonomian rakyat berupa berbagai jenis koperasi turut menyelenggarakan perkreditan kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan banyaknya lembaga tersebut

⁷² Peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alam (Rijksblaad dari daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9).

masing-masing berjalan sendiri-sendiri sehingga mengarah kepada persaingan tidak sehat. LPR yang ada diberbagai daerah tersebut umumnya bertindak sebagai penyalur dana dari Pemerintah Daerah. Untuk pendanaannya utamanya mereka memperoleh dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), di mana sekaligus jadi pembina dan pengawasnya.

Lembaga keuangan mikro ini, BKR, BKK, KURK, Lumbung Pitih Nagari, LPD, Bank Pasar, dan lembaga keuangan sejenis, sampai dengan tahun 1974, disebut oleh Bank Indonesia sebagai *Bank Sekunder*. Dalam perkembangannya bagi Bank Sekunder dengan *policy* dari Bank Indonesia diawasi dan dibina oleh BRI sejak September 1977, namun untuk penetapan ketentuan umum masih dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan BRI terhadap bank-bank tersebut mencakup, antara lain bidang keuangan, kepemilikan, pengurusan, dan tata kerja dilakukan atas dasar petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia. Istilah yang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru resmi digunakan oleh BI pada tahun 1982 menggantikan istilah Bank Sekunder. Dalam rangka mendorong perkembangan BPR, Bank Indonesia pernah memberikan kredit tidak langsung bagi BPR melalui BRI (16 November 1982), dengan syarat bahwa BPR tersebut memberikan kredit kepada pengusaha pribumi sekurang-kurangnya 60% dan kredit macet tidak melebihi 15%.⁷³

Tabel 4.1⁷⁴
Jumlah Bank Sekunder
1966-1969

| Jenis Bank Sekunder | Akhir Tahun | | | |
|---------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| Bank Desa | 4.023 | 3.917 | 4.782 | 5.091 |
| Lumbung Desa | 2691 | 2.854 | 3.311 | 3.317 |
| Bank Pasar | 8 | 8 | 79 | 166 |
| Bank Koperasi | - | - | 94 | 95 |
| Lain-lain | - | - | - | - |
| Jumlah | 6.722 | 6.779 | 8.266 | 8.669 |

Sumber: BNI Unit 1, Laporan Tahun Pembukuan 1966-1967 dan 1968 serta Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan 1969-1970

⁷³ Djiwandono, J., Soedradjad dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode III: 1966-1983*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006, hlm 333-334.

⁷⁴ Ibid, hlm 300.

Terkait dengan kebiasaan menabung penduduk di pedesaan, Selo Sumardjan (1987) mengelompokkan atas tiga pola yaitu; (1), penyimpanan uang secara tradisional yang “tidak produktif” seperti penyimpanan dalam stagen, berupa perhiasan emas dll, (2), penyimpanan uang secara tradisional yang “produktif” sebagai investasi dalam bentuk ternak, papan dan tiang dari kayu dsb (3), penyimpanan dalam bank yang berbunga. Dengan masuknya BRI Unit Desa, maka akan terjadi modernisasi pola penyimpanan uang milik petani, namun prosesnya berjalan lambat dan terbatas.⁷⁵

Selain itu dari ijin pendirian selain berdasarkan status hukum, beberapa lembaga pekreditan mendapat awalnya beroperasi berdasarkan ijin dari pemerintahan kolonial Belanda, pengesahan (ijin) dari Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Banyaknya ragam lembaga keuangan di daerah pedesaan tanpa disertai pengaturan sistem kelembagaan yang baik, akan sulit mengatasi kasus-kasus seperti kredit ganda. Badan-badan pengelola kredit pada umumnya bukan badan keuangan yang profesional, hanya BRI dan KUD yang secara hukum resmi merupakan badan yang berhak mengelola keuangan masyarakat sesuai dengan undang-undang perbankan No.14/1967 dan undang-undang pokok-pokok perkoperasian No.12/1967.⁷⁶

Melihat keberagaman lembaga keuangan pedesaan dan resiko yang mungkin timbul dapat merugikan masyarakat, maka pemerintah beranggapan sudah saatnya memberikan kepastian hukum bagi beroperasinya mereka. Kepastian hukum tersebut menjadi nyata sejak diiblakukan Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992. Dalam ketentuan peralihan UU tersebut dinyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank yang telah memiliki ijin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang perbankan ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam UU ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 25 Maret 1992. (Pasal 57 UU No.7/92).

⁷⁵ Ringkasan makalah yang disampaikan oleh Selo Sumardjan dengan judul “*Simpanan Dan Pinjaman Masyarakat Desa*” pada seminar Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan yang diadakan oleh LPPI Juli 1986.

⁷⁶ Ringkasan makalah yang disampaikan oleh Muslimin Nasution dengan judul “*Peranan Kelembagaan Koperasi dan Pengelolaan Keuangan di Pedesaan*” pada seminar Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan yang diadakan oleh LPPI Juli 1986.

Sementara untuk Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Kredit Desa (LKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang disamakan dengan itu diberikan status Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UU No.7/1992 dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. (Pasal 58 UU No.7/92)

Banyak dari lembaga keuangan pedesaan tersebut terpaksa harus tutup karena tidak dapat memenuhi persyaratan permodalan dan kepengurusan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku regulator perbankan. Namun demikian tidak sedikit pula pemerintah daerah yang turut mendorong beralihnya Lembaga Keuangan Mikro, melalui suntikan (penyertaan) modal sehingga menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu pengembangan PD BPR BKK/BKK dengan penyertaan modal dan meningkatkan profesionalisme pengelola. Di Jawa Timur KURK juga didorong menjadi BPR KURK, selanjutnya (tahun 2004) dilakukan merger seluruh BPR KURK menjadi PT BPR Jatim. Dengan demikian masyarakat di daerah dapat menikmati pinjaman, dari PD BPR BKK/BKK dan PT BPR Jatim atau BPR lainnya yang berasal dari Lembaga Keuangan Mikro sebelum UU No.7/1992, lebih banyak dan nilai kredit yang diberikan juga akan lebih besar. Saat ini untuk melestarikan asal usulnya, beberapa lembaga keuangan tersebut menambahkan nama asal mereka seperti PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung di Lampung.

Kehadirannya prinsip usaha Syariah pada Bank Perkreditan Rakyat menjadi lengkap dengan hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sejak diubahnya UU No.2 tahun 1992 dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998. Kehadiran BPRS memenuhi keinginan masyarakat bagi pelayanan non bunga perbankan. Sebagaimana peran Bank Umum Syariah untuk lebih dapat berperan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, kehadiran BPRS masih membutuhkan banyak dorongan dari

Bank Indonesia, selaku otoritas BPRS, meliputi pemberdayaan Asosiasi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sistem pengawasan.⁷⁷

Layanan lembaga keuangan di tingkat pedesaan saat ini masih belum dapat diakses secara harian adalah permasalahan utama bagi kurangnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam layanan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh BRI⁷⁸ pada tahun 2001, walaupun Indonesia telah memperkenalkan lembaga keuangan mikro sejak jaman kolonial, mayoritas masyarakat di pedesaan belum menerima layanan keuangan. Selain itu dalam laporan ADB pada tahun 2003 menyebutkan bahwa konstrain utama dari rendahnya tabungan di tingkat pedesaan adalah karena sedikitnya layanan lembaga keuangan yang dapat diakses secara harian. Layanan tabungan dan kredit tersebut meliputi sisi kemudahan, fleksibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁷⁹ Hal ini juga terkonfirmasi pada penelitian yang dilakukan oleh GTZ-ProFi tahun 2001⁸⁰ yang menyarankan untuk menutupi Gap lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan dengan melakukan;

- Meningkatkan jangkauan lembaga keuangan mikro yang ada (BRI Unit, BPR, LDKP, dan KSP).
- Meningkatkan linkage antara lembaga tersebut, dan intermediasi lembaga keuangan di tingkat desa.
- Meningkatkan keberadaan Lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi di tingkat desa (BMT, LDP di Bali, *Baitul Qirat*⁸¹ di Aceh dan *Credit Union*).

Terkait dengan penguatan kelembagaan keuangan mikro beberapa inisiatif sejak tahun 15 tahun terakhir antara lain penguatan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Inisiatif-inisiatif yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan mikro (termasuk BPR) secara tidak langsung, dibanding yang langsung. Inisiatif tersebut seperti program *Promotion of Small Financial Institutions (ProFI)* yang dilakukan

⁷⁷ Marsius, Joni dkk, *Baseline Survey Mengenai Kondisi Internal, Persaingan dan Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 3 No.2, September 2000, Bank Indonesia.

⁷⁸ Dalam survey mikro banking yang dilakukan oleh BRI pada Oktober 2001 menunjukkan bahwa secara nasional mayoritas tidak mengenal bank, di 68% dari sampel tidak memiliki kredit dari lembaga keuangan formal atau yang informal, dan 62%nya tidak memiliki tabungan dari lembaga keuangan formal dan informal, halaman 37 dari survey.

⁷⁹ Solid Interm Report by Bankakademie Internasional for the ADB (Asistance No.3810 – Indonesia: Rural Microfinance Indonesia) In Januari 2003.

⁸⁰ GTZ Profi, *Microfinance Institution Study*, 2001, p 196. GTZ Profi adalah The German Agency for Technical Cooperation.

⁸¹ Istilah BMT di wilayah Aceh adalah Baitul Qirat (BQ).

oleh Bank Indonesia/GTZ, UKABIMA, memberikan sponsor kepada lembaga keuangan bukan bank oleh USAID dan dilaksanakan oleh CRS, yang fokus pada peningkatan kondisi kerangka kerja dan kapasitas teknis dari lembaga keuangan. Dua program utama lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sistem keuangan mikro yang berkerjasama dengan Bank Umum, Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk *linked program* telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia kerjasama dengan GTZ begitu pula oleh ADB dalam bentuk kredit mikro (*Microcredit Project*).⁸²

Keseksian Microfinance untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau mengurangi kemiskinan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia telah menarik perhatian berbagai lembaga donor Internasional untuk mengimplementasikan berbagai program bantuan teknis (*technical assistant*) dan terkadang juga bantuan keuangan (*financial assistant*), kepada negara dunia ketiga. Bank Dunia, CGAP⁸³, dan GTZ adalah beberapa lembaga internasional yang sangat tertarik dengan keberadaan lembaga keuangan mikro. Keyakinan mereka bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro di pedesaan, sebagai kantong kemiskinan Indonesia, akan dapat membawa masyarakatnya ke luar dari garis kemiskinan.

Untuk negara Indonesia yang telah melirik bidang ini mulai dari awal tahun 1990an adalah GTZ, dengan Proyek Hubungan Bank dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (PHBK), lalu dilanjutkan dengan program *Promotion of Small Financial Institutions (ProFI)*. Beberapa masukan penting yang dihasilkannya dapat langsung diimplementasikan karena GTZ langsung bermitra dengan Bank Sentral Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap kesehatan lembaga keuangan.

Dalam laporan yang ditulis oleh GTZ-Profi dalam melihat aspek badan hukum, regulasi dan pengawasan disebutkan bahwa,⁸⁴

- a. Lembaga keuangan mikro saat ini beroperasi mengacu pada undang-undang perbankan untuk BPR/BPRS dan undang-undang koperasi untuk koperasi

⁸² GTZ Profi, *Op Cit*, 2001, p 15

⁸³ The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) adalah konsorsium dari 29 lembaga donor bilateral dan multilateral yang membantu keberadaan lembaga keuangan mikro. Misinya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga keuangan mikro agar lebih luwes, kualitas pelayanan jasa keuangan lebih baik dan bersifat jangka panjang.

⁸⁴ GTZ-Profi, *Background Paper on Microfinance Policy and Strategy*, Version 2.1 07-2005, p.11-12

simpan pinjam. Pilihan lembaga keuangan mikro dari sisi legal sangat terbatas, sebagai BPR/BPRS akan berhadapan dengan ketentuan perbankan yang relatif ketat dan kaku, atau sebagai koperasi yang hanya dapat melayani anggotanya saja. Pada kenyataannya terdapat BMT atau BQ di Aceh, yang merupakan lembaga keuangan mirip koperasi yang berhubungan dengan masyarakat luas seperti perbankan.

- b. Untuk lembaga keuangan mikro yang bukan bank umumnya tidak tunduk pada regulasi dan pada pengawasan instansi tertentu, tidak masuk dalam skema Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bahkan ada kalanya walaupun asset sudah besar tidak memiliki badan hukum tertentu. Kalaupun mereka didesak untuk memiliki badan hukum, mereka akan memilih badan hukum koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal ini terjadi di lembaga keuangan mikro di Bali. Walaupun mereka memiliki badan hukum koperasi namun kegiatan usahanya tidak berdasarkan pada prinsip perkoperasian. Kalau dibiarkan hal ini akan memberatkan kementerian koperasi dan UMKM untuk mengawasinyanya.

Berikut ini adalah empat pilar kebijakan dan strategi yang ditawarkan oleh GTZ agar dapat diterapkan pada lembaga keuangan mikro;⁸⁵

1. Reorientasi Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah Indonesia pada masa lampau, dengan melakukan intervensi, dalam bentuk penunjukan sektor tertentu dan kebijakan kredit bersubsidi, tidak berhasil mencapai sasaran dan membawa masyarakat sasaran keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan. Walaupun demikian, untuk masyarakat di daerah-daerah yang benar sulit dijangkau, peranan pemerintah tetap dibutuhkan. Selain dari itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah hendaknya berdasarkan pendekatan pasar (*market driven*). Pendekatan pasar tujuannya adalah membuat masyarakat terbiasa. Pada saat kegiatan usahanya berkembang dan lembaga keuangan mikro tidak cocok lagi melayani, mereka telah biasa dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan formal.

⁸⁵ Ibid, p.21-22

2. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Bagi Berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Secara Alami.

Pengaturan lembaga keuangan mikro ditujukan agar pengusaha mikro dapat berkembang dengan alamiah begitu pula lembaganya. Pemerintah harus dapat menerapkan aturan yang jelas, di mana, dan kepada siapa lembaga keuangan mikro dapat beroperasi. Regulasi yang terlalu ketat, baik untuk masuk (*entry barrier*) maupun pada tingkat bunga, sedapat mungkin dihindari.

Pembagian kewenangan yuridis di tingkat provinsi maupun kabupaten sebaiknya dibuat jelas, baik pada perizinan, pengaturan maupun pada pengawasan. Pengaturan pada berapa besar uang yang dapat diterima dan disalurkan oleh lembaga keuangan mikro perlu ditetapkan.

3. Ketentuan Kehati-Hatian dan Pengawasan Yang Efektif.

Ketentuan kehati-hatian ditujukan untuk melindungi para penyimpan uang kecil di lembaga keuangan mikro untuk itu perlu dibuat pengaturan tingkat kesehatan secara sederhana.

4. Dukungan pada Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusianya.

Pemerintah perlu mengambil tanggung jawab bukan hanya untuk menjaga stabilitas dan integritas dari lembaga keuangan mikro, tetapi juga secara aktif mendorong lembaga keuangan mikro menjadi kalisator dalam pembangunan ekonomi, khususnya membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Dukungan tersebut khususnya pada kelembagaan dan sumber daya manusia yang mengelola lembaga keuangan mikro. Dukungan pada kemajuan kelembagaan dapat dengan membuat “lembaga khusus” yang bertanggung jawab pada pengembangan dan penelitian.

4.2. Perkembangan Industri Keuangan Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia

*4.2.1 Historis perbankan*⁸⁶

Pendudukan Belanda selama 3,5 abad atas Indonesia telah mewariskan suatu struktur perbankan yang bersifat kolonial, tetapi yang kemudian setahap

⁸⁶ Diringkas dari buku *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di Indonesia (suatu pengantar)* karangan Panglaykim, Yusuf dan Pangestu.

demikian telah diubah menjadi suatu struktur yang bersifat nasional. Pada jaman kolonial sektor bisnis dan ekonomi seperti perkebunan, pengangkutan, perasuransian, perdagangan, perbankan dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda. Bisnis yang kecil dan menengah dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan Arab yang dikenal sebagai *vreem ooslingen*, sementara perkebunan rakyat oleh golongan pribumi. Namun akses ke bank saat itu hanya dapat dilakukan oleh pengusaha Belanda. Kalau pun masyarakat (pedagang kecil dan menengah) membutuhkan layanan perbankan, maka bank Belanda akan menyalurkannya melalui perusahaan besar Belanda (*Big Ten*) yang bertindak sebagai *wholesale banking*.

Pada masa sebelum Perang Dunia II di Indonesia terdapat 8 bank devisa dan perdagangan, diantaranya 4 bank Belanda, 2 bank Inggris, dan 2 bank Cina, yaitu;

- 1) *De Javasche Bank*
- 2) *Nederlandse Handel Maatschappij*
- 3) *Nederland Indische Handelsbank*
- 4) *Escompomto Bank*
- 5) *The Hongkon and Shanghai Banking Corporation*
- 6) *The Chartered Bank*
- 7) *Bank Of China*
- 8) *Overseas Chinese Banking Corporation*

Salah dari bank-bank Belanda itu, *De Javasche Bank*, bersifat semi pemerintah dan mempunyai dwi fungsi. Ia mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas, berfungsi sebagai bank sentral walau terbatas, dan bank devisa dan perdagangan.

Tugas utama dari bank-bank di atas adalah memberikan kredit jangka pendek untuk membiayai ekspor-impor, dan perusahaan-perusahaan perkebunan asing dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kredit-kredit disalurkan kepada pengusaha Cina selanjutnya ke rakyat pedesaan untuk membiayai pengumpulan barang-barang ekspor. Dengan demikian sejak zaman Belanda perbankan sudah

ditujukan untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu juga beroperasi 3 bank Jepang dan beberapa bank nasional kecil⁸⁷.

Meskipun saat itu pemerintah Belanda telah pula memberikan pula bantuan keuangan langsung kepada para pengusaha pabrik pribumi, akan tetapi peranan pelepas uang masih sangat dominan.

Setelah PD II, selama masa perjuangan kemerdekaan, di daerah Republik muncul 2 bank, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BNI didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan sebagai bank umum, di samping sebagai bank sentral dari RI, sementara BRI merupakan perubahan dari *Algemene Volkscredietbank* (AVB) yang didirikan untuk menyediakan kredit pedesaan dan kredit-kredit kecil lainnya.

Pada tahun 1952 didirikan bank pemerintah ketiga yang diberi nama Bank Pembangunan Industri, dan pada 1960 dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO). Pada tahun 1953, *De Javasche Bank* dinasionalisasi dan namanya menjadi Bank Indonesia (BI) dengan tugas sebagai bank sentral dan sebagai Bank Sentral bertahan sampai kini. Pada waktu itu BI masih mempunyai bagian-bagian perbankan lain, sekaligus statusnya tetap sebagai bank devisa dan perdagangan. Dalam tahun-tahun sebelum tahun 1960 didirikan pula beberapa bank pemerintah lainnya, yaitu Bank Tani Dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1960 pula BRI dan Bank Tani dan Nelayan dilebur menjadi Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), dan pada tahun 1963 Bank Tabungan Pos diubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Khusus untuk BKTN, karena merupakan penggabungan dari BRI dan Bank Tani dan Nelayan, juga berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing terhadap bank dan lumbung desa, koperasi, bank pasar dan sejenisnya yang sebelumnya ada pada BRI, menjadi di BKTN.⁸⁸

Bank-bank Belanda yang juga mengalami nasionalisasi adalah; (a) *Escompto Bank* menjadi Bank Dagang Negara berdasarkan PP No.13/1960 tanggal 2 April 1960; (b) *Nederlandse Handel Maatschappij* ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan Urusan Exim berdasarkan Peraturan Pemerintah

⁸⁷ Baca kembali penjelasan di sub bab 4.1. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

⁸⁸ Djiwandono, Soedradjad dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode II:1959-1966*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005, hlm 148-149.

No.44 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Keuangan No.26126/BUM II tahun 1960 (mengenai ini tidak terdapat catatan apakah juga dinasionalisasi atau bubar).

Ijin usaha *Overseas Chinese Banking Corporation*, yang berkantor pusat di Singapura di Indonesia dicabut melalui SK Menteri Urusan Bank Sentral tahun 1963 (No.35/63/Kep/MUBS), sedangkan *Bank of China* atas permintaannya sendiri telah menutup usahanya berdasarkan SK Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta No.23/UPBMS/64.

Begitu pula bagi *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation* dan *The Chartered Bank* menghentikan usaha di Indonesia. Khusus untuk *The Chartered Bank* di Jakarta, segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk pegawai, usaha dan pengurusan diserahkan kepada Bank Umum Negara, sedangkan gedung-gedung, rumah-rumah instansi serta pelengkapannya di Surabaya dan Medan diserahkan kepada BNI. Sementara 3 bank Jepang ditutup sejak perang berkobar.

Pada tahun 1968 bank asing kembali ijin berusaha di Indonesia untuk membuka kantor perwakilan. Mayoritas dari bank asing tersebut merupakan pemegang saham lembaga-lembaga keuangan bukan bank.

Peristiwa yang perlu disimak juga adalah sejarah kelahiran Bank-bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD ditujukan untuk membantu pembangunan yang merata diseluruh daerah, yang pembiayaannya diharapkan dapat selenggarakan melalui perbankan, maka disamping BAPINDO yang bertugas membiayai Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pemerintah menetapkan agar setiap daerah tingkat I didirikan bank pembangunan daerah yang dimiliki bersama oleh pemerintah daerah dan swasta. Sesuai dengan UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah (BPD) tanggal 16 Agustus 1962, namun sebelumnya berdasarkan ijin melalui PP No.1 tahun 1955 terdapat 16 Daerah yang telah mendirikan BPD. Dengan adanya UU No.13/1962 tersebut masing-masing BPD menyesuaikan diri terutama pada modal dasar BPD.⁸⁹

Peristiwa penting dalam pasang surut perbankan di Indonesia perlu diingat bahwa Indonesia pernah menerapkan konsep Bank Tunggal Milik Negara pada

⁸⁹ *Ibid*, hlm 165-166

tahun 1965. Bank tunggal merupakan penggabungan dari BKTN, Bank Umum Negara (BUNEG), BTN, dan BNI kedalam Bank Indonesia. Ke empat bank yang digabungkan ke BI tersebut di sebut dengan Bank Negara Indonesia. Penggabungan ini berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No.65/MUBS/65 tanggal 30 Juli 1965, yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1965. Pemilihan nama BNI karena dianggap adalah bank yang didirikan setelah Indonesia merdeka, yang membawa semangat kemerdekaan dan kemajuan. BDN penggabungannya akan diatur kemudian, namun sampai dengan pemecahan kembali BDN tidak pernah bergabung dalam bank tunggal (BNI). BNI dikelompokkan menjadi Unit-unit yakni;⁹⁰

- a. Bank Negara Indonesia Unit I, bertindak sebagai bank sentral (dahulu BI)
- b. Bank Negara Indonesia Unit II (dahulu BKTN)
- c. Bank Negara Indonesia Unit III (dahulu BNI)
- d. Bank Negara Indonesia Unit IV (dahulu BUNEG)
- e. Bank Negara Indonesia Unit V (dahulu BTN)

Selain itu Pemerintah juga masih memiliki BDN dan BAPINDO.

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah sistem perbankan dan keuangan, sejak jaman Belanda sampai dengan periode awal kemerdekaan, penting sekali bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan pendapatan yang merata, baik di luar maupun di dalam negeri, terutama di Indonesia yang karena ukuran ekonomi relatif kecil sangat peka terhadap guncangan-guncangan moneter.⁹¹ Untuk mencapai stabilitas moneter, pemerintah Indonesia telah menciptakan UU Pokok Perbankan tahun 1967 yang membagi lembaga keuangan menjadi kelompok berdasarkan fungsi dan tujuan pendiriannya, dan juga UU No.13/1968 mengenai Bank Sentral.

Pasang surut pengelolaan bank juga terjadi pada periode 1971-1980, mulai dari kesulitan bank dalam mengembalikan deposito dan harus dikonversi menjadi saham, atau proses merger sebagai upaya penyelamatan bank. Pada periode ini, jumlah bank telah berkurang dari 175 bank menjadi 80 bank, baik karena merger maupun dicabut ijin usahanya. Dalam proses rasionalisasi Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, memberikan suasana yang mendorong pelaksanaan merger.

⁹⁰Ibid, hlm 153

⁹¹ Panglaykim, J.E – Pangestu, *Op Cit*, hlm 3-4

4.2.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)⁹²

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No.38/MK/VI/1/1972 tanggal 18 Januari 1972, pemerintah Indonesia membentuk LKBB sebagai salah satu usaha untuk mendorong perkembangan pasar uang dan modal di Indonesia. Kegiatan utama lembaga tersebut ialah mengerahkan dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan kertas-kertas berharga. Dana yang dikerahkan dari masyarakat dipakai untuk membantu pembiayaan perusahaan-perusahaan dalam bentuk pinjaman atau penyertaan modal, disamping dana yang juga telah disediakan oleh bank-bank untuk maksud yang sama.

Untuk membentuk lembaga keuangan bukan bank ini pemerintah Indonesia telah menetapkan dua jenis badan usaha, yaitu: (i), mereka yang mengutamakan kegiatannya di bidang pembiayaan pembangunan (*development type*); dan (ii), mereka yang bergerak sebagai perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*investment type*).

Upaya pembentukan pasar modal sudah dimulai pada tahun 1968, namun baru tahun 1972 pemerintah membentuk Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (BAPEPAM). Untuk merangsang perkembangannya, pemerintah memberikan berbagai keringanan berupa pembebasan pajak seperti pajak pendapatan atas hasil penjualan saham, pajak bunga, deviden dan royalti, membebaskan dana tersebut dari pajak kekayaan.

Badan-badan usaha ini telah didirikan berkat kerjasama (*joint venture*) antara bank-bank pemerintah dan/atau bank-bank/perusahaan-perusahaan swasta nasional di satu pihak dan bank-bank/LKBB-LKBB luar negeri di pihak lain. Tugas utama mereka yang tergolong dalam *development type* adalah memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang, dan mengikutsertakan modal dalam perusahaan-perusahaan; tugas utama mereka yang tergolong dalam *investment type* adalah memasarkan efek-efek yang dikeluarkan oleh perusahaan melalui bursa (*underwriting*).

Badan usaha yang tercatat sebagai perusahaan yang memperoleh modal dari pasar modal (*go publik*) pertama adalah Semen Cibinong.

⁹² Diringkas dari buku *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di Indonesia (suatu pengantar)* karangan Panglaykim, Yusuf dan Pangestu.

4.2.3. Lembaga Penjaminan Kredit

Kita semua memaklumi bahwa peranan Usaha Mikro Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ia bukan hanya sebagai salah satu penunjang pertumbuhan nasional tetapi juga sebagai penampung tenaga kerja yang cukup besar. Hampir seluruh usaha skala besar Indonesia saat ini bermula dari UMKM. Untuk mendorong pertumbuhannya agar lebih besar selain manajemen, pasar, teknologi dan legalitas, perbaikan pada aspek permodalan dari perbankan adalah salah satu resep yang diyakini banyak kalangan -pemerintah, Bank Indonesia sampai dengan ekonom-, namun permasalahan yang kerap dijumpai adalah mereka belum memiliki tanggungan (*collateral*)⁹³ yang memadai, sehingga mereka masuk kategori *feasible* namun belum *bankable*. Pemerintah pernah menerapkan pemberian dana bergulir, namun mengingat besar dan tersebar nya UMKM baik pada sektor maupun wilayah, maka jumlah yang disalurkan pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah permodalannya. Untuk itu *penjaminan kredit*⁹⁴ merupakan salah satu solusi atas permasalahan UMKM dalam memperoleh kredit perbankan.

Penjaminan dan asuransi sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Tetapi dalam praktek seringkali sulit dibedakan atas kedua pengertian itu. Penjaminan keuangan adalah sebuah perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman bilamana pinjaman tersebut tidak dibayar penuh. Sebuah jaminan hutang mirip dengan asuransi kredit, dan sulit dibedakan dengan seperti penjaminan yang berhubungan dengan penaksiran sebelum penetapan asuransi.⁹⁵

Di dunia, menurut laporan internasional *Council For Small Business* tahun 2002 – World Conference San Juan Puerto Rico, sudah lebih dari 170 negara yang mengimplementasikan penjaminan kredit untuk membantu KUKM, karena

⁹³ Dalam pemberian kredit/pembiayaan yang sehat perbankan sedapat mungkin berlandaskan prinsip 5 C, yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition, dan Colleteral. Character mewakili integritas dari calon debitur; Capacity mencerminkan kapasitas usaha; Capital adalah modal yang ada pada debitur sebagai pendamping kredit/pembiayaan yang diajukan; Condition adalah kondisi dari usaha saat ini dan prospeknya; Colleteral adalah jaminan (tanggungan) tambahan selain proyek yang dibiayai, yang sekaligus pegangan(cadangan) perbankan yang menyalurkan jika kredit/pembiayaan mengalami masalah dikemudian hari.

⁹⁴ Di Asia penyelenggara usaha asuransi dan penjaminan biasa disebut pelengkap kredit (credit supplements). Sebagian besar organisasi asuransi dan penjaminan kredit di Asia menjadi anggota *The Asian Credit Supplement Institution Confederation* (ASCIC). Dua Lembaga Jaminan Kredit Indonesia menjadi anggota ASCIC.

⁹⁵ Junaidi, A., SE., ME., *Prospek Rintisan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah*, http://www.smecda.com/deputi7/file_InfokopEdisi%2022/prospek_rintisan.htm

KUMK dipandang memiliki peran penting dalam inovasi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi.⁹⁶

Di negara Indonesia sesungguhnya sejak lama telah beroperasi perusahaan penjaminan, yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) yang awal mulanya merupakan Perusahaan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang didirikan tahun 1971 serta PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT. PKPI) mewakili perusahaan swasta (kadin) didirikan tahun 1996 melalui PMK No.486/1996 di mana bisnis utamanya adalah menjamin kredit UKM, dan koperasi. Selain itu masih ada perusahaan asuransi kredit yaitu PT Askrindo didirikan 6 April 1971 yang menyelenggarakan penjaminan dalam bentuk *Financial Guarentee* antara lain *Surety Bond (Customs Bond dan contruction Bond)*, *Re Asuransi dan Asuransi Kredit Perdagangan*.⁹⁷ Kemudian di tingkat daerah lembaga penjaminan mulai muncul sejak tahun 2000.

Dahulu Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) merupakan BUMN bernaung dibawah Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Tenaga Kerja. Tugas utama LJKK adalah menjamin skim kredit yang disalurkan kepada koperasi. Sejarah mencatat bahwa sejak berdirinya LJKK telah banyak memberikan bantuan kepada koperasi dalam hal penjaminan sehingga citra koperasi di masyarakat menjadi baik. Selanjutnya untuk lebih mengembangkan kemampuan keuangan koperasi sekaligus menyehatkan beroperasinya lembaga penjaminan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51/1981 dibentuklah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. Selanjutnya sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000, nama Perum PKK diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha dengan harapan dapat menjangkau sasaran tidak hanya koperasi tapi juga dapat menjangkau pelayanan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Sekarang Perum sarana berada dibawah naungan Kantor Meneg BUMN.

Tanpa mengecilkan arti kehadiran perusahaan penjamin di Indonesia bagi pengembangan UMKM yang selama ini dirasakan cukup membantu, maka dari sini jumlah dan kemampuan jangkauan pelayanan masih dirasa sangat terbatas. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memperbanyak tumbuhnya

⁹⁶ Djamhari, Choirul, Dr.,Ir.,M.Sc., *Sistem Penjaminan Pinjaman KUMKM*, Semarang, 2007

⁹⁷ Junaidi, A., SE., ME., *Op Cit.*

lembaga penjamin di berbagai daerah dengan harapan dapat melayani UMKM yang jumlahnya mencapai lebih 40 juta unit dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.⁹⁸

Di tingkat nasional, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk yang dapat mengakses kredit (UMKM) diluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi dengan skim penjaminan pemerintah. Skim tersebut diikuti oleh 6 bank pelaksana yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri. Sementara itu, penjaminan kredit dilakukan oleh 2 BUMN yaitu PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU). KUR yang diluncurkan oleh Presiden pada November 2007 akan disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16% (efektif) dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.⁹⁹ Sejak diluncurkan perkembangan KUR di seluruh Indonesia cukup menggembirakan, sampai dengan Maret 2010 posisi plafond Rp18.632.992 juta, dengan outstanding Rp7.809.233 juta dan 2.577.751 debitur. Konsentrasi penyalurannya masih berada di Pulau Jawa yang masing-masing untuk plafond, outstanding dan debitur adalah 48%, 40% dan 61% (Kantor Menko Perekonomian).

Bank Indonesia selaku regulator sektor perbankan, memberikan perhatian yang besar terhadap berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Perhatian tersebut tercermin dalam salah satu dari 19 rekomendasi kebijakan perbankan yang harus ditempuh dalam rangka cetak biru tatanan industri perbankan ke depan atau yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pilar I butir 3a API disebutkan bahwa salah satu upaya yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor riil adalah dengan memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit. Di tingkat daerah, dan juga

⁹⁸ Keynote Speech yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rapat Koordinasi Sosialisasi Kajian Penjaminan Kredit Bagi UMKM oleh Pemerintah Daerah, Semarang, 12 Desember 2007, hlm 1.

⁹⁹ Joni Marsius dkk, *Mengevaluasi Pendekatan Taktis Manajemen Strategik dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dilihat dari Kacamata Lembaga Keuangan Mikro, Makalah Kelompok 6, MPKP FE UI, Jakarta, 2008.*

merupakan bagian dari revitalisasi Kantor Bank Indonesia di daerah agar lebih dirasakan manfaatnya, salah satu strategi yang ditempuh adalah bersama dengan pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Penjaminan Kredit (di tingkat) Daerah (LPKD).¹⁰⁰

Kantor Bank Indonesia Pekanbaru aktif dalam pembentukan LPKD di Riau, yang bernama PT.Sarana Penjaminan Riau (PT.SPR). PT. SPR telah memiliki badan hukum pada tanggal 26 November 2004, dengan saham mayoritas di miliki Pemda (91%), PT. PIR (7,5%), dan PT. SRV (1,5%), kala itu tidak dapat beroperasi karena belum memiliki ijin operasional. Ijin distop oleh menkeu tahun 2003 karena ada ketentuan yang melarang daerah melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah (SK Menkeu No.479/KMK.06/2003). Untuk menjalankan operasinya, atas fasilitasi oleh Bank Indonesia, maka PT.SPR bekerja sama dengan pihak yang telah memiliki ijin (dhi.PT.Askrindo).¹⁰¹ Khusus untuk pola kerjasama (PKS) antara Pemda dan Askrindo seperti yang dilakukan di Riau, sampai dengan 2007, paling tidak ada 17 daerah, sedangkan yang penandatanganan pemda dalam bentuk MOU terdapat 46 pemda.

Berkaitan dengan pendirian LPKD sejumlah daerah memahami bahwa lembaga ini tidak bisa memberikan keuntungan langsung sehingga dapat membantu PAD. Manfaat dari LPK adalah secara tidak langsung, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja dari UMKM yang dijamin oleh LPKD. Sementara manfaat lansungnya hanya berupa peroleh jasa penjaminan sebesar Rp 1,5-2% pertahun.¹⁰² Bila lembaga perbankan dan usaha produktif lainnya beroperasi utamanya mencari Laba/Profit, namun lembaga penjaminan yang utama dituju adalah manfaat/benefit.¹⁰³

LPKD dalam pelaksanaan sempat mengalami kefakuman karena sempat dilarang beroperasi pada tahun 2003¹⁰⁴, karena berkaitan dengan larangan Pemda untuk menjamin kredit. Namun dengan diterbitkan PP No.2 tahun 2008

¹⁰⁰ Bank Indonesia, *Proceedings: Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Se-Jawa Tengah dan Daerah Yokyakarta*, Semarang, 12 Desember 2007, hlm 2.

¹⁰¹ Makalah berjudul "*Lokomotif Pendorong Perkembangan UMKM di Riau*" yang disampaikan oleh AR Sujono, Direktur PT Sarana Penjaminan Riau pada Forum diskusi kajian penjaminan kredit daerah se Jawa Tengah dan DI Yokyakarta, Semarang, 12 Desember 2007.

¹⁰² Keynote Speech Gub DI Yokyakarta, *Op Cit*, hlm 4.

¹⁰³ Sujono, AR., *Op Cit*, 2007

¹⁰⁴ PMK No.476 Tahun 2003 tentang penghentian pemberian izin usaha perusahaan penjaminan.

dilanjutkan dengan pedoman yang lebih operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit, memberikan ruang yang leluasa bagi pemda untuk mendirikan LPKD. Beberapa pengaturan penting dalam PMK tersebut seperti persyaratan permodalan (untuk provinsi minimal Rp50 milyar, nasional min Rp100 milyar, untuk re-asuransi min Rp1 triliun), kepengurusan yang lebih mensyaratkan kompetensi (perngalaman min 2 thn di lembaga penjaminan dan atau perbankan).

4.3. Perkembangan Perbankan Periode 1983 – 1996

Berkaitan dengan sejarah pembanguan ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia pernah sangat tergantung dengan pengeluaran pemerintah. Saat itu dikenal dengan era ke-emas-an perminyakan (*Oil Boom*) yakni sebelum tahun 1983. Saat terjadi krisis minyak yang didahului oleh resesi dunia, membuat pemerintah mengeser agen pembangunan dari pemerintah menjadi swasta, dengan diperkenalkan debirokratisasi dan deregulasi. Diharapkan peranan sektor migas dapat digantikan dengan sektor non migas. Khusus untuk deregulasi Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan 1 Juni 1983 atau dikenal dengan PakJun 1983. Pakjun diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor perbankan agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi. Saat itu rasio M2 terhadap PDRB hanya sebesar 16,92% pada tahun 1980, dan 17,98% pada tahun 1981 dan 18,57% pada tahun 1982. Untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas (KLBI), terutama kepada bank-bank pemerintah. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan peran perbankan dalam pembangunan, tetapi di lain pihak mengakibatkan bank-bank kurang bergairah dalam meningkatkan dana masyarakat. Rasio KLBI dalam portopolio kredit perbankan menjadi dominan, per Maret 1980 sebesar 32,6%, dan meningkat menjadi 43,2% pada akhir Maret 1983.¹⁰⁵

Dalam menunjang pembangunan ekonomi di era deregulasi, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa insiatif-inisiatif yang dapat dikelompokkan menjadi lima aspek sebagai berikut:

¹⁰⁵ J.Soedrajad Djiwandono dkk, *Sejarah Bank Indonesia periode IV: 1983-1997, Bank Indonesia Pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*, 2006, UKMBI.

- Meningkatkan peran perbankan dalam pembangunan ekonomi.
- Menciptakan alat-alat moneter berdasarkan mekanisme pasar dan menjaga kestabilan moneter dengan menggunakan alat-alat yang diciptakannya.
- Menunjang pengembangan pasar modal.
- Menunjang pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Dalam pelaksanaannya, inisiatif-inisiatif tersebut dituangkan dalam berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan secara bertahap dalam bentuk paket, mulai Juni 1983 sampai dengan Mei 1993. Setelah itu kebijakan tidak dalam bentuk paket tetapi dalam bentuk peraturan-peraturan yang terpisah.

Perkembangan liberalisasi perbankan dimulai saat BI mengeluarkan paket 1 Juni 1983 (Pakjun 1983). Perbankan dibebaskan menetapkan suku bunga kredit dan deposito, dan kebebasan menetapkan syarat-syarat kredit nonprioritas. BI hanya memberikan kredit likuiditas untuk sektor-sektor dengan prioritas tinggi. Dalam pengendalian moneter BI menciptakan surat-surat berharga yang dapat dipergunakan dalam Operasi Pasar Terbuka, cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) tetap dipergunakan. BI juga menghilangkan batasan jumlah deposito dari luar negeri yang dapat diterima oleh bank dalam negeri. Pada saat ini juga dikenalkan sertifikat deposito dan sistem perpanjangan otomatis (*roll over*) pada deposito, serta pada saat ini juga pajak atas bunga deposito tidak dipungut (dihapuskan pada Desember 1989 dan tidak dijamin oleh BI).

Paket lanjutan deregulasi keuangan, moneter dan perbankan berlanjut dengan diberlakukannya paket 27 Oktober 1988. Untuk mendorong penghimpunan dana dan penyaluran kredit, maka diberi kemudahan untuk mendirikan bank baru, pembukaan kantor-kantor bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), serta diberi kebebasan dalam menciptakan skim-skim tabungan dan deposito. Persyaratan pendirian bank baru cukup dengan minimal Rp 10 Milyar untuk bank umum dan Rp 50 juta untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persyaratan pembukaan kantor cabang bank cukup dengan tingkat kesehatan. Kantor cabang pembantu bank asing, pendirian bank campuran, kemudahan bank nasional menjadi bank devisa, serta pendirian usaha pegadang valuta asing. Dalam pakto 1988 penetapan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) selain untuk kebutuhan kehati-hatian juga dikaitkan dengan efisiensi. BMPK diberlakukan

kepada nasabah individual, nasabah grup, maupun pemegang saham pimpinan termasuk manager. Seiring dengan kebijakan di bidang perbankan di pasar modal juga memberikan insentif dengan menangguk pajak terdapat penghasilan penghimpunan dananya (PP No.13 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988).¹⁰⁶

Kewajiban likuiditas minimum setiap bank diturunkan dari 15% menjadi hanya 3% saja. Kebijakan ini tentu saja menyebabkan tumbuh pesat bak jamur di musim hujan, sehingga jumlah bank baru yang jumlahnya lebih dari seratus bank.

Setelah Pakto 1988, deregulasi dilanjutkan kembali dengan adanya Paket 23 Maret 1989, yang merupakan pelengkap dari pakto 88, yang mengatur ketentuan tentang merger, dan konsolidasi bank yang merupakan aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam pakmar 1989 juga memberikan waktu bagi BPR atau Lembaga keuangan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru, termasuk penyesuaian dengan persyaratan permodalannya. BPR yang berdiri sebelum pakto 88 adalah bank-bank desa seperti Badan Kredit Kecamatan di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat, Kredit untuk Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur dan Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Pemberian ijin tersebut dilakukan secara bertahap.

Paket 1 Desember 1989 (PakDes 1989) merupakan serangkaian ketentuan lanjutan dari Pakto 1988. Pada pakdes 1989, deposito di atas Rp5 juta dikenakan pajak. Selain itu penegasan mengenai status kantor BPR dan Kantor di bawah kantor cabang pembantu bank asing.

Setelah mengalami perkembangan perbankan yang cukup menggembirakan, dilain pihak isu globalisasi sudah mulai menerpa Indonesia, maka pada 28 Februari 1991 (pakfeb 1991) diluncurkan paket kebijakan yang mendorong bank bertindak lebih berhati-hati dengan penerapan prinsip yang dikeluarkan oleh Bank for Internasional Settlements (BIS), khususnya dari sisi permodalan (CAR > 8%), serta sistem pengawasan yang mendorong bank berlaku lebih efisien. Ketentuan kehati-hatian lainnya adalah mengenai kualitas aktiva dan pembentukan cadangannya, BMPK, dan ketentuan *margin trading*. Ketentuan yang ada pada pakfeb 1991 disempurnakan kembali dengan pakmei 1993.

¹⁰⁶ Ibid halaman 43-48

Pada tahun 1992, RUU Perbankan yang merupakan kerjasama pemerintah cq Bank Indonesia dengan DPR disahkan menjadi UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan Undang-undang perbankan yang baru ini memberikan keleluasaan dan keluwesan dalam pemilikan dan pengurusan bank, namun menuntut sikap yang lebih bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank. Dengan harapan perbankan di masa yang akan datang mampu berkembang sehat serta memiliki kemampuan yang bertanggung jawab dalam persaingan global.

Namun harapan mulia yang tersirat dalam pembuatan undang-undang tersebut tidak kesampaian. Kemudahan yang diberikan melalui deregulasi tidak dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dan integritas dari pemilik dan pengurus bank. Dalam kenyataan bank-bank hanya dijadikan kendaraan untuk mengelembungkan konglomerasi usaha. Kondisi perbankan semakin memburuk karena besarnya kredit macet karena pemberiannya melanggar batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending limit*. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan modal (*Capital Adequacy Ratio*) menjadi hal yang sulit bagi perbankan.

Untuk mengatasi benang kusut di sektor perbankan, pemerintah meluncurkan serangkaian paket deregulasi lanjutan tanggal 29 Mei 1993 (Pakmei 1993), yang intinya memperbaiki modal minimum bank dan memberikan kelonggaran waktu bagi bank untuk memupuk cadangan yang diperlukan. Kebijakan tersebut disusul dengan pembatasan pemberian kredit baik untuk individu maupun kelompok hanya dibolehkan maksimal 20% dari total kredit.

Yang terjadi kemudian ekonomi mulai menggeliat tumbuh cukup tinggi. Pengusaha nasional berlomba melakukan investasi, yang sebagiannya berasal dari perbankan dalam negeri dan ada juga berasal dari luar negeri. Tingginya semangat dalam berinvestasi dan begitu pula permintaan dalam negeri menyebabkan mesin ekonomi memanas, *overheating*. Pengetatan moneter dilakukan, suku bunga bergerak naik, namun mendorong arus modal dari luar negeri masuk deras ke dalam negeri. Bahkan ada pihak swasta Indonesia mulai menjual surat berharga (*commercial papers, promissory notes*) ke luar negeri.

Memasuki periode 1997 sampai dengan tahun 1999, ekonomi, moneter dan perbankan memasuki era krisis. Tahun 1997/1998 adalah periode terberat dari

tiga puluh tahun pembangunan ekonomi Indonesia. Diawali dengan krisis nilai tukar sejak Juli 1997, kemudian krisis berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Krisis yang terjadi pada dasarnya merupakan akibat cepatnya proses integrasi ekonomi perekonomian Indonesia dalam ekonomi global, sementara perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar belum tertata baik. Keterbukaan ekonomi dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah deregulasi yang ditempuh pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Akan tetapi dinamika perekonomian yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya disertai dengan upaya untuk menata pengelolaan dunia usaha secara baik. Di samping itu, melemahnya fundamental mikroekonomi dapat dilihat pada menurunnya efisiensi pengelolaan dunia usaha dan keretakan yang terdapat di sektor keuangan, khususnya perbankan. Kelemahan-kelemahan fundamental mikroekonomi tersebut akan mengakibatkan ketergantungan pada sektor luar negeri semakin besar, khususnya hutang luar negeri sektor swasta, meskipun kesenjangan tabungan-investasi nasional masih berada pada tingkat yang wajar. Ketergantungan sektor swasta pada sektor luar negeri tersebut terus meningkat sejalan dengan pesatnya kegiatan investasi sektor swasta yang mengakibatkan hutang luar negeri swasta meningkat tajam.¹⁰⁷

4.4. Perkembangan Perbankan Periode Krisis 1997 – 2000

Memasuki pertengahan 1997, situasi moneter berubah dengan cepat. Rupiah mendapat tekanan-tekanan depresiatif yang sangat besar yang berawal dari krisis nilai tukar uang Thailand dan kemudian menyebar ke negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Penyebab utama tekanan nilai tukar tersebut adalah menurunnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia karena adanya kesamaan karakteristik perekonomian dengan Thailand. Hal ini menyebabkan turunnya arus modal luar negeri yang selama ini menjadi bagian penting dari pembiayaan pembangunan nasional. Keadaan ini diperburuk dengan kegiatan spekulasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan merebaknya

¹⁰⁷ J. Soedrajad Djiwandono dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997 – 1999, Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan*, 2006, Unit Khusus Museum Bank Indonesia (UKMBI), hlm.15-16

berbagai isu politik yang menambah ketidakpastian berusaha. Perkembangan tersebut mengakibatkan nilai tukar rupiah selama dua paruh waktu 1997/1998 bejolak dan terdepresiasi ke tingkat yang sangat rendah. Lemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga sebagai bagian upaya mengatasi tekanan rupiah tersebut kemudian menciptakan tekanan pada likuiditas perbankan. Timbulnya krisis di Indonesia merupakan kombinasi dari dua faktor yakni eksternal dan internal berupa kepanikan keuangan dan unsur lemahnya ekonomi nasional menghadapi gejolak yang timbul. Ketika gejolak eksternal timbul, kelemahan internal berupa kelemahan struktural tersebut menyebabkan gejolak mata uang yang terjadi dalam waktu singkat berubah menjadi krisis perbankan dan ekonomi yang cepat berkembang menimpa sektor-sektor sosial dan politik yang juga mengandung kelemahan struktural.¹⁰⁸

Di sebagai dampak dari berbagai rumor yang menimpa beberapa bank mengakibatkan terjadi penarikan besar-besaran dana masyarakat dari perbankan, dan berpindah ke bank-bank pemerintah atau bank yang dianggap kuat oleh masyarakat.

Pengetatan likuiditas dan tingginya suku bunga dalam periode Juli-Agustus 1997 telah menyebabkan tekanan yang sangat berat pada sektor perbankan dan sektor riil. Suku pasar bunga antar bank (PUAB) yang naik tajam telah memperlemah kondisi likuiditas perbankan dan mendorong kenaikan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Hal ini menyebabkan ekspansi kredit perbankan dan kualitas aktiva produktif perbankan memburuk Dunia Usaha terutama korporasi mengalami kemandegan dalam memproduksi sehingga pertumbuhan PDB pada triwulan ketiga tahun 1997 jauh melambat perlambatan tersebut terutama terjadi pada sektor-sektor konstruksi, properti, dan industri manufaktur. Kinerja perekonomian memburuk menyebabkan turunnya kesempatan kerja dan penambahan orang menganggur. Pada akhir tahun 1997 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,5% dibandingkan dengan 4,9% pada tahun 1996.¹⁰⁹

¹⁰⁸ J. Soedrajad Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta, LP3ES, 2002, hlm 11

¹⁰⁹ J. Soedrajad Djiwandono dkk, *Op. Cit.*, hlm.17

Pada kondisi ini perbankan tidak dapat menyalurkan kredit, karena biaya dana membumbung tinggi, kredit yang telah disetujui tidak jadi dicairkan oleh pengusaha karena kondisi ekonomi dan sosial politik sedang carut marut.

Mengingat semakin tertekannya sektor riil dan semakin buruknya kondisi perbankan, maka pemerintah mencanangkan paket kebijakan 3 September 1997 yang mencakup sepuluh langkah pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Secara umum paket kebijakan tersebut tetap menciptakan stabilitas makroekonomi. Namun kebijakan yang diambil tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan moneter, tetapi mencakup pula langkah-langkah di bidang fiskal, perbankan, dan pasar modal. Langkah dimaksud antara lain meliputi pengehematan anggaran, pelonggaran moneter secara berhati-hati sesuai dengan likuiditas perekonomian, penyehatan sistem keuangan terutama perbankan, dan penghapusan batas maksimum pembelian saham oleh investor asing di pasar modal. Langkah-langkah tersebut tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹¹⁰

Menyadari kenyataan bahwa krisis yang dialami telah menjalar ke berbagai sektor ekonomi, pemerintah meminta bantuan *Internasional Monetary Fund* (IMF), dilanjutkan dengan penandatanganan *Letter Of Intend* (LOI) pada tanggal 31 Oktober 1997. Program penyehatan ekonomi ini dalam jangka pendek bertujuan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi melalui pengetatan di bidang fiskal dan moneter. Dalam jangka panjang, program tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah fundamental dan struktural melalui penghapusan berbagai distorsi dalam perekonomian, sehingga meningkatkan *governance* dan transparansi. Dalam jangka pendek umumnya memerlukan pengorbanan berupa penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Namun, setelah melewati masa penyesuaian yang sulit, perekonomian diharapkan akan mengembalikan pada jalur pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan.

Sebagai langkah awal reformasi di bidang perbankan, pemerintah pada 1 November 1997 mencabut izin usaha 16 bank yang *insovent*, yang menguasai 3% dari aset perbankan. Bila bank-bank tersebut ditutup diperkirakan tidaklah terlalu membawa goncangan berarti. Tapi, siapa yang menyangka bahwa tindakan melikuidasi tadi justru memukul keseluruhan sistem perbankan dan keuangan.

¹¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Jakarta, hlm.8

Rupanya, yang alpa diperhitungkan ketika itu, Indonesia tidak memiliki skim penjaminan dana nasabah.¹¹¹ Dalam perkembangannya tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan telah menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Kekhawatiran akan terjadi pencabutan ijin usaha tahap kedua menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menarik dana dari perbankan. Mereka memindahkan simpanan dari bank yang dianggap tidak sehat ke bank yang dianggap lebih sehat atau dikenal, istilah ini dikenal dengan *flight to safety* atau *flight to equity*. Kepanikan masyarakat menyebabkan tekanan yang berat pada likuiditas perbankan. Sementara itu, kredibilitas perbankan nasional di luar negeri semakin menurun dengan memburuknya peringkat yang diberikan lembaga pemeringkat internasional kepada perbankan nasional. Hal ini tercermin pada pada meningkatnya penolakan bank koresponden terhadap transaksi valuta asing dan L/C yang diterbitkan oleh bank nasional. Tekanan berat ini menyebabkan hampir seluruh bank umum nasional mengalami kesulitan likuiditas sehingga mereka melanggar ketentuan GWM dan banyak bank yang mengalami saldo negatif atas rekening gironya di Bank Indonesia. Kesulitan likuiditas juga menyebabkan bank sehat yang tadi pemasok di PUAB, menjadi bank yang meminjam. Segmentasi bank-bank terjadi di PUAB, seperti tercermin dengan melebarnya suku bunga yang terjadi di PUAB. Untuk menyerap likuiditas dan tidak terkonsentrasi pada bank-bank kuat dan bank asing BI intervensi rupiah secara lansung di PUAB. Sementara untuk mencegah meluasnya penarikan oleh nasabah, BI melakukan fungsinya sebagai “*Lender of the Last Resort*”. Namun besarnya uang yang tersalur ini menyebabkan masalah lain yakni dengan meningkatnya kegiatan spekulasi pembelian valuta asing.

Memasuki tahun 1998 kondisi makin memburuk, situasi moneter dan ekonomi makin tidak menentu. Assumsi RAPBN tahun 1998/1999 ditanggapi negatif karena tidak berdasarkan pada kenyataan, berita-berita pemutusan hubungan kerja dan ditutupnya berbagai cabang usaha telah menambah kekhawatiran terhadap situasi perekonomian. Isu kelangkaan bahan pokok menyebabkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi meningkat, untuk satu bulan saja inflasi mencapai 6,88% pada Januari 1998, sementara nilai tukar rupiah

¹¹¹ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm 20

sempat diperdagangkan pada titik terendah sebesar Rp16.000 per dollar pada Januari 1998. Menyadari krisis telah merangsek ke berbagai sendi kehidupan, pemerintah memperbaiki kembali target-target makroekonomi yang dipertegas dalam memorandum kesepakatan LoI tahap II dengan IMF yang antara lain memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia¹¹², pembentukan BPPN dan program penjaminan simpanan, pengurangan pengeluaran pemerintah dan membatalkan 12 proyek prasarana, penghentian alokasi anggaran dan di luar anggaran, kredit khusus kepada IPTN, dan pencabutan pajak khusus bagi proyek mobil nasional. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah reformasi tersebut, pemerintah membentuk dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan (DPKEK).¹¹³ Gambaran drastisnya masalah sosial dan krisis di Indonesia tampak dari berbagai indikator makro tahun 1998 sebagaimana dilaporkan bank dunia dalam berbagai dokumen yang dipergunakan sebagai bahan dalam sidang IGGI tahun 1998 di Paris. Dalam laporan bank dunia tersebut dicantumkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mendekati *minus* 14% tahun 1998, setelah dalam tahun-tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 7%-8% pertahunnya. Pendapatan perkapita menjadi setengahnya tahun sebelumnya. Laju inflasi sebelumnya hanya satu digit meloncat menjadi 80% dan rupiah terpresiasi 70% dalam waktu kurang dari satu tahun sehingga banyak industri yang bangkrut. Akibatnya pengurangan aktivitas dari pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga kerja, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam jumlah besar menyebabkan meningkatkan pengangguran secara drastis.¹¹⁴

Modal asing yang selama ini turut membiayai pembangunan ekonomi Indonesia tidak masuk lagi, bahkan mengalir ke luar secara bersamaan dan dalam jumlah besar. Keadaan itu menjadi semakin retan karena sebagian besar hutang luar negeri tersebut berjangka pendek dan tidak dilindung nilai (*unhedged*).¹¹⁵ Akibatnya, gejolak nilai tukar telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah, dan stagflasi mewarnai ekonomi Indonesia sehingga aktivitas

¹¹² Keppres No.23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang kepada BI Bidang Pengendalian Moneter, Suku Bunga, Kurs dan Kewajiban Devisa

¹¹³ J.Soedrajad Djiwandono dkk, *Op.Cit*, hlm.18-21

¹¹⁴ J.Soedrajad Djiwandono dkk, *Op.Cit*, hlm.51-53

¹¹⁵ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Jakarta, hlm 1 dan 2.

ekonomi merosot tajam. Pada tahun pertama 1998, misalnya kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 12% pertahun sebagai akibat banyaknya perusahaan mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan produksinya. Laju inflasi juga melambung tinggi, yakni mencapai 69,1% dalam periode Januari-Agustus 1998. Tingginya laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat khususnya golongan berpendapatan rendah. Dalam perkembangannya, kondisi ekonomi diperparah dengan rusaknya sistem distribusi bahan pokok yang berakibat pada timbulnya gejolak sosial politik.¹¹⁶

Namun keadaan ekonomi mulai menunjukkan arah perbaikan pada semester terakhir 1998 sebagai dampak beberapa kejadian seperti pencairan dana IMF dan bantuan internasional lainnya, ekspektasi yang positif terhadap kebijakan restrukturisasi perbankan, dan hutang luar negeri swasta Indonesia. Selain itu, dari sisi eksternal penguatan rupiah juga sebagai akibat melemahnya dollar sebagai akibat menurunnya fedfund, dan persepsi pasar yang cukup baik terhadap rencana peluncuran mata uang tunggal Eropa, Euro. Rupiah menguat di kisaran Rp8.000 – Rp7.000 antara November 2008 – Januari 1999. Rupiah sempat beberapa kali mengalami fluktuasi dan tertinggi menyentuh level Rp9.000, sebagai dampak dari pengaruh isu-isu ekonomi maupun non ekonomi. Isu bank bali, penundaan pencairan hutang sebagai bagian dari program perbaikan ekonomi yang didukung oleh IMF. Sementara kegiatan yang berkaitan dengan jajak pendapat Timor Timur dan Siang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga mempengaruhi fluktuasi nilai rupiah.¹¹⁷

Periode 1997-1999 merupakan masa krisis bagi industri perbankan Indonesia. Suatu periode yang penuh dengan pelajaran untuk diingat, yaitu periode yang ditandai dengan pertarungan antara keputusan dan harapan serta periode yang penuh dengan kecemasan dan kesedihan dengan begitu banyak korban yang ditinggalkannya. Tahun 1997-1998 adalah dua tahun yang paling berat dan penuh dengan bahaya dalam perbankan Indonesia. Charles Enoch dan rekan-rekannya, pejabat-pejabat *Internasional Monetary fund* (IMF) yang ditugaskan di Indonesia selama krisis sebagai ketua tim yang ikut membantu upaya pemulihan krisis perbankan, bahkan mencantumkan kata-kata *two years of*

¹¹⁶ Syaril Sabirin, *Perjuangan Keluar dari Krisis, Percikan Pemikiran*, Yokyakarta, BPFE Yokyakarta, 2003, hlm xvii.

¹¹⁷ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1998/1999*, Jakarta.

living dangerously 1997-1999 sebagai judul paper IMF yang susunnya.¹¹⁸ Program restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk memulihkan kembali industri perbankan, disamping berjalan liat dan sangat melelahkan, juga memerlukan biaya restrukturisasi perbankan sebesar Rp636 triliun diperkirakan mencapai 55% dari Produk Domestik Bruto tahun fiskal 1999/2000.¹¹⁹

Namun ada sisi positif dari kiris ekonomi yakni dengan lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, banyak pasal yang diubah, ditambah, dikurangi bahkan dihapuskan. Alasan perubahan tersebut adalah untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Selain itu, dalam memasuki era globalisasi dan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di cabang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya perbankan. Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank, serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Selain itu pada UU No.10/1998 juga disebutkan akan dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan yang akan menjamin simpanan masyarakat pada bank.¹²⁰

Selain itu pada tanggal 17 Mei 1999, Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia resmi diberlakukan. Dengan berlakunya UU No.23/1999 ini BI menjadi Bank Sentral yang independen, tujuannya tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun pada UU ini juga disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan ini akan melakukan pengawasan terhadap semua

¹¹⁸ Chales Enoch, et al, *Indonesia, Anatomy of Banking Crisis, Two Years Living Dangerously 1997-1999*, IMF Working Papers, WP/01/52, Internasional Monetary Fund, Washington D.C, May 2001. Hlm sampul.

¹¹⁹ IMF, *Indonesia, Resolving the Banking Crisis and Related Issues*, Report 10 Prepared by Charles Enoch, et al, Washington D.C, January 2000, hlm 88

¹²⁰ J.Soedrajad Djwandono dkk, *Op.Cit*, hlm 89-96

lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pengalihan tugas tersebut belum terwujud karena lembaga yang akan menangani belum terbentuk sebagai akibat adanya perbedaan pendapat dalam implementasinya.¹²¹ Sebelum lembaga tersebut terwujud, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.¹²²

Selama tahun 2000, fungsi intermediasi keuangan dari industri perbankan dan lembaga keuangan belum sepenuhnya berjalan normal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Resiko politik dan keamanan masih membayangi, dilain pihak perbankan mengalami kelebihan likuiditas, hal ini menyebabkan perbankan lebih banyak menanamkannya dalam bentuk pinjaman antar bank dan SBI. Dengan melalui beberapa kebijakan perbankan, industri perbankan diharapkan dapat segera direstrukturisasi salah satunya melalui program rekapitalisasi. Proses rekapitalisasi dapat diselesaikan dengan penerbitan obligasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan permodalan dan total aset perbankan. Seiring dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap perbankan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional mulai pulih kembali.¹²³

4.5. Perkembangan Perbankan Periode Recovery 2001 – 2006

Untuk tahun 2001 kondisi perbankan menjadi lebih baik, terutama setelah Bank Indonesia dalam rangka menyetatkan perbankan menargetkan agar perbankan mencapai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 8%, dan Non Performing Loan (NLPs) maksimal 5%. Sampai dengan November 2001, secara umum struktur permodalan bank mengalami perbaikan yang tercermin dari meningkatnya jumlah bank yang mencapai pemenuhan CAR 8% sebanyak 138 (95%) dari 145 bank. Sementara untuk NPL menunjukkan perbaikan sebesar 12,1% dan masih jauh dari harapan yang telah ditargetkan. *Loan Deposit Rasio* (LDR) yang dimiliki perbankan nasional tidak banyak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2000. Dalam meningkatkan permodalan bank tersebut

¹²¹ Penyelesaian masalah ini dilakukan pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang amandemen Undang-undang No.23/1999 yang antara lain menyatakan lembaga tersebut terwujud pada tahun 2010.

¹²² Ibid, hlm 116-117.

¹²³ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2000*, Jakarta, hlm 105 - 107

kebijakan yang ditempuh BI adalah meminta bank-bank menambah modal, menggabung bank melalui merger, dan mencari *strategic investor* baru baik domestik maupun asing, namun bagi bank yang tidak mampu dibuka keran *exit policy*. Walau ada perbaikan nilai NPL, terhambat penurunan tersebut karena tertahannya restrukturisasi kredit sebagai akibat tidak sekuatnya *Term and Conditions* antara debitur dan kreditur, menurunnya nilai anggunan kredit yang dikelola oleh BPPN, meningkatnya country risk yang menyebabkan biaya bunga lebih mahal serta menghambat investor asing untuk mengambil alih utang luar negeri perusahaan, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian dalam masalah hukum.¹²⁴

Membbaiknya indikator CAR dan NPL terus berlanjut ke di tahun 2002, seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia. CAR seluruh bank umum mencapai 22,5%, atau meningkat 199 poin dibandingkan dengan akhir 2001 sebesar 20,5%, sementara NPL mengalami perbaikan yang mencapai 8,3% (atau netto 2,9%), dibandingkan 12,1% (neto 3,6%) tahun sebelumnya.¹²⁵

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan beberapa indikator perbankan selama kurun waktu setelah krisis Asia 1997.

Tabel 4.2
Indikator Perbankan
selama kurun waktu 1998 - 2009

| Indikator | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| Total Aset | 895,5 | 1007 | 1031 | 1100 | 1112 | 1196 | 1272 | 1470 | 1693,5 | 1987 | 2310,6 | 2508,8 |
| DPK | 625,3 | 617,6 | 699,1 | 797,4 | 835,8 | 888,6 | 963,1 | 1128 | 1282 | 1511 | 1753,3 | 1973 |
| Kredit | 545,5 | 277,3 | 320,4 | 358,6 | 410,3 | 477,2 | 595,1 | 730,2 | 832,9 | 1046 | 1353,6 | 1437,9 |
| LDR(%) | 72,4 | 26,2 | 33,2 | 33 | 38,2 | 53,7 | 61,8 | 64,7 | 64,7 | 69,2 | 77,2 | 72,88 |
| NPL Gross (%) | 48,6 | 32,8 | 18,8 | 12,1 | 8,3 | 8,2 | 5,8 | 8,3 | 7 | 4,6 | 3,8 | 3,31 |
| NPL Net (%) | 34,7 | 7,3 | 5,8 | 3,6 | 2,9 | 3 | 1,7 | 4,8 | 3,6 | 1,9 | 1,5 | |
| CAR | -15,7 | -8,1 | 12,5 | 20,5 | 22,5 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 20,5 | 19,2 | 16,2 | 17,42 |
| Net Interest Income | -61,2 | -36,6 | 22,8 | 37,8 | 42,9 | 3,2 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 8 | 9,4 | 5,56 |

Sumber: LPI, Bank Indonesia

Pada masa ini pemberian kredit belum mengalami perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. LDR tercatat 33%, hal ini mengindikasikan perbankan belum menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal. Potensial

¹²⁴ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2001*, Jakarta, hlm 142 - 144

¹²⁵ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2002*, Jakarta, hlm 155

LDR tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan apabila komitmen kredit yang telah disediakan perbankan dapat ditarik secara maksimal oleh nasabah. Jumlah kredit yang belum ditarik (*undisbursed loan*) mencapai 55% atau Rp70,5 triliun dari plafond sebesar Rp127,3 triliun. Kondisi ini mencerminkan bahwa perbankan sudah cukup ekspansif dalam penyaluran kredit, namun sisi permintaan dalam kenyataannya debitur belum mampu menyerap kredit yang telah disediakan. Hal ini ditengarai akibat masih tingginya risiko dunia usaha sehubungan dengan belum kondusifnya kondisi ekonomi seperti belum stabilnya nilai tukar dan masih tingginya suku bunga, serta belum stabilnya kondisi politik-sosial-keamanan. Selain itu, dari sisi intern perbankan masih melakukan konsolidasi dan berupaya memenuhi ketentuan prudensial perbankan.¹²⁶

Pada tahun ini juga rencana penghapusan *blanket guarantee* mengemuka yang akan digantikan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kehadiran LPS dalam sistem perbankan moderen adalah suatu keniscayaan. Di lain pihak pengawasan terhadap perbankan sedapat mungkin mengacu pada prinsip-prinsip pengawasan internasional atau yang dikenal dengan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*.¹²⁷

Pada tahun 2003, Proses amandemen Undang-undang Bank Indonesia yang juga telah menggantung selama lebih dari tiga tahun akhirnya dapat selesai. Inti dari amandemen UU tersebut adalah menyeimbangkan antara independensi sebuah bank sentral dalam menentukan kebijakan moneternya dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang baru dan krusial dalam amandementersebut, terutama menyangkut beberapa hal yaitu mengenai Jaring Pengaman Finansial (FSN), Pengawasan bank yang akan dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Badan Supervisi, dan Pemilihan Dewan Gubernur.¹²⁸ Program penyehatan perbankan pada tahun laporan telah diperoleh banyak kemajuan yang berarti. Salah satunya adalah telah dilaksanakannya divestasi saham pemerintah pada Bank Mandiri, BRI, BCA, Niaga, Danamon, dan BII. Kemajuan juga terjadi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Selama periode Januari September 2003 telah berhasil

¹²⁶ Bank Indonesia, *Op.Cit*, hlm 157

¹²⁷ *Ibid*, hlm 148-149

¹²⁸ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm xix-xx

direstrukturisasi kredit sejumlah Rp41,3 triliun. Selain itu, persiapan pembentukan LPS terus dilanjutkan. Pengembangan perbankan syariah tahap I sejak dicanangkan pada tahun 2002 terus disempurnakan. Dalam rangka mendukung kestabilan sistem keuangan, Bank Indonesia telah membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan merintis langkah-langkah pembentukan *Financial Safety Net* (FSN). Selanjutnya, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu konsep tatanan industri perbankan ke depan dan akan diimplementasikan mulai 2004. Penyusunan program API diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan, seperti struktur perbankan yang sehat, pengaturan yang efektif, pengawasan bank yang independen, kondisi internal bank yang kuat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang mencukupi, dan juga tersedianya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan.¹²⁹ Berkaitan dengan kuatnya pengaruh pasar terhadap industri perbankan maka penghitungan Tingkat Kesehatan Bank (TKS) mempertimbangan resiko sensitivitas pasar (*Sensitivity to Market Risk*), sehingga selanjutnya akan disebut TKS CAMELS. Di samping itu, dalam setiap unsur CAMELS juga akan dimasukkan variabel-variabel baru yang dianggap sejalan. Penilaian CAMELS ini akan diujicobakan pada 2004 untuk penerapan secara resmi pada 2005.¹³⁰

Sektor perbankan secara umum mengalami kemajuan yang berarti pada 2004. Seiring dengan membaiknya kinerja makroekonomi, kredit perbankan tumbuh hingga melampaui prakiraan awal tahun. Peningkatan kredit tersebut ditunjang oleh kondisi mikro perbankan yang membaik sebagai hasil dari upaya konsolidasi dan peningkatan prinsip kehati-hatian perbankan yang selama ini dilakukan. Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi pada pasar dan lembaga keuangan lainnya yang antara lain ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang fenomenal dan pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana yang sangat pesat. Perkembangan fenomenal terjadi di pasar saham, ketika IHSG menembus level 1.000, serta pada pasar reksadana dengan NAB yang melampaui Rp100 triliun. Hal lain yang menonjol adalah meningkatnya penyaluran dana perbankan kepada sektor riil melalui perusahaan

¹²⁹ *Ibid*, hlm 13

¹³⁰ *Ibid*, hlm 23

pembiayaan dan pegadaian. Dinamika lain yang turut mewarnai periode laporan adalah inovasi produk keuangan yang semakin beragam. Pada tahun ini (Sept 2004) juga diselesaikan UU LPS¹³¹, dan akan beroperasi pada tahun 2005. Pada bidang pengembangan infrastruktur perbankan, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka kebijakan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*). Sebagai tindak lanjut, pada 2004 dilakukan penyusunan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan RI mengenai fasilitas pembiayaan darurat (FPD). Salah satu butir nota kesepahaman adalah dimungkinkannya pembelian SUN oleh Bank Indonesia pada pasar perdana untuk membiayai FPD apabila dana APBN tidak mencukupi. Bagi Bank Indonesia, pembelian tersebut dilakukan dalam kerangka pelaksanaan fungsi lender of the last resort. Pada tahun ini juga dikembangkan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) yang merupakan program memantapkan sistem keuangan, secara keseluruhan baik dari sistem perbankan maupun non perbankan.¹³²

Terkait dengan kemajuan teknologi yang mulai diadopsi oleh perbankan, ketentuan jasa pelayanan bank melalui internet.¹³³ Sementara dalam upaya stabilisasi Rupiah, pada Juni 2004 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan PDN¹³⁴ yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan pada periode laporan. Dalam kerangka stabilisasi Rupiah, ketentuan dimaksud telah berhasil memperkecil peluang bank dalam kegiatan spekulasi valas.

Perkembangan sektor keuangan tahun 2005 di tengah tekanan yang cukup berat terhadap stabilitas makroekonomi, industri perbankan tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari masih memadainya ketahanan perbankan dalam menyerap berbagai risiko gangguan stabilitas, termasuk peningkatan risiko kredit. Penyaluran kredit perbankan tetap tumbuh sesuai dengan rencana, meskipun dengan pertumbuhan lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Khusus untuk UMKM, realisasi penyaluran kredit UMKM mengalami peningkatan dan bahkan melebihi rencana yang ditargetkan.

¹³¹ Undang-undang Republik Indonesia No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004

¹³² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2004*, Jakarta, hlm 117

¹³³ SE No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking) sebagai tindak lanjut dari PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi bank Umum.

¹³⁴ PBI No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Sementara itu, perkembangan yang menggembirakan juga terjadi pada pasar saham, sebagaimana tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat secara signifikan. Demikian pula, perusahaan pembiayaan dan usaha pegadaian mengalami kinerja yang relatif baik. Namun demikian, perkembangan yang kurang menggembirakan dialami pasar reksadana dan obligasi seperti ditunjukkan oleh penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan harga obligasi.¹³⁵

Pada tahun ini pula LPS resmi bekerja menggantikan *Blanket Guarantee* yang selama ini memberikan rasa aman bagi penyimpan uang di perbankan Indonesia. Di samping itu juga dibentuknya Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) sebagai sarana koordinasi dan pertukaran informasi masing-masing instansi terkait tersebut juga merupakan langkah maju. Dengan forum tersebut gejala-gejala gangguan stabilitas yang muncul dapat diketahui secara dini dan dengan cepat dapat dicarikan langkah penyelesaiannya.¹³⁶

Di tengah proses pemulihan ekonomi nasional pascakenaikan harga BBM pada Oktober 2005 dan beberapa kejadian bencana alam, dengan berbagai strategi internal dan dukungan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, sektor keuangan pada tahun 2006 tetap dapat menunjukkan kinerja yang terus membaik. Kinerja sektor perbankan tetap menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan meskipun menghadapi kendala dalam mendorong pembiayaan untuk kegiatan ekonomi yang terlihat dari turunnya permintaan dan penawaran terhadap kredit, sehingga berdampak pada meningkatnya penempatan dana bank pada SBI. Kinerja perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, tercermin dari perluasan jaringan pelayanan, peningkatan volume usaha dan produk serta pembiayaan yang diberikan. Perkembangan yang signifikan juga terjadi di pasar modal yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang cukup tajam, akhir desember menjadi 1.805,5 poin atau menguat 632,9 poin (55,3%) dibanding tahun sebelumnya, dan pulihnya kembali Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana sejalan dengan penurunan BI Rate¹³⁷.

¹³⁵ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2005*, Jakarta, hlm 152

¹³⁶ *Ibid*, Hlm 153

¹³⁷ Kinerja yang mengesankan tersebut menempatkan Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai pasar modal berkinerja terbaik ketiga di wilayah Asia Pasifik, setelah bursa Shanghai dan Shenzhen.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan dan pegadaian mampu meningkatkan kinerjanya dalam pertumbuhan aset dan perolehan keuntungan.¹³⁸

Terkait dengan terjadi bencana di beberapa daerah di Indonesia yang relatif menyulitkan perbankan dan untuk menciptakan kepastian berusaha bagi perbankan diterbitkan perilaku khusus bagi perbankan di wilayah bencana.¹³⁹ Untuk meningkatkan kekuatan dan handalan perbankan pada tahun ini juga diberlakukan kebijakan kepemilikan tunggal (*single present policy*), yang utamanya mengatur bahwa suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada satu entitas bank umum saja, namun bagi pihak yang telah menjadi PSP pada beberapa bank diberi 3 opsi, *pertama*, mengurangi kepemilikan menjadi PSP pada satu bank saja, *dua*, merger atau konsolidasi, *tiga*, membentuk *bank holding company* di Indonesia.¹⁴⁰ Pada tahun ini juga persiapan perbankan Indonesia menuju praktek perbankan internasional pada tahun 2008, dengan menerapkan prinsip Basel II, dimulai.

4.6. Perkembangan Perbankan Periode Krisis Global 2007 – 2009

Salah satu aspek penting untuk dicatat terkait dengan kinerja perbankan sampai akhir tahun 2007 adalah kenyataan bahwa stabilitas sistem perbankan Indonesia pascakrisis telah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum krisis. Hal itu dapat dilihat baik dari pelaksanaan intermediasi maupun dari kondisi ketahanan. Pencapaian tersebut terjadi sejalan dengan stabilnya kondisi perekonomian dan didorong pula oleh berbagai kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi (LDR=69,2%) dan memperkuat ketahanan perbankan. Dari aspek intermediasi, pencapaian tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit tahun 2007 yang melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun. Sementara itu, perbaikan ketahanan terlihat dari tetap stabilnya kondisi perbankan yang, antara lain, tercermin dari tingginya permodalan yang dimiliki dan menurunnya *non-performing loan* (NPL net =1,9%). Krisis *subprime mortgage* yang memengaruhi perbankan di berbagai negara, pada tahun 2007 masih berdampak minimal

¹³⁸ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2006*, hlm 163

¹³⁹ PBI No.8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam.

¹⁴⁰ PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal.

terhadap perbankan nasional. Hal lain yang menggembirakan adalah kinerja perbankan syariah yang semakin baik, seperti tercermin pada perluasan jaringan pelayanan, pertumbuhan penghimpunan dana, dan pembiayaan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di sisi lembaga keuangan bukan bank, pasar modal menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sangat tajam. Secara sektoral, sumbangan terbesar peningkatan IHSG tersebut disumbang oleh sektor pertambangan, pertanian, dan properti. Total nilai transaksi saham juga meningkat signifikan dari Rp445,7 triliun menjadi Rp1.050,1 triliun (135,6%). Penguatan indeks dan maraknya transaksi tersebut mendorong peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebesar 59,2% menjadi Rp1.988,3 triliun, sehingga *share* pasar modal terhadap PDB meningkat dari 37,4% menjadi 57,0% pada akhir tahun 2007. Tren peningkatan juga terjadi pada pasar obligasi, reksadana, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Pada tahun ini (1 November 2007) pula Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).¹⁴¹

Sepanjang tahun 2008, sistem keuangan Indonesia menunjukkan daya tahan yang cukup kuat, meskipun pada akhir triwulan III-2008 dihadapkan pada krisis keuangan global yang telah memorakporandakan stabilitas sistem keuangan di berbagai negara maju. Pengalaman pahit krisis keuangan Asia tahun 1997/1998 lalu, telah mendorong otoritas dan pelaku di sektor keuangan Indonesia berbenah diri, meningkatkan disiplin, dan selalu berhati-hati. Pada semester II-2008, sejalan dengan meningkatnya intensitas krisis global yang ditandai oleh bangkrutnya Lehman Brothers, bank investasi terbesar ke-4 di AS, kepercayaan terhadap sistem perbankan global sempat goyah.¹⁴² Ini terlihat dari keringnya likuiditas di pasar yang membuat bank-bank pun mengalami kesulitan mencari pasok dana segar. Bisa dibayangkan bila tiga bank besar BUMN sampai meminta “tolong” Pemerintah selaku bohir ketiga bank pelat merah itu, tambahan likuiditas. Ketiga bank itu masing-masing bank mendapat guyuran Rp5 triliun.¹⁴³ Meski eksposur perbankan dan lembaga keuangan Indonesia terhadap aset dan lembaga keuangan

¹⁴¹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2007*, Jakarta, hlm 126-139

¹⁴² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2008*, Jakarta, Bab IV, hlm 114.

¹⁴³ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm ix

bermasalah di global terbatas, imbas ke domestik tetap terasa melalui penarikan dana asing dari instrumen keuangan domestik. Kondisi likuiditas global yang ketat berimbas pada segmentasi dan relatif ketatnya likuiditas pada beberapa bank domestik, meskipun secara sistem likuiditas tetap mencukupi. Untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, Pemerintah menaikkan penjaminan simpanan pihak ketiga dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar.¹⁴⁴

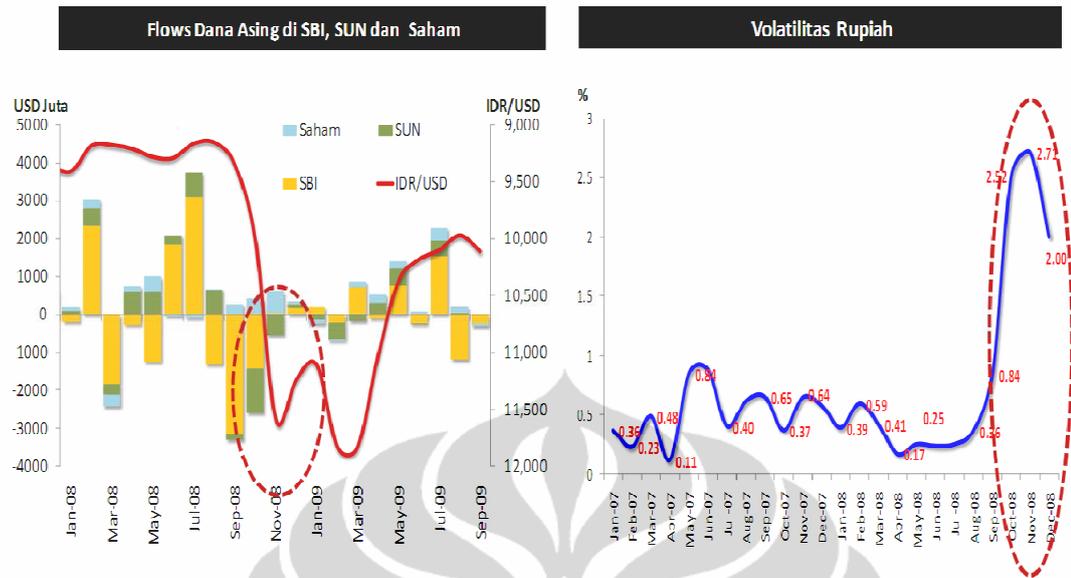
Pasar modal domestik turut mengalami guncangan, sehingga sempat dihentikan perdagangannya. Pada 8 Oktober 2008, IHSG terkoreksi hingga 10,38% atau menyentuh 1.451,7 yang membuat otoritas bursa mensuspend perdagangan efek dan derivatif hingga 10 Oktober 2008. Langkah suspen 2 (dua) hari kerja ini dimaksudkan untuk melindungi investor lokal agar tak merugi lebih dalam lagi. Hal ini juga untuk menghindari kejatuhan indeks bursa lebih parah dan merontokkan modal sekitar 300 ribu investor lokal yang seketika menjadi “miskin” karena harga saham yang mereka pegang merosot hingga di atas 50%.

Berbagai indikator yang diperiksa oleh otoritas moneter memperlihatkan gejala memang kondisi kita sedang mengalami “peradangan” akibat krisis. Salah satu indikasi yang kasat mata adalah nilai tukar rupiah yang sempat mengoyak angka nilai tukar psikologis yakni Rp10.000. Puncaknya, rupiah sempoyongan menembus angka Rp12.650 per dolar AS pada 24 Nopember 2008. Cadangan devisa kita sempat menguap hampir Rp9 triliun (turun 15%) hanya dalam waktu sekejap, menjadi US\$51,6 miliar per Desember 2008. Padahal lima bulan sebelumnya (Juli 2008), masih tercatat US\$60,6 miliar.¹⁴⁵ Menguapnya cadangan devisa tersebut merupakan harga yang dibayar untuk menahan kejatuhan Rupiah lebih jauh lagi.

¹⁴⁴ Bank Indonesia, *Op cit*, hlm 157

¹⁴⁵ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 6

Flow Dana Asing, SBI, Saham dan Volatilitas Rp



Sumber: Bank Indonesia.

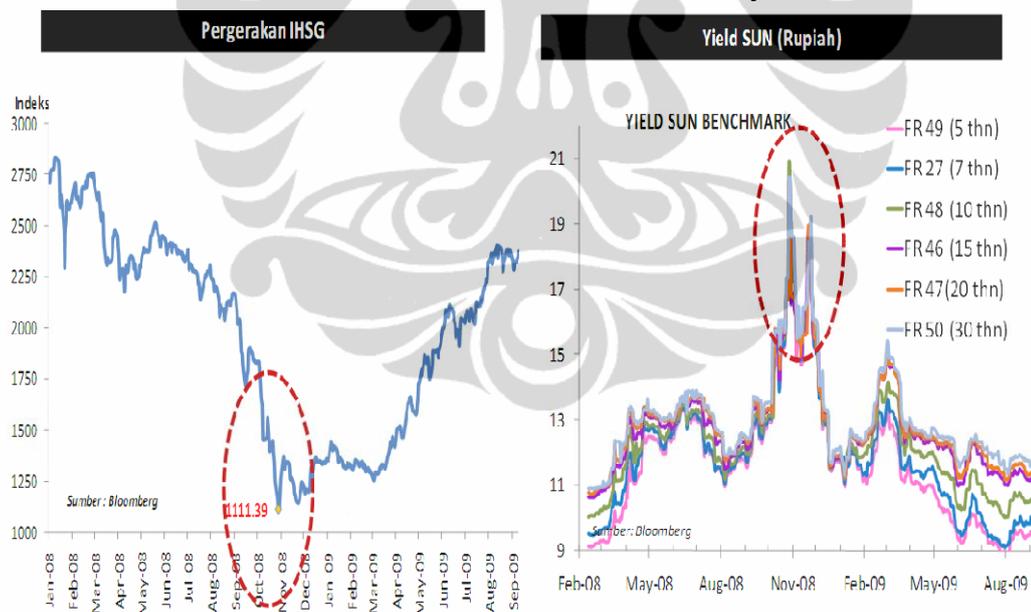
Grafik 4.1

Namun dengan berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah, pasar modal kembali menunjukkan perbaikan meski kinerjanya secara keseluruhan tahun tetap terkoreksi. Sistem pembayaran nasional tetap terjaga kelancarannya ditopang oleh kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan BI, sehingga permasalahan gagal bayar Bank Century tidak berdampak secara sistemik. Sedangkan lembaga keuangan lainnya seperti dana pensiun dan asuransi belum terpengaruh imbas krisis global tersebut. Secara umum, meskipun mengalami ujian berat pada semester II-2008, daya tahan sistem keuangan relatif terjaga sehingga fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam membiayai pembangunan domestik tetap berjalan dengan cukup baik, didukung oleh sistem pembayaran nasional yang dapat diandalkan. Daya tahan Bank Umum tercermin dari terjaganya indikator kinerja. Terlebih lagi ekspansi kredit yang semakin meningkat terbukti kondusif dalam pembiayaan perekonomian domestik. Kualitas kredit tetap terpelihara baik, sebagaimana tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2008, baik *gross* maupun *net*, yang berhasil mencatat angka terendah semenjak krisis keuangan Asia tahun 1997/1998 dan sekaligus berada jauh di bawah target indikatif yang ditetapkan Bank Indonesia. Namun, ekspansi kredit yang lebih tinggi dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut terjadi di tengah ketatnya

likuiditas global sehingga mempengaruhi likuiditas antarbank. Meski secara industri likuiditas mencukupi, kecenderungan segmentasi antarbank yang meningkat sempat menjadikan likuiditas antarbank ketat. Rentabilitas bank cukup terjaga didukung kualitas kredit yang baik, meskipun suku bunga dana relatif meningkat.¹⁴⁶

Pada tahun 2009, imbas krisis keuangan global masih mempengaruhi psikologis perbankan, terlebih dengan dibentuknya pansus angket bank Century untuk melacak kemungkinan telah terjadi tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan. Paling tidak akibat dari penyelamatan bank century tersebut telah menutup celah sehingga tidak sempat membesar dan menyebabkan keruntuhan seperti yang pernah dialami Indonesia di tahun 1997/1998, dan kebijakan itu telah menyebabkan negara Indonesia lolos dari acaman krisis keuangan global, dan berhasil mencatat sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga setelah Cina dan India.

IHSG dan Imbal Hasil SUN Turun Tajam



Grafik 4.2

¹⁴⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2008*, Jakarta, Bab IV, hlm 114-116

BAB 5

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hal yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia, dilanjutkan dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, instabilitas ekonomi dan politik kaitannya dengan kemiskinan. Kajian akan lebih mendalam akan dilakukan untuk kemajuan sektor perbankan terhadap kemiskinan di Indonesia.

5.1. Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dalam rangka pembangunan Indonesia. Sesuai dengan diamanatkan oleh Sila ke 5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka merupakan tugas dan kewajiban kita semuanya untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran kita masing-masing untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan yang masih menghinggapai sebagian dari rakyat Indonesia.¹⁴⁷

Batasan dari garis kemiskinan akan berbeda dalam jumlah orang yang digolongkan miskin tergantung dengan metodologi survey yang dilakukan. Di Indonesia, garis kemiskinan nasional dihitung oleh Biro Pusat Statistik (BPS,2000) sebagai pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan sekeranjang kelompok makanan tetap yang butuhkan seseorang sebanyak 2.100 kalori. Penggunaan sekeranjang kelompok makanan tetap ini adalah pilihan yang didasarkan pertimbangan sosial dan dapat menghasilkan garis kemiskinan yang sensitif terhadap terhadap harga yang dapat beragam sepanjang waktu dan daerah. Selain itu batas miskin untuk bukan makanan adalah besarnya nilai uang untuk memenuhi kebutuhan minimum berupa pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan serta aneka barang dan jasa lainnya. Kebutuhan dasar tersebut dinyatakan dalam satuan uang. Sumber data kemiskinan utamanya diperoleh dari sensus ekonomi nasional (SUSENAS).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Danusaputro, Marjanto, *Bantuan Kredit untuk Rakyat Miskin*, pada buku dgn Judul Monetisasi Pedesaan Bunga Rampai Keungan Pedesaan, LPPI, Jakarta, Juli 1991, Bab I hlm 93

¹⁴⁸ Limit of poverty = minimum limit food + minimum limit for non-food

Dengan menjumlahkan nilai batas miskin makanan dan bukan makanan akan diperoleh suatu nilai yang disebut batas kemiskinan. Dengan demikian, penduduk akan dikatakan miskin jika jumlah pengeluaran penduduk tersebut berada atau di bawah batas kemiskinan, sementara itu penduduk dengan pengeluaran di atas batas kemiskinan dapat dikategorikan sebagai tidak miskin.

Tabel 5.1
Perkembangan Batas Kemiskinan, Persentase
dan Jumlah Penduduk Miskin, 1976-2009

| Tahun | Batas Miskin (Rp/kapita) | | Penduduk Miskin (%) | | | Penduduk Miskin (juta orang) | | |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------|-------|------------------------------|------|-------|
| | Kota | Desa | Kota | Desa | Total | Kota | Desa | Total |
| 1976 | 4.522 | 2.849 | 38,8 | 40,4 | 40,1 | 10,0 | 44,2 | 54,2 |
| 1978 | 4.969 | 2.981 | 30,8 | 33,4 | 33,3 | 8,3 | 38,9 | 47,2 |
| 1980 | 6.831 | 4.449 | 29,0 | 28,4 | 28,6 | 9,5 | 32,8 | 42,3 |
| 1981 | 9.777 | 5.877 | 28,1 | 26,5 | 26,9 | 9,3 | 31,3 | 40,6 |
| 1984 | 13.731 | 7.746 | 23,1 | 21,2 | 21,6 | 9,3 | 25,7 | 35,0 |
| 1987 | 17.381 | 10.294 | 20,1 | 16,1 | 17,4 | 9,7 | 20,3 | 30,0 |
| 1990 | 20.614 | 13.295 | 16,8 | 14,3 | 15,1 | 9,4 | 17,8 | 27,2 |
| 1993 | 27.905 | 18.244 | 13,4 | 13,8 | 13,7 | 8,7 | 17,2 | 25,9 |
| 1996 ¹ | 38.246 | 27.413 | 9,7 | 12,3 | 11,3 | 7,2 | 15,3 | 22,5 |
| 1996 ² | 42.032 | 31.366 | 13,6 | 19,9 | 17,7 | 9,6 | 24,9 | 34,5 |
| 1998 | 96.959 | 72.780 | 21,9 | 25,7 | 24,2 | 17,6 | 31,9 | 49,5 |
| 1999 | 92.409 | 74.272 | 19,5 | 26,1 | 23,5 | 15,7 | 32,7 | 48,4 |
| 2000 | 91.632 | 73.648 | 14,6 | 22,4 | 19,1 | 12,3 | 26,4 | 38,7 |
| 2001 | 100.011 | 80.382 | 9,8 | 24,8 | 18,4 | 8,6 | 29,3 | 37,9 |
| 2002 | 130.499 | 96.512 | 14,5 | 21,1 | 18,2 | 13,3 | 25,1 | 38,4 |
| 2003 | 138.803 | 105.888 | 13,6 | 20,2 | 17,4 | 12,2 | 25,1 | 37,3 |
| 2004 | 143.455 | 108.725 | 12,13 | 20,11 | 16,66 | 11,4 | 24,8 | 36,1 |
| 2005 | 150.799 | 117.259 | 11,68 | 19,98 | 15,97 | 12,4 | 22,7 | 35,1 |
| 2006 | 174.290 | 130.584 | 13,47 | 21,81 | 17,75 | 14,5 | 24,8 | 39,3 |
| 2007 | 187.942 | 148.837 | 12,52 | 20,37 | 16,58 | 13,6 | 23,6 | 37,2 |
| 2008 | 204.896 | 161.831 | 11,65 | 18,93 | 15,42 | 12,8 | 22,2 | 35,0 |
| 2009 | 222.123 | 179.835 | 10,72 | 17,35 | 14,15 | 11,9 | 20,6 | 32,5 |

Sumber: Statistik Indonesia dan Data & Informasi Kemiskinan – BPS (diolah)

- 1) Menggunakan standar lama (sebelum tahun 1998)
- 2) Berdasarkan standar 1998 yang disesuaikan dengan pola konsumsi tahun yang bersangkutan

Tabel di atas menunjukkan perkembangan batas kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dari tahun 1976 sampai dengan 1996 (sebelum krisis), total penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen atau dari 54,2 juta orang menjadi 22,5 juta orang. Dengan demikian selama periode 20 tahun tersebut penduduk miskin berkurang sebesar 31,7 juta orang atau rata-rata 1,6 juta orang per tahun. Penurunan kemiskinan yang relatif cepat terjadi pada periode 1976-1981, karena penduduk miskin pada saat itu relatif banyak dan pertumbuhan ekonomi rata-rata mampu mencapai lebih dari 7

persen per tahun. Setelah tahun 1996, terutama setelah krisis ekonomi, penurunan penduduk miskin tidak terlalu besar. Setelah 10 tahun setelah krisis (1998-2008) penduduk miskin berkurang 14,5 juta orang atau rata-rata 1,5 juta orang pertahun hampir sama dengan rata-rata penurunan penduduk miskin 20 tahun sebelumnya. Patut dicatat krisis global pada semester akhir tahun 2008 tidak berpengaruh dengan penurunan penduduk miskin Indonesia, malah tercatat turun sebanyak 2,5 juta orang pada akhir tahun 2009. Hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun 2009, Indonesia tercatat negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi ketinggi ketiga setelah Cina dan India, sementara negara lainnya berjuang keras bahkan hanya untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tetap positif.

Dari informasi yang disampaikan oleh tabel di atas bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Masyarakat pedesaan cenderung berusaha di sektor pertanian, sementara masyarakat perkotaan umumnya di luar sektor pertanian. Hal ini memberikan signal bahwa penduduk yang berkerja di sektor pertanian berpeluang menjadi miskin dibandingkan bekerja di sektor lain.

Pada tahun 2005, 2006, 2007, prosentase penduduk miskin (*headcount index*) yang bekerja di sektor pertanian berturut-turut sebesar 22,47 persen, 25,41 persen, dan 23,28 persen. Sementara yang bekerja di sektor industri pengolahan berturut-turut sebesar 12,21 persen, 13,19 persen dan 16,48 persen, Untuk sektor lainnya berturut-turut sebesar 9,00 persen, 10,60 persen, 10,53 persen.¹⁴⁹

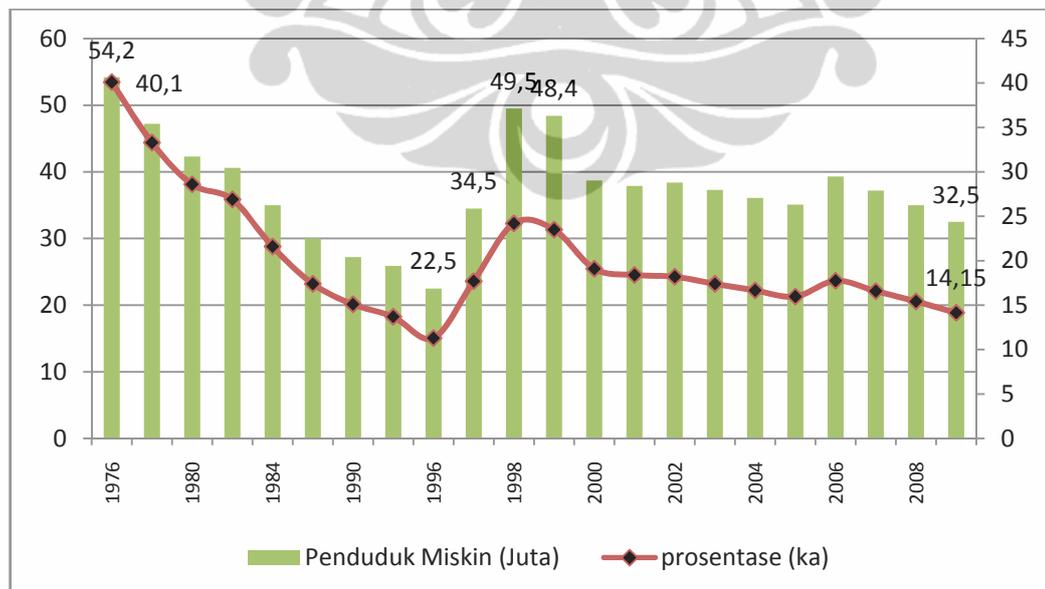
Pengurangan tingkat kemiskinan merupakan agenda politik paling utama dalam beberapa pemerintahan di Indonesia. Berkaitan dengan itu pemerintah melakukan kegiatan dengan skala nasional seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani – Nelayan, Program Kemitraan, Menciptakan pengusaha baru, Bussiness Clinic Development, Unit Simpan Pinjam, Kelompok Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, P3LKMAP, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Proyek Pembangunan Kecamatan (PKK), Proyek Pemberdayaan Daerah, Pemberdayaan

¹⁴⁹ Suhariyanto, Kecuk et al, *Op Cit*, , hlm 124

Perempuan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Penggunaan Manajemen Pertanian.

Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia sejak Oktober 1988, mendorong pertumbuhan perbankan agar berkembang pesat termasuk dari sisi jumlah maupun jangkauan kantor bank di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya perbankan, akan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan sehingga mobilisasi uang beredar akan menjadi lebih baik, masyarakat mudah dapat memperoleh pembiayaan untuk usahanya yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan selanjutnya kemiskinan akan turun. Dalam catatan Bank Indonesia selaku otoritas moneter paling tidak beberapa ketentuan yang mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit khususnya sektor UMKM, seperti Surat Berharga Pasar Uang Kredit Usaha Kecil (SPBU KUK), insentif Tingkat Kesehatan Bank yang dikaitkan dengan penyaluran kredit, GWM yang dikaitkan dengan pemenuhan LDR, linked program antara Bank Umum dengan BPR/BPRS, dlsb. Menjaga agar bank yang beroperasi adalah bank yang sehat, dan lain sebagainya.

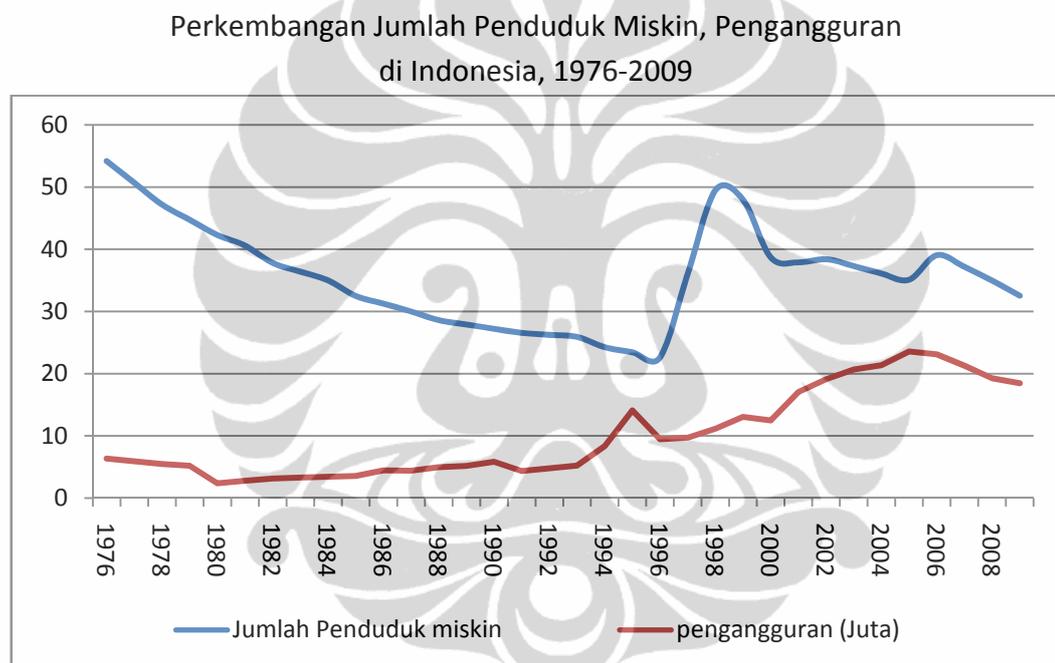
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1976-2009



Sumber: BPS

Grafik 5.1

Tidaklah berlebihan bila disebutkan bahwa pengangguran merupakan pangkal dari kemiskinan. Dengan pengangguran akan lahir berbagai masalah sosial, yang bukan saja bagi diri pribadi si penganggur tetapi juga keluarga dan lingkungannya. Pengangguran bukan hanya menyebabkan kemiskinan, namun juga berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Komisi kemiskinan dunia (*Poverty Commission*) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan penyebab utama kemiskinan, dan disebutkan bahwa pada tahun 1972-1973 sekitar seperenam (16.6%) dari penduduk yang tidak bekerja hidup di bawah garis kemiskinan (Saunders, 2002).¹⁵⁰



Sumber: BPS (Susenas dan Sakernas)

Grafik 5.2

Namun penelitian yang dilakukan oleh BPS untuk melihat hubungan antara kemiskinan dengan tingkat pengangguran, dari tahun 2001 sampai dengan 2009, diperoleh fakta bahwa cukup sulit menganggap ada hubungan antara keduanya. Pada Sumatera barat, Kalimantan Selatan, ada hubungan yang cukup kuat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi di provinsi-provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo, NAD dan Maluku, tingkat kemiskinan nampak

¹⁵⁰ Suhariyanto, Kecuk, et al, *Op Cit*, hlm 66

lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penganggurannya. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dan Banten nampak terlalu rendah dibandingkan tingkat penganggurannya. Menurut penelitian tersebut, hal ini dikaitkan pada perbedaan konsep dan metodologi. Data pengangguran dan kemiskinan biasanya diperoleh dari dua sumber data dengan waktu pengumpulan dan responden yang berbeda. BPS mengumpulkan data pengangguran secara semesteran dalam Sakernas, sementara kemiskinan dihitung dari Susenas yang hitung pada bulan Maret. Selain itu masalah unit analisis kedua survey. Selain itu, kemiskinan diukur dari pendapatan/pengeluaran yang merupakan “*flow variable*”, sementara pengangguran merupakan “*stock variable*” yang mengamati status angkatan kerja seseorang pada titik tertentu (satu minggu yang lalu). Kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita dalam rumah tangga. Seorang menganggur dan tidak punya pendapatan, tidak otomatis menjadi miskin apabila dalam rumah tangga tersebut ada anggota keluarga yang berpenghasilan tinggi, sehingga rata-rata pendapatan/pengeluaran per kapita rumah tangga tersebut di atas garis kemiskinan.¹⁵¹

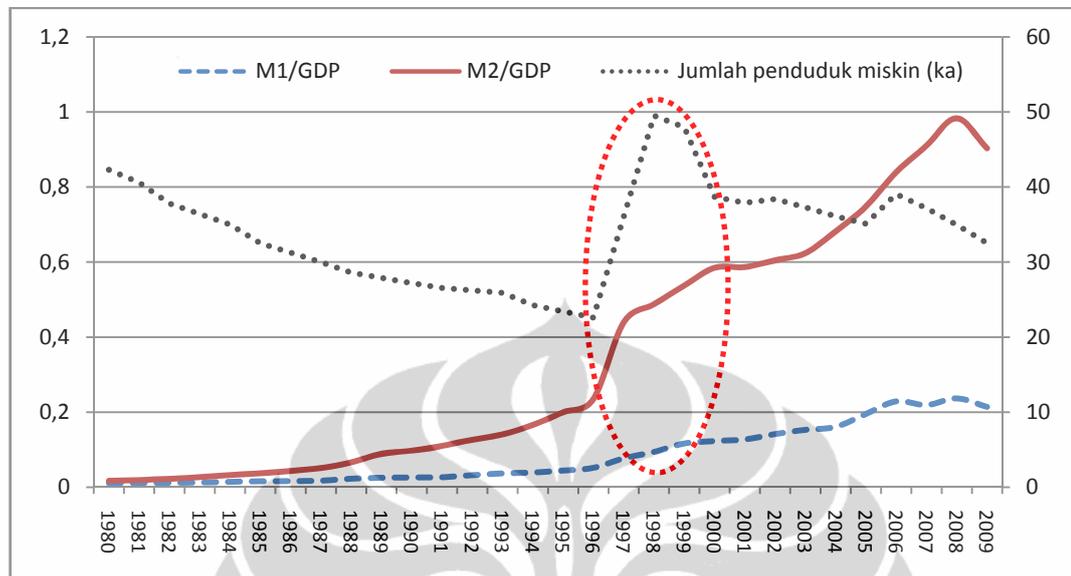
5.2. Kemajuan Sektor Perbankan, Krisis, IHK dan Kemiskinan.

Seperti yang telah disebutkan pada bab pendahuluan dan bab metodologi penelitian bahwa kemajuan sektor perbankan diwakili oleh variabel bebas M2/GDP, sebagai bentuk dari *financial deepening*, dan pertumbuhan kredit (RCR), sebagai bentuk dari *financial widening*.

Pada grafik berikut ini menggambarkan pada periode kondisi normal kemiskinan menurun sejalan dengan perkembangan tingkat penggunaan uang (M1/GDP dan M2/GDP), namun tidak pada kondisi krisis. Pada kondisi krisis tingkat penggunaan uang searah dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 72-73

Perkembangan Tingkat Penggunaan Uang
(M1/GDP dan M2/GDP), dan Jumlah Penduduk Miskin
Di Indonesia, 1980-2009



Sumber: BPS dan BI

Grafik 5.3

Untuk memastikan hubungan antara tingkat penggunaan uang dalam masyarakat (M2/GDP), meluasnya layanan perbankan dalam bentuk kredit kepada masyarakat (*financial widening*), kondisi krisis, serta pengaruh inflasi terhadap prosentase penduduk miskin berikut ini adalah hasil pengolahannya.

$$\begin{aligned}
 P_MIS = & 2.249 * M2_GDP - 3.737 * RCR + 0.695 * D_CRISIS \\
 & \#0.59 \quad \quad \quad * -10.19 \quad \quad \quad * 3.39 \\
 & + 0.078 * IHK + 13.597 + [AR(1)=0.857711822603] \dots \text{ (Persamaan 1x)} \\
 & * 6.95 \quad \quad \quad * 3.23 \quad \quad \quad * 19.86
 \end{aligned}$$

Adjusted $R^2 = 0.94$; DW Stat = 2.30; BG Test Prob. Chi -Square(2) = 0.40 > 5%

*, ** and *** indicate significance at the 1%, 5% and 10% levels, respectively. # indicate not significance; BG test (prob chi-square) > alpha 5% indicate no autocorelation

Dari hasil perhitungan di skala nasional, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara *financial deepening* dan *financial widening*, kondisi krisis, serta inflasi terhadap prosentase penduduk miskin dengan keamatan sebanyak 94 persen. Pada persamaan 1x, secara parsial pertumbuhan kredit (RCR), tingkat inflasi (IHK), dan kondisi krisis (D_CRISIS) signifikan

mempengaruhi prosentase penduduk miskin signifikan dengan alpha 1 persen. Sementara tingkat penggunaan uang masyarakat (M2/GDP) secara parsial tidak signifikan pada level alpha.

Meluasnya layanan perbankan kepada masyarakat dalam bentuk pertumbuhan kredit (RCR) berhubungan negatif dengan prosentase penduduk miskin. Jika pertumbuhan kredit meningkat sebanyak satu satuan maka penduduk miskin akan turun sebanyak 3,737 satuan (*ceteris paribus*).

Namun *financial deepening* (M2/GDP) karena tidak signifikan secara parsial, dan tanda koefisien positif tidak seperti yang diharapkan (negatif) maka menyulitkan untuk ditarik kesimpulan pengaruhnya terhadap indikator kemiskinan (*ceteris paribus*).

Sesungguhnya *financial deepening* memang lebih berkaitan dengan likuiditas perekonomian, dan lebih terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Karena sifat dari variabel jumlah uang beredar (M2)¹⁵² yang bersifat terlalu makro jauh untuk sampai ke indikator kemiskinan. Kemiskinan lebih berkaitan dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Di satu sisi, besarnya rasio M2/GDP berarti besar juga jumlah uang beredar dalam perekonomian (M2), jika jumlah uang beredar lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan perekonomian, maka akan berdampak inflatoir yang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Konsep GDP lebih menggambarkan kesejahteraan domestik (Indonesia) sebagai negara. Di lain sisi, meningkatnya GDP baik bagi kegiatan ekonomi atau dapat berdampak mengurangi angka kemiskinan. Kedua efek yang saling bertentangan inilah diindikasikan menyebabkan variabel independen M2/GDP menjadi tidak signifikan dalam model.

Kondisi krisis parah yang menimpa Indonesia menyebabkan penduduk miskin bertambah parah. Variabel dummy krisis (D_CRISIS) secara parsial signifikan pada $\alpha=1\%$. Jika Indonesia memasuki periode krisis parah, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebanyak 0,695 persen (*ceteris paribus*).

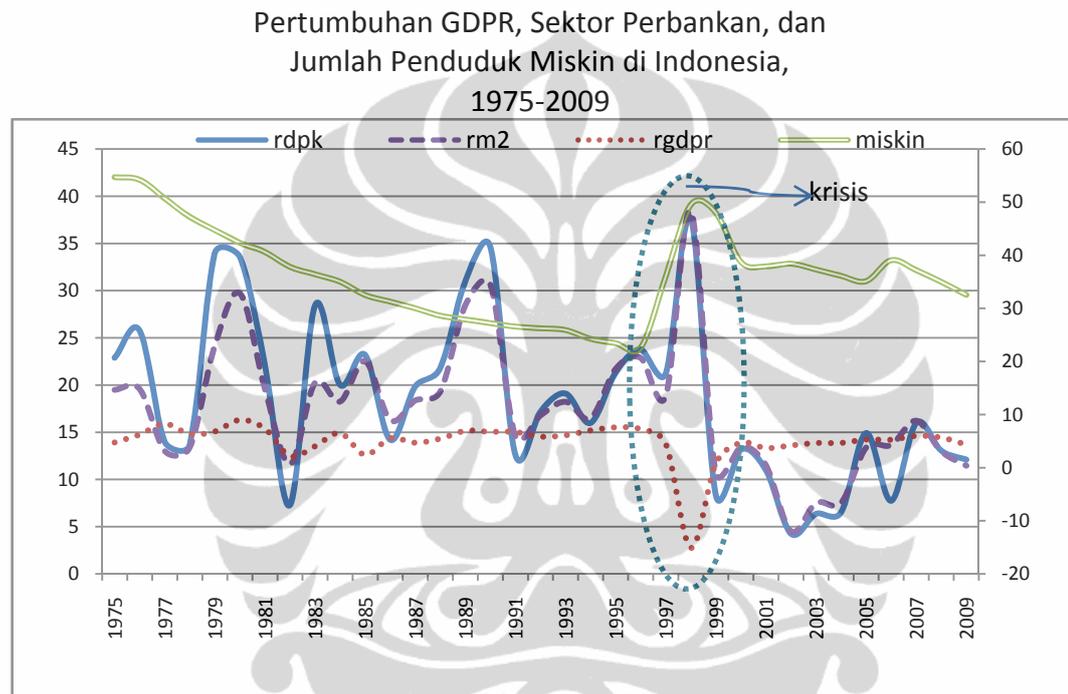
Selain itu, tingkat inflasi juga berhubungan positif terhadap prosentase penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin memperparah jumlah

¹⁵² Batasan M2 menurut Bank Indonesia adalah M1 + Uang Kuasi, Uang Kuasi adalah simpan dalam bentuk rupiah (Tabungan dan simpanan berjangka), dan simpanan dalam bentuk valuta Asing.

penduduk miskin. Jika inflasi meningkat sebesar satu satuan maka prosentase penduduk miskin akan bertambah sebanyak 0,078 persen (*ceteris paribus*).

5.3. Pertumbuhan Ekonomi, Kemajuan Sektor Perbankan, Instabilitas Politik, dan Kemiskinan.

Berikut ini adalah grafik perbandingan mengenai pertumbuhan ekonomi, kemajuan sektor perbankan, dan tingkat kemiskinan.



Sumber: BPS dan BI

Grafik 5.4

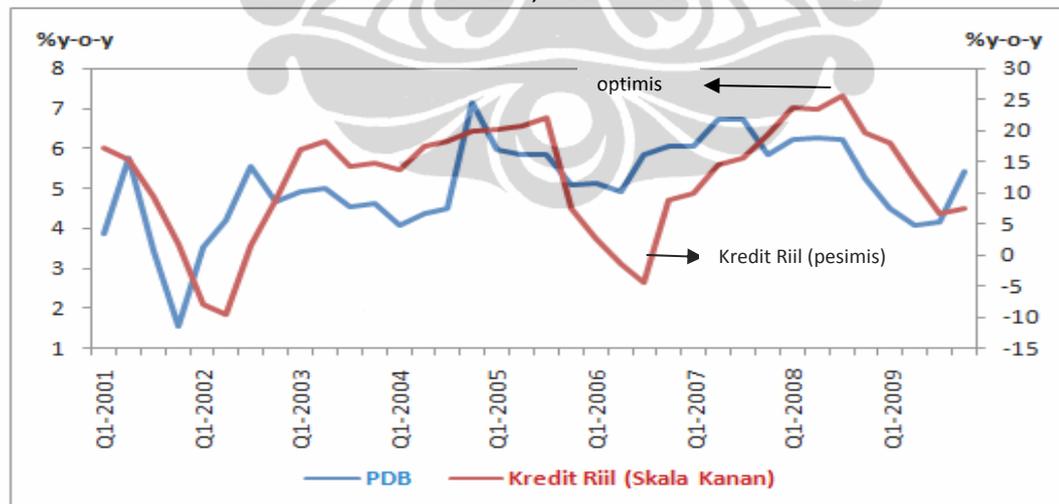
Dari grafis di atas secara langsung dapat dilihat bahwa arah perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sektor perbankan relatif mempunyai arah yang serupa namun keduanya berlawanan dengan pola grafik tingkat kemiskinan. Pada kondisi krisis ekonomi parah tahun 1997-2000¹⁵³, antara pola grafis kemiskinan dengan indikator kemajuan sektor perbankan relatif serupa, yang meningkat sangat tajam, namun bertolak belakang dengan pertumbuhan GDP, yang turun sangat tajam. Kemiskinan meningkat pada periode krisis karena terjadi pengangguran yang besar dalam perekonomian sebagai akibat dari menurunnya

¹⁵³ Menurut laporan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) tahun 2000 oleh Bank Indonesia, selama tahun 2000, fungsi intermediasi keuangan dari industri perbankan dan lembaga keuangan belum sepenuhnya berjalan normal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, sehingga tahun 2000 masih digolongkan masih masuk pada periode akhir krisis. Sementara tahun 1997 sebagai awal krisis, walaupun krisis melanda Indonesia pada semester kedua tahun 1997.

kinerja mesin ekonomi di banyak sektor seperti; konstruksi, properti dan manufaktur. Sementara di sektor perbankan, di awal-awal krisis, terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, terjadi penarikan (*rush*) dana masyarakat yang ada di bank (*bank run*), pada grafik terjadi penurunan tajam DPK dan M2. Masyarakat, umum maupun pengusaha, mengalihkan assetnya ke jenis yang lebih aman, seperti emas, valuta asing yang dipandang kuat nilainya, ke bank pemerintah atau hanya sebatas menahan dalam bentuk uang tunai. Saat krisis juga marak kegiatan spekulasi mata uang. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan mencegah aksi spekulasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI. Perlahan tapi pasti dana masyarakat kembali ke sistem perbankan (DPK dan M2 meningkat).

Di lain sisi perbankan berhadapan dengan biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, mengakibatkan mereka mengalami kesulitan menyalurkan kredit. Sementara para pengusaha berhadapan dengan kondisi usaha yang belum pasti sehingga mereka mengurangi atau malah menutup usahanya, yang sering berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Lesu kegiatan usaha saat krisis tersebut tergambar pada garis pertumbuhan GDP yang menurun tajam.

Pergerakan Bersama Kredit dan PDB
Di Indonesia, 2001 - 2009



Sumber: Yuda Agung, 2010

Grafik 5.5

Dalam kondisi normal kegiatan sektor perbankan mengikuti dinamika kegiatan perekonomian nasional. Dalam grafik diatas dapat dilihat (garis merah)

bahwa kegiatan penyaluran kredit oleh perbankan cenderung lebih optimis saat pertumbuhan ekonomi meningkat, namun sebaliknya akan lebih pesimis saat kondisi ekonomi menurun.

Dalam penelitian beberapa penelitian sebelumnya kemajuan di berbagai sektor ekonomi berdampak baik bagi pengurangan penduduk miskin. Pada kesempatan ini juga dicoba menghubungkan antara produk nasional bruto riil (GDPR), kredit yang disalurkan perbankan, periode krisis terhadap prosentase kemiskinan.

Dengan menggabung beberapa variabel bebas yang mewakili sektor riil dan sektor keuangan dalam modelling akan lebih memberikan gambaran hubungan ekonomi yang lebih baik terhadap indikator kemiskinan.

$$P_MIS = -8.779*RGDPR - 3.588*RCR + 0.598*D_CRISIS + 0.060*IHK + 15.5517773301 + [AR(1)=0.84811987149] \dots\dots(Persamaan 3x)$$

#-1.08 *-5.55 **1.98 **2.46 *4.80 *19.13

Adjusted R² = 0.94; DW Stat = 2.28; BG Test Prob.Chi -Square(2)= 0.42 > 5%

*, ** and *** indicate significance at the 1%, 5% and 10%levels, respectively. # indicate not significance; BG test (prob chi-square) > alpha 5% indicate no autocorelation

Dari perhitungan diperoleh hubungan yang erat antara produk domestik bruto riil, bersama dengan indikator sektor perbankan, dummy instabilitas dan tingkat harga terhadap prosentase penduduk miskin dengan keeratan sebesar 94 persen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan GDPR, dan indikator sektor perbankan, yang diwakili pertumbuhan kredit (RCR), mempunyai pengaruh negatif (mengurangi) terhadap prosentase penduduk miskin. Sementara keadaan krisis (instabilitas) (D_CRISIS) dan tingkat inflasi (IHK) berpengaruh positif (menambah) penduduk miskin.

Pertumbuhan GDPR dari tanda pada koefisien memberikan arah sesuai dengan yang diharapkan, yakni negatif. Arah negatif koefisien hasil penelitian ini sedikit banyak mengkonvirmasi hasil penelitian sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun

sayangnya tidak signifikan pada level alpha. Tidak signifikannya signifikannya variabel GDP, berkaitan erat dengan batasan dari variabel GDP yakni mencakup nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia.¹⁵⁴ Konsep GDP lebih mengarah pada ukuran kesejahteraan wilayah (*regional welfare*), bukan ukuran kesejahteraan masyarakat/manusia.

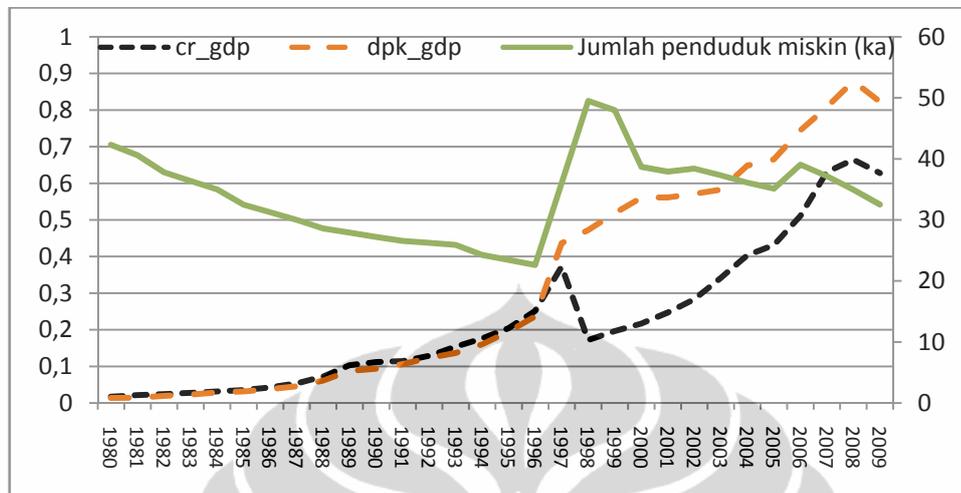
Indikator kemajuan sektor perbankan, pertumbuhan kredit, dari hasil perhitungan secara parsial signifikan pada tingkat kepercayaan $\alpha=1\%$. Peningkatan 1 unit pada pertumbuhan kredit akan mengurangi kemiskinan sebanyak 5,65 persen (*ceteris paribus*).

Krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan instabilitas politik yang cukup parah. Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 terjadi pergeseran sistem politik pemerintahan, dari bersifat otoriter berubah ke demokratis, berbagai elemen masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan kehendaknya. Namun terkadang cenderung terlalu bebas, dalam kurun waktu itu kekacauan merebak di berbagai belahan Indonesia. Krisis parah akan menyebabkan prosentase penduduk miskin akan bertambah banyak. Variabel dummy krisis secara parsial signifikan pada $\alpha=5\%$. Jika Indonesia memasuki periode krisis parah, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebanyak 1,98 persen (*ceteris paribus*).

Berikut ini grafik dari rasio kredit sebagai bagian dari GDP, Kredit/GDP, rasio ini mengukur seberapa besar kredit terhadap riil produk domestik bruto, bersama dengan jumlah penduduk miskin.

¹⁵⁴ Diadopsi dari definisi Blancard, Oliver (2006), p A1

Perkembangan Rasio Kredit dan DPK terhadap Produk Domestik Bruto
(CR/GDP dan DPK/GDP), dan Jumlah Penduduk Miskin
Di Indonesia, 1980-2009



Sumber: BPS dan BI

Grafik 5.6

Grafik di atas menunjuk bahwa pada periode kondisi normal kemiskinan menurun sejalan (negatif) dengan perkembangan rasio CR/GDP dan DPK/GDP, namun pada kondisi awal krisis DPK/GDP meningkat searah (positif), tetapi CR/GDP sebaliknya (negatif) cukup dalam.

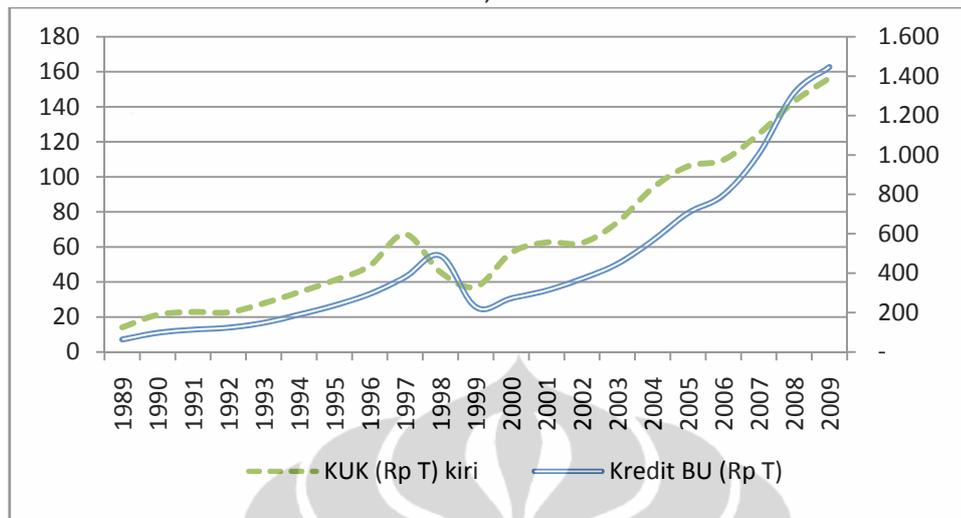
5.4. Kredit Usaha Kecil, Pengangguran, dan Instabilitas Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Setelah dari modeling di atas bahwa pertumbuhan kredit (RCR) bank umum baik untuk menurunkan prosentase penduduk miskin (*ceteris paribus*). Berikut ini akan disajikan hubungan antara kredit usaha kecil (KUK) dengan indikator kemiskinan.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya¹⁵⁵ pemberian kredit kepada pada masyarakat miskin dapat mengangkat dirinya dari lembah kemiskinan.

¹⁵⁵ Baca kembali penjelasan penelitian Jalilian & Kirkpatrick (2001); Robinson, Marguete S (2001) halaman 18; Mk Nelly dan Dunford (1999) pada halaman 25.

Kredit Usaha Kecil dan Kredit
Di Indonesia, 1989 – 2009



Sumber: BI

Grafik 5.7

Apabila dilihat dari pola kurva pemberian kredit Bank Umum (BU) dengan Kredit Usaha Kecil, seperti pada gambar di bawah ini, keduanya mempunyai bentuk yang relatif sama.

Untuk melihat bagaimana kaitan antara pertumbuhan pemberian kredit kepada usaha kecil (RKUK) terhadap indikator kemiskinan, bersama dummy krisis (D_CRISIS) dan prosentase angka pengangguran (P_UNEMPL) sebagai kontrol variabel, berikut ini adalah hasil perhitungannya:

$$\begin{aligned}
 P_MIS = & -5.569 * RKUK + 5.543 * D_CRISIS \\
 & \quad \quad \quad *3.44 \quad \quad \quad *7.55 \\
 & + 0.289 * P_UNEMPL + 14.5180484027 \dots\dots\dots (persamaan 7xa) \\
 & \quad \quad \quad **2.55 \quad \quad \quad *15.24
 \end{aligned}$$

Adjusted R² = 0.66; DW Stat = 1.91; BG Test Prob.Chi -Square(2)= 0.79 > 5%

*, ** and *** indicate significance at the 1%, 5% and 10% levels, respectively. # indicate not significance; BG test (prob chi-square) > alpha 5% indicate no autocorrelation

Dari hasil perhitungan terbukti bahwa pertumbuhan Kredit Usaha Kecil dapat menurunkan prosentase penduduk miskin, koefisien KUK bertanda negatif dan secara parsial yang signifikan pada $\alpha=1\%$. Bersama dengan variabel dummy

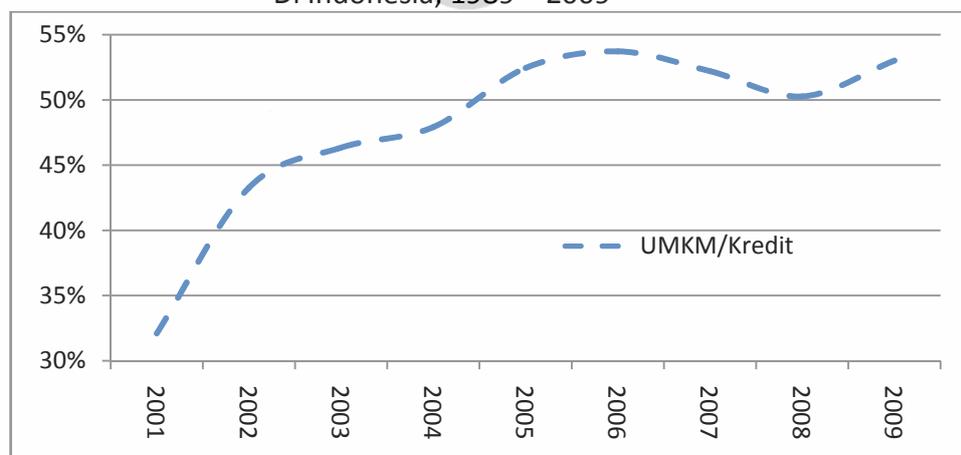
krisis, pengangguran, variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebanyak 66 persen.

Jika terjadi peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit usaha kecil sebanyak 1 persen akan menurunkan prosentase penduduk miskin sebanyak 5,57 (*ceteris paribus*). Patut dicermati angka koefisien RKUK (-5.6) jauh lebih besar dibandingkan dengan RCR (-3.6), hal ini memberikan sinyalemen bahwa kemampuan KUK yang umumnya digunakan oleh pengusaha kecil dalam menurunkan penduduk miskin lebih kuat dibandingkan dengan kredit pada umumnya. Hal ini dapat dimaklumi KUK relatif disalurkan langsung kepada penduduk dengan usaha ekonomi kecil, dan dapat langsung memberikan kontribusi meningkatkan pendapatannya, dibandingkan kredit secara umum yang melalui pertumbuhan ekonomi atau tidak langsung. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa pemberian kredit kepada masyarakat kecil dapat meningkatkan kesejahteraanya.

Variabel bebas prosentase pengangguran (P_UNEMPL) berhubungan positif terhadap prosentase penduduk miskin dan signifikan secara partial pada $\alpha=5\%$. Peningkatan prosentase pengangguran sebanyak satu satuan akan menambah prosentase penduduk miskin sebanyak 0.289 (*ceteris paribus*).

Berikut ini adalah grafik dari Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Total kredit.

Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Total
Di Indonesia, 1989 – 2009



Sumber : BI

Grafik 5.8

Dari grafik MKM/Kredit tergambar bahwa saat ini perbankan Indonesia lebih cenderung memberikan kredit UMKM, yakni kredit dengan nilai nominal di lebih kecil dari Rp50 juta untuk kredit mikro, kecil dari Rp500 juta untuk kredit kecil dan kecil dari Rp5 milyar rupiah untuk kredit menengah.

Bagi perbankan lebih banyak pemberian kredit pada UMKM semakin menyebar resiko kredit. Sementara bagi perekonomian berarti penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

5.5. Belanja Pemerintah, Indikator Sektor Perbankan, IHK, dan Instabilitas Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya salah satu tugas pemerintah adalah mengurangi jumlah penduduk miskin semaksimal mungkin. Pengeluaran pemerintah dapat langsung ditujukan untuk menurunkan penduduk miskin, termasuk ke pusat-pusat (daerah) kemiskinan, maupun secara tidak langsung menurunkan jumlah penduduk miskin.

Bentuk dari program kerja pemerintah menurunkan penduduk miskin dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan selalu ada. Selain itu juga ada program pemerintah yang ditujukan untuk menahan membengkaknya jumlah penduduk miskin karena terjadi krisis yang menyebabkan banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya dan atau meningkatnya harga komoditi penting seperti harga Bahan Bakar (*administratif price*). Hampir tidak ada komoditi yang tidak berhubungan dengan bahan bakar, karenanya kenaikan akan memantik kenaikan harga secara umum (inflasi).

Kenaikan harga secara umum akan mengurangi daya beli masyarakat, selanjutnya akan menyebabkan sekelompok masyarakat miskin semakin sulit keluar dari garis kemiskinan atau yang baru keluar kembali terperosok ke jurang kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan atau pembangunan dapat menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data dari BPS, secara umum tingkat kemiskinan di pedesaan Indonesia lebih tinggi dibanding di perkotaan. Ketimpangan ini juga

yang mendorong urbanisasi, baik dari desa ke kota maupun dari desa ke luar negeri.

Sementara bentuk belanja yang tidak secara langsung adalah belanja pembangunan yang dapat menciptakan kesempatan kerja, serta pengeluaran rutin lainnya yang dapat meningkatkan daya beli pegawai yang bekerja di pemerintahan. Kesemua bentuk pengeluaran pemerintah tersebut akan menimbulkan proses multiplier terhadap tingkat pendapatan nasional dan kemajuan ekonomi negara yang berarti baik bagi penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam keadaan tertentu seperti pada saat terjadi krisis ekonomi 1997 sampai dengan tahun 1999, pengeluaran pemerintah yang bersifat *autonomous* dapat menjadi obat *analgesik*¹⁵⁶ generik yang dapat menahan laju bertambahnya penduduk miskin.

$$\begin{aligned}
 P_MIS = & 3.70*LOG(GOV) - 4.196*LOG(CR) + 1.285*D_CRISIS \\
 & \quad \quad \quad *2.84 \quad \quad \quad ** -2.22 \quad \quad \quad *2.71 \\
 + & 0.068*IHK + 23.555 + [AR(1)=0.792135828845] \dots\dots\dots (Persamaan 6x) \\
 & \quad \quad \quad *3.80 \quad \quad \quad **2.16 \quad \quad \quad **9.42
 \end{aligned}$$

Adjusted R² = 0.93; DW Stat = 2.21; BG Test Prob.Chi -Square(2)= 0.23 > 5%

*, ** and *** indicate significance at the 1%, 5% and 10%levels, respectively. # indicate not siqnificance; BG test (prob chi-square) > alpha 5% indicate no autocorelation

Dari hasil perhitungan model tersebut arah koefisien variabel bebas log(GOV), positif tidak negatif seperti yang diharapkan. Hal ini menyulitkan menarik kesimpulan bahwa belanja pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti dugaan semula. Pengeluaran pemerintah memang tidak secara spesifik ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, walaupun memang spesifik, biasanya tidak dilakukan secara berkelanjutan karena mempertimbangkan pemerataan antar daerah. Pengeluaran pemerintah secara umum terbagi dua yakni pengeluaran rutin, yang berupa gaji pegawai dan pengeluaran pembangunan berupa pembangunan fisik.

¹⁵⁶ Analgesik adalah obat penghilang rasa nyeri, namun tidak menghilangkan penyebab nyeri.

Sementara variabel bebas lainnya, indikator sektor perbankan (log CR), dummy krisis dan IHK, secara konsisten memberikan arah, dan uji parsial signifikan pada $\alpha=1\%$ atau 5% , relatif tidak jauh berbeda seperti perhitungan-perhitungan sebelumnya.

Dari perhitungan ini dapat diambil pelajaran bahwa untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional jika pemerintah ingin menggunakan variabel pengeluaran pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan langsung pada pusat-pusat kemiskinan, dengan memetakan, dan melaksanakan program untuk mengobati sumber permasalahan (penyakit) penyebab kemiskinan. Untuk menghilangkan kemiskinan tidak cukup hanya pemberian program-program populis dan sesaat, atau yang bersifat *analgesik*.

Menyadari sifat pengeluaran pemerintah yang terbatas jumlahnya, dan hampir sulit bagi pemerintah untuk langsung berhubungan dengan kegiatan produktif golongan masyarakat miskin, maka saat ini pemerintah telah mempertimbangkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui lembaga perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), revitalisasi perkebunan. Dalam ketiga program tersebut pemerintah menyediakan/membayar premi asuransi atas setiap kredit yang disalurkan oleh bank mitra sesuai dengan programnya. Namun sumber kredit tetap berasal dari masing-masing bank yang menyalurkannya. Mengingat metode ini menghendaki hadirnya lembaga penjamin, maka baik pemerintah maupun Bank Indonesia mendorong terbentuknya lembaga penjaminan kredit.¹⁵⁷

Secara grafis, pada periode tanpa krisis pergerakan DPK dan Kredit relatif searah. Karena secara prinsip bank akan senantiasa menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk DPK dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama dari perbankan.

Krisis akan mendorong lebih banyak jumlah penduduk yang masuk ke dalam golongan miskin dibandingkan yang dapat ditahan dengan kebijaksanaan kemajuan sektor keuangan, dan pengeluaran pemerintah. Pada saat krisis parah sebagaimana yang dialami Indonesia pada tahun 1997-2000, sebagai bank sentral Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

¹⁵⁷ Lebih lengkap penjelasan Lembaga Penjamin Kredit ada pada sub bab 4.2.3.

untuk mengurangi likuiditas yang ada di masyarakat yang dapat menutup kemungkinan digunakan untuk kegiatan spekulasi. Peningkatan SBI akan mendorong peningkatan suku bunga DPK, yang berarti pula perbankan beroperasi dengan biaya dana yang besar (Cost of Fund), hal ini mendorong bunga kredit tinggi. Tingginya suku bunga kredit, menyebabkan permintaan akan kredit akan menurun drastis. Kondisi ini akan memperburuk kondisi usaha secara umum.

Kenyataannya pada masa krisis pemerintah tidak dapat dengan segera menambah pengeluarannya, namun hanya menunda dan atau mengalihkan pengeluarannya kepada hal-hal yang dapat menahan laju kemiskinan, seperti bantuan tunai langsung (BLT) dan operasi pasar komoditi pokok atau tertentu. Selain itu pada masa krisis akan diperparah dengan meningkatnya harga (IHK) secara umum, baik karena *demand pull inflation* karena terjadi shock permintaan barang-barang pokok sebagai bentuk dari motif berjaga-jaga masyarakat, ataupun *cost push inflation* karena mahalnya input atau terganggunya distribusi. Pada masa krisis pula kredit tidak dapat disalurkan secara sempurna karena para pengusaha menunda menarik kredit yang telah disetujui atau mengurung niatnya untuk mengajukan kredit.

Tingkat harga menentukan besar tidaknya daya beli masyarakat. Secara riil daya beli masyarakat adalah pendapatannya dibagi dengan tingkat harga. Dengan demikian peningkatan harga akan dapat mengurangi daya beli masyarakat, atau menyebabkan jatuh kembali di bawah garis kemiskinan.

BAB 6

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

- a. Dari model regresi yang menggunakan variabel tidak bebas (*dependent variabel*) prosentase penduduk miskin (*headcount index*) serta variabel bebas (*independent variable*), GDPR, Pengeluaran pemerintah, indikator sektor perbankan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi diperoleh;
 - GDPR dan Indikator sektor perbankan yang bersifat *financial widening* (RCR dan RKUK) mempunyai hubungan terbalik (negatif) dengan indikator kemiskinan (*headcount index*).
 - Indikator kemajuan perbankan yang bersifat *financial deepening* (M2/GDP) tidak signifikan mempengaruhi indikator kemiskinan. Hal ini karena sifat dari M2 yang terlalu makro jauh dari variabel kemiskinan, selain itu sifat inflatoir M2 yang dapat menyebabkan bertambahnya (positif) kemiskinan. Sementara GDP berkaitan dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang berdampak menurunkan (negatif) angka kemiskinan. Kedua dampak yang saling bertentangan ini diindikasikan menyebabkan variabel bebas M2/GDP menjadi tidak signifikan terhadap indikator kemiskinan.
 - Pengeluaran pemerintah sulit disimpulkan mempunyai hubungan tertentu dengan indikator kemiskinan, karena tanda koefisien bertentangan dengan harapan.
 - Tingkat Inflasi, pengangguran terbuka dan Instabilitas Ekonomi dan Politik mempunyai hubungan searah (positif) dengan prosentase penduduk miskin.
 - Variabel independen yang lebih baik digunakan sebagai indikator kemajuan sektor perbankan adalah *financial widening* yakni berturut-turut adalah RKUK, RCR, bersama dengan variabel independen lainnya seperti IHK, prosentase pengangguran dan dummy krisis.

- Secara umum, peningkatan sektor riil bersama dengan kegiatan di sektor moneter dapat diandalkan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin (tanda negatif). Tanda negatif kedua parameter ini adalah seperti yang diharapkan. Uji parsial RCR signifikan dibandingkan dengan RGDPR, memberi pelajaran bahwa pemberian kredit dapat lebih menyakinkan (signifikan) langsung dan lebih cepat menurunkan kemiskinan dibandingkan RGDPR. Pemberian kredit oleh perbankan akan meningkatkan Investasi (KI) dan Modal Kerja (KMK), termasuk juga kredit untuk keperluan Ekspor yang dilakukan oleh sektor swasta, dan konsumsi Rumah Tangga (Kredit Konsumsi), ekonomi tumbuh tersedia lapangan kerja dalam jumlah cukup besar, selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan GDP, yang berikutnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengaruh Kredit melalui GDP untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat disebut dampak tidak langsung.
 - Variabel bebas KUK lebih baik dibandingkan dengan Kredit untuk mewakili indikator kemajuan sektor perbankan dalam hubungan dengan variabel bebas prosentase penduduk miskin.
- b. Kemajuan sektor perbankan, melalui meluasnya layanan per kreditan, secara nyata mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberian kredit/pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, juga mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kredit kepada sektor produktif akan berdampak akan menyebabkan membawa alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, selanjutnya akan menggerakkan mesin ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berdenyut akan menyebabkan produk domestik bruto meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini akan menyebabkan tersedianya lapangan kerja yang selanjutnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Jalur kredit mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dapat disebut dengan jalur tidak langsung. Sementara untuk jalur langsung adalah kredit yang disalurkan perbankan kepada masyarakat/kelompok masyarakat miskin untuk membiayai usahanya. Saat usaha maju dan

menimbulkan peningkatan pendapatan, selanjut menyebabkan masyarakat keluar dari garis kemiskinan, maka jalur ini disebut jalur langsung.

- c. Pertumbuhan ekonomi (kegiatan produksi) di Indonesia sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin turun drastis pada periode pertumbuhan ekonomi tinggi, antara tahun 1976 sampai dengan 81, hal sebaliknya saat Indonesia mengalami krisis parah antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Saat dunia mengalami krisis global pada tahun 2008-2009, Indonesia tidak mengalami lonjakan penduduk miskin, karena Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dibandingkan negara lain, selain itu pada krisis global kali ini bersama dengan pemerintah, Bank Sentral Republik Indonesia berhasil menjaga kondisi keuangan relatif stabil.
- d. Kemampuan pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan akan menjamin ekonomi dapat tetap tumbuh, sebagaimana yang berhasil dilalui saat terjadi krisis global 2007-2008.
- e. Tingginya tingkat Inflasi, serta besarnya jumlah pengangguran akan memburuk jumlah angka kemiskinan Indonesia. Harga-harga barang dan jasa secara umum meningkat akan mengurangi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau baru keluar dari garis kemiskinan. Tingginya pengangguran menyebabkan potensi untuk menghasilkan pendapatan hilang, atau menyebabkan kemakmuran yang diperoleh masyarakat yang bekerja secara absolute menjadi berkurang.

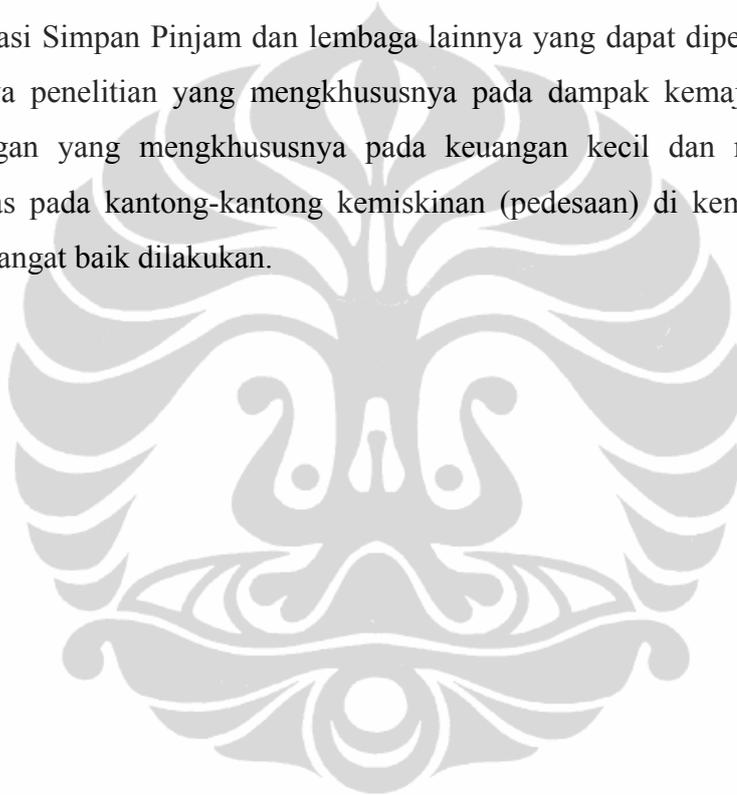
6.2. Rekomendasi

- a. Penyaluran kredit oleh perbankan baik langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan. Namun di lain sisi peningkatan kegiatan ekonomi (*supply side*), dan meningkatnya daya beli masyarakat (*demand side*), dapat memacu meningkatnya tingkat inflasi. Untuk itu hendaknya bank sentral republik Indonesia harus dapat menjaga jumlah uang beredar (M1 atau M2) pada tingkat pertumbuhan yang sesuai bagi kegiatan ekonomi, dengan tingkat inflasi stabil rendah.

- b. Pengeluaran pemerintah, dalam jangka pendek, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, di lain pihak perbankan adalah lembaga intermediasi keuangan yang dapat mendistribusikan kebutuhan modal masyarakat secara efisien, efektif dan berkelanjutan, hendaknya dikemudian hari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sedapat mungkin disalurkan melalui perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya yang menganut prinsip pemberian kredit yang sehat. Kebijakan pemerintah seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai versi yang lebih baik dari sebelum harus senantiasa didukung, selain itu juga perlu dikaji bentuk-bentuk kebijakan lain yang serupa untuk keperluan golongan masyarakat tertentu.
- c. Mengingat tingkat kemiskinan cenderung lebih besar di daerah pedesaan, belum terlambat pemerintah memberi insentif dan membuka akses seluasnya untuk menggeser kegiatan pembangunan dan investasi baru dari hanya daerah perkotaan, ke pusat-pusat kemiskinan tersebut dengan mempertimbangkan keahlian dan keterampilan masyarakatnya.
- d. Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara absolute akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*nilai tambah*) di berbagai sektor ekonomi, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja selanjutnya akan mengurangi angka kemiskinan nasional. Berkaitan resiko kredit yang hadapi oleh lembaga perbankan, selain dengan mendirikan asuransi kredit di tingkat nasional, dari kelembagaan, perlu dirangsang berdirinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) di masing-masing daerah. Dari sisi kepemilikan LPKD sangat potensial dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kotamadya sampai dengan kabupaten. Karena LPKD erat kaitan dengan analisis kelayakan suatu kredit, dari sisi manajemen hendaknya didukung dari sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman di bidang perbankan atau asuransi kredit.
- e. Selain meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia BPR/BPRS, pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat miskin oleh lembaga keuangan mikro merupakan suatu yang laten saat ini. Namun demikian khusus lembaga keuangan mikro non BPR perlunya payung

legal dalam bentuk perundang-undangan, dan pihak yang mengawasi kegiatan perlu diberlakukan segera, untuk menghindari resiko ketidakpastian hukum di kemudian hari.

- f. Penelitian ini tidak mengkhususkan untuk meneliti dampak kemajuan sektor keuangan terhadap tingkat kemiskinan di daerah pedesaan atau kantong-kantong kemiskinan di perkotaan, kerana keterbatasan data pada sektor keuangan kecil dan mikro seperti Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank (BMT, BQ, Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan). Adanya penelitian yang mengkhususnya pada dampak kemajuan sektor keuangan yang mengkhususnya pada keuangan kecil dan mikro atau terbatas pada kantong-kantong kemiskinan (pedesaan) di kemudian hari akan sangat baik dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Arestis, Philip and Caner, Asena, *Financial Liberalization and The Geoghrapy of Poverty*, Cambridge Centre For Economic and Public Policy, CCEPP WP-09, University of Cambridge, 2009.

Agusman, *Bank Indonesia dan Fungsi Macprudential*, Denpasar, November 2010.

Bank Indonesia, *Proceedings: Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Se-Jawa Tengah dan Daerah Yokyakarta*, Semarang, 12 Desember 2007.

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Jakarta

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Jakarta.

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1998/1999*, Jakarta.

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2000 s/d 2002*, Jakarta

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2003 s/d 2009*, Jakarta

Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010.

Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2009.

BPS, *Statistic During 50 Years Indonesian Indipendence*.

BPS, *Susenas beberapa tahun*.

BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, 2006.

Blanchard, Oliver, *Macroeconomics*, 4th Edition, 2006.

Bank Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998*. Direktorat Hukum – Bank Indonesia, September 2009.

Bank Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, November 2008.

Chales Enoch, et al, *Indonesia, Anatomy of Banking Crisis, Two Years Living Dangerously 1997-1999*, IMF Working Papers, WP/01/52, Internasional Monetary Fund, Wakshington D.C, May 2001.

Covey, Stephen R, *The 8th Habit, Melampaui Efektivitas Menggapai Keagungan*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Departemen for Internasional Development (DFID), *The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction*, Glasgow, UK, August 2004.

Dornbusch, R; Fischer Stanley and Startz, *Mackroekonomi*, PT.Media Global Edukasi, 2008.

Danusaputro, Marjanto dkk, *Judul Monetisasi Pedesaan - Bunga Rampai Keuangan Pedesaan*, LPPI, Jakarta, Juli 1991

Djiwandono, Soedradjad J., dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode II:1959-1966*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005.

Djiwandono, Soedradjad J., dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode III:1966-1983*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006

Djiwandono, Soedradjad J., dkk, *Sejarah Bank Indonesia periode IV: 1983-1997, Bank Indonesia Pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*, 2006, UKMBI.

Djiwandono, Soedradjad J., dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997 – 1999, Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan*, 2006, Unit Khusus Museum Bank Indonesia (UKMBI).

Djiwandono, J.Soedrajad., *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta, LP3ES, 2002.

Gujarati, Damodar N, *Basic Econometrics*, Internasional Edition 2003, McGraw-Hill, 4th Ed.

GTZ-Profi, *Background Paper on Microfinance Policy and Strategy*, Jakarta, Version 2.1 07-2005.

Hatta, Muhammad, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Intidayu Press, Jakarta, 1985, Cetakan ke 3.

Haryanto, *Indonesian Regional Economic Development: A Neoclassical Growth Analysis*, 2001.

Holloh, Detlev Dr., *Profi Baseline Survey Small Institution in East Java, Bali and West Nusa Tenggara*, GTZ Profi, Denpasar, June 2000.

Holloh, Detlev Dr., *Microfinance Intitution Study - The Microfinance Sector in Indonesia*, GTZ Profi, Denpasar, March 2001.

Insukindro, *Pengantar Ekonomi Moneter, Teori, Soal dan Penyelesaiannya*, BPFE, Yokyakarta, Ed. 1, 1987.

Junaidi, A., *Prospek Rintisan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah*, http://www.smecca.com/deputi7/file_InfokopEdisi%2022/prospek_rintisan.htm

Jansen, Stefan & Hamp, Michael, *Microfinance in Rural Financial System and the Development of Local Ekonomi, Key Issues for a Comprehensive Strategy to Develop the Indonesia Microfinance Industry*, GTZ-ProFI, Jakarta.

Jeanneney, Sylviane Guillanmont and Kpodar Kangni, *Financial Development, Financial Instability and Poverty*, 26 October 2005, CSAE WPS/2005-09.

Jalilian, Hossein, *Financial Development, Inequity and Poverty Cross country analysis using panel data*.

Lembaga dana dan kredit pedesaan - Ringkasan Seminar, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 1987, disunting oleh Anwar Hafid, Jusuf M. Colter, dan Pandu Suharto.

- Mankin, N Gregory, *Makroekonomi*, Edisi ke 6, Penerbit Erlangga, 1997.
- Marsius, Joni et al, *Mengevaluasi Pendekatan Taktis Manajemen Strategik dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dilihat dari Kacamata Lembaga Keuangan Mikro*, Makalah Kelompok 6, MPKP FE UI, Jakarta, 2008.
- Marsius, Joni, et al, *Baseline Mengenai Kondisi Internal, Persaingan dan Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 3 No.2, September 2000, Bank Indonesia.
- Mishkin, S Frederic, *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, Peason Internasoinal Ed, 8th Ed., 2007.
- Nachhrowi, Djalal dan Hadius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, LP FE UI, Jakarta, 2006.
- Nasution, Muslimin, “*Peranan Kelembagaan Koperasi dan Pengelolaan Keuangan di Pedesaan*”, LPPI, Juli 1986.
- Nursyahrizal dan Chyssanti, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*, Katalog BPS: 3205015, BPS, Jakarta, November 2009.
- Perry Warjiyo dkk, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*, PPSK-BI, 2004.
- Panglaykim, J.E – Pangestu, *Perkembangan Industri Perbankan Dana Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Andy Offset Yokyakarta, 1984, Ed 1.
- Robinson, Marguetite S, *Revolusi Keuangan Mikro – Pembiayaan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin (versi Bhs Indonesia)*, The World Bank, GTZ, Open Society Institute, 2001.
- Robinson, Marguerite S, *The Draft Microfinance (LKM) Law and Some Thought on Option for GTZ-ProFI to support Microfinance in Indonesia*, GTZ-ProFI, Jakarta, 2 November 2003.

Rofikoh Rokhim, *Systemically Important Financial Institution (SIFI) Supervision*, MRC-Departemen Manajemen-FEUI, Denpasar, November 2010.

Syaril Sabirin, *Perjuangan Keluar dari Krisis, Percikan Pemikiran*, Yokyakarta, BPFE Yokyakarta, 2003.

Soekro, Shinta R.I. dkk, *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*, Bank Indonesia, Gramedia, 2008

Suseso dan Abdullah P, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, seri kebanksentralan No.7, PPSK-BI, 2003.

Sumardjan, Selo, "*Simpanan Dan Pinjaman Masyarakat Desa*", LPPI, Juli 1986.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Bina Grafika, 1981.

Suhariyanto, Kecuk, et al, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, Sub Direktorat Analisis Statistik, Katalog BPS:1306030, Desember 2009.

Todaro, M P dan Smith, Stepen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan, Penerbit Erlangga, 2004.

Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi ke dua, UPP STIM YKPN, Yokyakarta, Maret 2009.

_____, *Undang-undang Republik Indonesia No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, 2004.

_____, *Undang-undang Dasar 1945 perubahan I, II, III, dan IV*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

LAMPIRAN DAFTAR VARIABEL

| No | Variabel | Alias | Definisi | Sumber |
|----|------------------------------------|----------|---|-----------|
| 1 | M1 | m1 | Jumlah uang beredar M1 | BI |
| 2 | M2 | m2 | Jumlah uang beredar M2 | BI |
| 3 | GDPR2000 | gdpr | GDP Riil tahun dasar 2000 | BPS |
| 4 | GOV | gov | Belanja Negara (Pemerintah) | BI |
| 5 | DPK | dpk | Dana Pihak Ketiga Bank Umum | BI |
| 6 | Kredit | cr | Kredit yang disalurkan Bank Umum | BI |
| 7 | KUK | kuk | Kredit Usaha Kecil | BI - DKBU |
| 8 | KMKM | ukmk | Kredit Mikro Kecil dan Menengah | BI - DKBU |
| 9 | IHK | ihk | Indeks Harga Konsumen | BPS |
| 10 | PDBDef | pdbdef | PDB Deflator | BPS |
| 11 | GDP/Jumlah Penduduk | y_cap | GDP Riil per Jumlah Penduduk | BPS |
| 12 | Kredit/GDP | cr_gdp | Kredit per GDP Riil | BPS, BI |
| 13 | KUK/Kredit | kuk_cr | KUK per Kredit | BI |
| 14 | KMKM/Kredit | umkm_cr | KMKM per Kredit | BI |
| 15 | DPK/GDP | dpk_gdp | DPK per GDP Riil | BPS, BI |
| 16 | M1/GDP | m1_gdp | M1 per GDP Riil | BPS, BI |
| 17 | M2/GDP | m2_gdp | M2 per GDP Riil | BPS, BI |
| 18 | Gov/GDP | gov_gdp | Belanja Negara per GDP Riil | BPS, BI |
| 19 | Pertumbuhan M1 | rm1 | Pertumbuhan M1 year on year | BI |
| 20 | Pertumbuhan M2 | rm2 | Pertumbuhan M2 year on year | BI |
| 21 | Pertumbuhan Kredit | rkr | Pertumbuhan Kredit year on year | BI |
| 22 | Pertumbuhan KUK | rkuk | Pertumbuhan KUK year on year | BI - DKBU |
| 23 | Pertumbuhan DPK | rdpk | Pertumbuhan DPK year on year | BI |
| 24 | Pertumbuhan GDP/Jumlah Penduduk | ry_cap | Pertumbuhan GDP Riil per Jumlah Penduduk year on year | BPS |
| 25 | Pertumbuhan Belanja Pemerintah | rgov | Pertumbuhan Belanja Pemerintah year on year | BI |
| 26 | Pertumbuhan GDPR | rgdpr | Pertumbuhan GDP Riil year on year | BPS |
| 27 | Jumlah Penduduk | pddk | Jumlah Penduduk Indonesia | BPS |
| 28 | Jumlah Penduduk Miskin | miskin | Jumlah penduduk miskin definisi BPS | BPS |
| 29 | Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin | rmis | Pertumbuhan penduduk miskin year on year | BPS |
| 30 | Prosentase Jumlah Penduduk Miskin | p_mis | Penduduk miskin per jumlah penduduk | BPS |
| 31 | Jumlah Angka Pengangguran Terbuka | unempl | Angka Pengangguran Terbuka definisi BPS | BPS |
| 32 | Prosentase Pengangguran Terbuka | p_unempl | Angka Pengangguran Terbuka per jumlah penduduk | BPS |

| Thn | M1 | M2 | GDPR2000 | GOV | DPK | Kredit |
|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1971 | 320,00 | 1.173,00 | 290.760,90 | 478,70 | na | 490,64 |
| 1972 | 475,00 | 1.400,00 | 311.223,60 | 666,80 | na | 657,69 |
| 1973 | 669,00 | 1.692,00 | 336.445,00 | 1.065,50 | na | 1.004,59 |
| 1974 | 940,00 | 2.160,00 | 362.131,50 | 1.933,20 | 1.196,00 | 1.402,18 |
| 1975 | 1.250,00 | 2.683,00 | 380.155,90 | 2.648,60 | 1.551,00 | 2.771,24 |
| 1976 | 1.603,00 | 3.336,00 | 405.438,80 | 3.108,70 | 2.089,00 | 3.580,85 |
| 1977 | 2.006,00 | 3.835,00 | 441.936,00 | 3.439,80 | 2.428,00 | 3.954,82 |
| 1978 | 2.488,00 | 4.429,00 | 471.842,10 | 4.328,60 | 2.813,00 | 5.394,18 |
| 1979 | 3.385,00 | 5.842,00 | 506.401,30 | 7.141,20 | 4.260,10 | 6.285,85 |
| 1980 | 4.995,00 | 8.311,00 | 556.434,10 | 10.653,80 | 6.411,00 | 7.880,00 |
| 1981 | 6.486,00 | 10.337,00 | 600.543,50 | 13.314,50 | 8.227,00 | 10.226,00 |
| 1982 | 7.121,00 | 11.695,00 | 614.034,40 | 13.822,30 | 8.873,00 | 13.257,00 |
| 1983 | 7.569,00 | 14.663,00 | 639.780,60 | 17.815,40 | 12.397,00 | 15.299,00 |
| 1984 | 8.581,00 | 17.937,00 | 684.408,70 | 16.531,70 | 15.498,00 | 18.813,00 |
| 1985 | 10.104,00 | 23.153,00 | 701.259,80 | 22.147,50 | 20.174,00 | 22.156,00 |
| 1986 | 11.677,00 | 27.661,00 | 742.461,60 | 20.737,80 | 23.511,00 | 26.402,00 |
| 1987 | 12.685,00 | 33.885,00 | 779.032,20 | 22.384,40 | 29.330,00 | 32.852,00 |
| 1988 | 14.392,00 | 41.998,00 | 824.064,10 | 26.733,60 | 37.510,00 | 44.001,00 |
| 1989 | 20.114,00 | 58.705,00 | 885.519,40 | 32.692,00 | 54.375,00 | 63.606,00 |
| 1990 | 23.819,00 | 84.630,00 | 949.641,10 | 39.754,00 | 83.154,00 | 97.696,00 |
| 1991 | 26.342,00 | 99.059,00 | 1.018.062,60 | 44.581,40 | 95.118,00 | 113.608,00 |
| 1992 | 28.779,00 | 119.053,00 | 1.081.248,00 | 52.048,10 | 114.850,00 | 123.689,00 |
| 1993 | 37.036,00 | 145.599,00 | 1.151.490,20 | 57.833,10 | 141.946,00 | 148.298,00 |
| 1994 | 45.622,00 | 174.319,00 | 1.238.312,30 | 62.606,90 | 168.947,00 | 190.356,00 |
| 1995 | 52.677,00 | 222.638,00 | 1.340.101,60 | 65.341,70 | 214.764,00 | 236.401,19 |
| 1996 | 64.089,00 | 288.632,00 | 1.444.873,30 | 82.220,90 | 281.718,00 | 294.957,21 |
| 1997 | 78.343,00 | 355.643,00 | 1.512.780,90 | 109.301,50 | 357.613,00 | 380.306,52 |
| 1998 | 101.197,00 | 577.381,00 | 1.314.202,00 | 172.669,20 | 573.524,00 | 489.286,59 |
| 1999 | 124.633,00 | 646.205,00 | 1.324.599,00 | 231.879,00 | 625.618,00 | 227.584,59 |
| 2000 | 162.186,00 | 747.028,00 | 1.389.770,20 | 221.466,70 | 720.379,00 | 272.618,93 |
| 2001 | 177.731,00 | 844.053,00 | 1.442.984,60 | 341.563,00 | 809.127,00 | 312.454,32 |
| 2002 | 191.939,00 | 883.908,00 | 1.506.124,40 | 322.180,00 | 845.015,00 | 372.092,86 |
| 2003 | 223.799,00 | 955.692,00 | 1.579.558,90 | 376.505,00 | 902.326,00 | 446.928,84 |
| 2004 | 253.818,00 | 1.033.527,00 | 1.656.825,70 | 427.177,00 | 965.080,00 | 565.697,08 |
| 2005 | 281.905,00 | 1.193.215,00 | 1.749.546,90 | 509.632,42 | 1.134.086,00 | 705.484,00 |
| 2006 | 361.073,00 | 1.382.074,00 | 1.846.654,90 | 667.128,87 | 1.229.132,00 | 796.767,00 |
| 2007 | 450.055,43 | 1.649.661,78 | 1.964.327,30 | 757.650,00 | 1.462.862,00 | 1.004.178,00 |
| 2008 | 456.787,00 | 1.895.838,00 | 2.082.315,90 | 985.730,70 | 1.682.166,00 | 1.313.873,00 |
| 2009 | 515.824,08 | 2.141.383,70 | 2.176.975,50 | 954.001,00 | 1.913.571,00 | 1.446.808,00 |
| 2010 | 490.083,79 | 2.066.480,99 | 2.287.187,77 | na | 1.882.167,43 | 1.436.347,79 |

| Thn | KUK | KMKM | IHK | PDBDef | gdp/penddk | cr/gdp | kuk/ kredit | KMKM/ Kredit |
|------|------------|------------|-------|--------|------------|---------|----------------|-----------------|
| 1971 | na | na | 2,50 | 6,14 | 2.439,06 | 0,00169 | na | na |
| 1972 | na | na | 25,80 | 11,99 | 2.484,68 | 0,00211 | na | na |
| 1973 | na | na | 27,30 | 34,34 | 2.622,73 | 0,00299 | na | na |
| 1974 | na | na | 33,30 | 47,31 | 2.790,09 | 0,00387 | na | na |
| 1975 | na | na | 19,70 | 12,47 | 2.912,00 | 0,00729 | na | na |
| 1976 | na | na | 14,20 | 14,46 | 3.087,79 | 0,00883 | na | na |
| 1977 | na | na | 11,80 | 13,01 | 3.299,50 | 0,00895 | na | na |
| 1978 | na | na | 6,70 | 8,23 | 3.453,41 | 0,01143 | na | na |
| 1979 | na | na | 21,80 | 35,84 | 3.633,34 | 0,01241 | na | na |
| 1980 | na | na | 16,00 | 29,15 | 3.913,62 | 0,01416 | na | na |
| 1981 | na | na | 7,09 | 10,15 | 4.140,57 | 0,01703 | na | na |
| 1982 | na | na | 6,70 | 7,46 | 3.970,18 | 0,02159 | na | na |
| 1983 | na | na | 11,46 | 18,46 | 4.047,13 | 0,02391 | na | na |
| 1984 | na | na | 8,76 | 8,25 | 4.235,74 | 0,02749 | na | na |
| 1985 | na | na | 4,30 | 5,32 | 4.246,11 | 0,03159 | na | na |
| 1986 | na | na | 8,80 | (0,01) | 4.402,07 | 0,03556 | na | na |
| 1987 | na | na | 8,90 | 15,85 | 4.522,82 | 0,04217 | na | na |
| 1988 | na | na | 5,50 | 7,63 | 4.684,74 | 0,05340 | na | na |
| 1989 | 14.062,00 | na | 6,00 | 9,49 | 4.929,39 | 0,07183 | 0,22108 | na |
| 1990 | 21.197,21 | na | 9,50 | 9,09 | 5.176,38 | 0,10288 | 0,21697 | na |
| 1991 | 22.861,87 | na | 9,50 | 8,73 | 5.771,30 | 0,11159 | 0,20123 | na |
| 1992 | 22.621,17 | na | 4,90 | 7,33 | 5.811,91 | 0,11439 | 0,18289 | na |
| 1993 | 27.778,16 | na | 9,80 | 9,12 | 6.113,24 | 0,12879 | 0,18731 | na |
| 1994 | 34.164,01 | na | 9,20 | 7,78 | 6.465,71 | 0,15372 | 0,17947 | na |
| 1995 | 40.926,40 | na | 8,60 | 9,88 | 6.880,78 | 0,17641 | 0,17312 | na |
| 1996 | 49.290,70 | na | 6,50 | 8,68 | 7.477,09 | 0,20414 | 0,16711 | na |
| 1997 | 67.263,40 | na | 11,10 | 12,57 | 7.521,82 | 0,25140 | 0,17687 | na |
| 1998 | 45.571,28 | na | 77,63 | 75,27 | 6.441,19 | 0,37231 | 0,09314 | na |
| 1999 | 37.238,68 | na | 2,01 | 14,16 | 6.463,03 | 0,17181 | 0,16363 | na |
| 2000 | 56.624,86 | na | 9,35 | 15,44 | 6.775,00 | 0,19616 | 0,20771 | na |
| 2001 | 62.569,16 | 100.279,47 | 12,55 | 16,72 | 6.863,72 | 0,21653 | 0,20025 | 0,32094 |
| 2002 | 62.265,79 | 160.976,55 | 10,03 | 5,99 | 7.146,96 | 0,24705 | 0,16734 | 0,43262 |
| 2003 | 73.968,14 | 207.087,89 | 5,06 | 4,37 | 7.396,65 | 0,28295 | 0,16550 | 0,46336 |
| 2004 | 93.615,38 | 271.093,15 | 6,40 | 7,34 | 7.656,96 | 0,34143 | 0,16549 | 0,47922 |
| 2005 | 106.051,05 | 369.978,69 | 17,11 | 14,33 | 7.981,51 | 0,40324 | 0,15032 | 0,52443 |
| 2006 | 109.666,05 | 427.996,30 | 6,60 | 14,09 | 8.290,26 | 0,43147 | 0,13764 | 0,53717 |
| 2007 | 124.427,81 | 524.174,49 | 6,56 | 11,26 | 8.705,50 | 0,51121 | 0,12391 | 0,52199 |
| 2008 | 142.986,26 | 660.445,30 | 11,06 | 18,22 | 9.112,05 | 0,63097 | 0,10883 | 0,50267 |
| 2009 | 156.361,26 | 766.901,35 | 2,78 | 8,44 | 9.449,93 | 0,66460 | 0,10807 | 0,53006 |
| 2010 | na | 940.070,88 | 3,91 | 7,66 | 9.797,57 | 0,62800 | na | 0,65449 |

| Thn | dpk/gdp | M1/GDP | M2/GDP | Gov/GDP | rm1 | rm2 | rcr | rkuk | rdpk | ry_cap |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1971 | na | 0,00110 | 0,00403 | 0,00165 | na | na | na | na | na | na |
| 1972 | na | 0,00153 | 0,00450 | 0,00214 | 0,32632 | 0,16214 | 0,25400 | na | na | 0,01836 |
| 1973 | na | 0,00199 | 0,00503 | 0,00317 | 0,28999 | 0,17258 | 0,34531 | na | na | 0,05264 |
| 1974 | 0,00330 | 0,00260 | 0,00596 | 0,00534 | 0,28830 | 0,21667 | 0,28355 | na | na | 0,05998 |
| 1975 | 0,00408 | 0,00329 | 0,00706 | 0,00697 | 0,24800 | 0,19493 | 0,49402 | na | 0,22888 | 0,04187 |
| 1976 | 0,00515 | 0,00395 | 0,00823 | 0,00767 | 0,22021 | 0,19574 | 0,22610 | na | 0,25754 | 0,05693 |
| 1977 | 0,00549 | 0,00454 | 0,00868 | 0,00778 | 0,20090 | 0,13012 | 0,09456 | na | 0,13962 | 0,06417 |
| 1978 | 0,00596 | 0,00527 | 0,00939 | 0,00917 | 0,19373 | 0,13412 | 0,26684 | na | 0,13686 | 0,04457 |
| 1979 | 0,00841 | 0,00668 | 0,01154 | 0,01410 | 0,26499 | 0,24187 | 0,14185 | na | 0,33969 | 0,04952 |
| 1980 | 0,01152 | 0,00898 | 0,01494 | 0,01915 | 0,32232 | 0,29708 | 0,20230 | na | 0,33550 | 0,07162 |
| 1981 | 0,01370 | 0,01080 | 0,01721 | 0,02217 | 0,22988 | 0,19599 | 0,22942 | na | 0,22074 | 0,05481 |
| 1982 | 0,01445 | 0,01160 | 0,01905 | 0,02251 | 0,08917 | 0,11612 | 0,22863 | na | 0,07281 | (0,04292) |
| 1983 | 0,01938 | 0,01183 | 0,02292 | 0,02785 | 0,05919 | 0,20241 | 0,13347 | na | 0,28426 | 0,01901 |
| 1984 | 0,02264 | 0,01254 | 0,02621 | 0,02415 | 0,11793 | 0,18253 | 0,18679 | na | 0,20009 | 0,04453 |
| 1985 | 0,02877 | 0,01441 | 0,03302 | 0,03158 | 0,15073 | 0,22528 | 0,15088 | na | 0,23178 | 0,00244 |
| 1986 | 0,03167 | 0,01573 | 0,03726 | 0,02793 | 0,13471 | 0,16297 | 0,16082 | na | 0,14193 | 0,03543 |
| 1987 | 0,03765 | 0,01628 | 0,04350 | 0,02873 | 0,07946 | 0,18368 | 0,19634 | na | 0,19840 | 0,02670 |
| 1988 | 0,04552 | 0,01746 | 0,05096 | 0,03244 | 0,11861 | 0,19318 | 0,25338 | na | 0,21808 | 0,03456 |
| 1989 | 0,06140 | 0,02271 | 0,06629 | 0,03692 | 0,28448 | 0,28459 | 0,30823 | na | 0,31016 | 0,04963 |
| 1990 | 0,08756 | 0,02508 | 0,08912 | 0,04186 | 0,15555 | 0,30633 | 0,34894 | 0,50741 | 0,34609 | 0,04771 |
| 1991 | 0,09343 | 0,02587 | 0,09730 | 0,04379 | 0,09578 | 0,14566 | 0,14006 | 0,07853 | 0,12578 | 0,10308 |
| 1992 | 0,10622 | 0,02662 | 0,11011 | 0,04814 | 0,08468 | 0,16794 | 0,08150 | (0,01053) | 0,17181 | 0,00699 |
| 1993 | 0,12327 | 0,03216 | 0,12644 | 0,05022 | 0,22295 | 0,18232 | 0,16594 | 0,22797 | 0,19089 | 0,04929 |
| 1994 | 0,13643 | 0,03684 | 0,14077 | 0,05056 | 0,18820 | 0,16476 | 0,22094 | 0,22989 | 0,15982 | 0,05451 |
| 1995 | 0,16026 | 0,03931 | 0,16614 | 0,04876 | 0,13393 | 0,21703 | 0,19478 | 0,19794 | 0,21334 | 0,06032 |
| 1996 | 0,19498 | 0,04436 | 0,19976 | 0,05691 | 0,17806 | 0,22864 | 0,19852 | 0,20437 | 0,23766 | 0,07975 |
| 1997 | 0,23639 | 0,05179 | 0,23509 | 0,07225 | 0,18194 | 0,18842 | 0,22442 | 0,36463 | 0,21223 | 0,00595 |
| 1998 | 0,43640 | 0,07700 | 0,43934 | 0,13139 | 0,22584 | 0,38404 | 0,22273 | (0,32250) | 0,37646 | (0,16777) |
| 1999 | 0,47231 | 0,09409 | 0,48785 | 0,17506 | 0,18804 | 0,10650 | (1,14991) | (0,18285) | 0,08327 | 0,00338 |
| 2000 | 0,51834 | 0,11670 | 0,53752 | 0,15935 | 0,23154 | 0,13497 | 0,16519 | 0,52059 | 0,13154 | 0,04605 |
| 2001 | 0,56073 | 0,12317 | 0,58494 | 0,23671 | 0,08746 | 0,11495 | 0,12749 | 0,10498 | 0,10968 | 0,01292 |
| 2002 | 0,56105 | 0,12744 | 0,58688 | 0,21391 | 0,07402 | 0,04509 | 0,16028 | (0,00485) | 0,04247 | 0,03963 |
| 2003 | 0,57125 | 0,14168 | 0,60504 | 0,23836 | 0,14236 | 0,07511 | 0,16744 | 0,18794 | 0,06351 | 0,03376 |
| 2004 | 0,58249 | 0,15320 | 0,62380 | 0,25783 | 0,11827 | 0,07531 | 0,20995 | 0,26562 | 0,06502 | 0,03400 |
| 2005 | 0,64822 | 0,16113 | 0,68201 | 0,29129 | 0,09963 | 0,13383 | 0,19814 | 0,13284 | 0,14902 | 0,04066 |
| 2006 | 0,66560 | 0,19553 | 0,74842 | 0,36126 | 0,21926 | 0,13665 | 0,11457 | 0,03409 | 0,07733 | 0,03724 |
| 2007 | 0,74471 | 0,22911 | 0,83981 | 0,38570 | 0,19771 | 0,16221 | 0,20655 | 0,13461 | 0,15978 | 0,04770 |
| 2008 | 0,80783 | 0,21936 | 0,91045 | 0,47338 | 0,01474 | 0,12985 | 0,23571 | 0,14915 | 0,13037 | 0,04462 |
| 2009 | 0,87900 | 0,23695 | 0,98365 | 0,43822 | 0,11445 | 0,11467 | 0,09188 | 0,09354 | 0,12093 | 0,03575 |
| 2010 | 0,82292 | 0,21427 | 0,90350 | na | na | na | na | na | na | na |

| Thn | rgov | rgdpr | rmis | % penduduk miskin | Jumlah penduduk miskin | Jumlah penduduk | unempl | % unempl |
|------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1971 | na | na | na | 52,09 | 62,10 | 119,21 | 7,47 | 6,26 |
| 1972 | 0,28 | 0,07 | (0,12) | 46,69 | 58,15 | 125,26 | 6,94 | 5,54 |
| 1973 | 0,37 | 0,07 | (0,06) | 43,98 | 56,18 | 128,28 | 6,65 | 5,18 |
| 1974 | 0,45 | 0,07 | (0,03) | 42,63 | 55,19 | 129,79 | 6,49 | 5,00 |
| 1975 | 0,27 | 0,05 | (0,02) | 41,95 | 54,69 | 130,55 | 6,41 | 4,91 |
| 1976 | 0,15 | 0,06 | (0,02) | 41,28 | 54,20 | 131,30 | 6,33 | 4,82 |
| 1977 | 0,10 | 0,08 | (0,09) | 37,85 | 50,70 | 133,94 | 5,90 | 4,40 |
| 1978 | 0,21 | 0,06 | (0,10) | 34,55 | 47,20 | 136,63 | 5,47 | 4,01 |
| 1979 | 0,39 | 0,07 | (0,08) | 32,11 | 44,75 | 139,38 | 5,19 | 3,72 |
| 1980 | 0,33 | 0,09 | (0,08) | 29,75 | 42,30 | 142,18 | 2,36 | 1,66 |
| 1981 | 0,20 | 0,07 | (0,06) | 27,99 | 40,60 | 145,04 | 2,76 | 1,90 |
| 1982 | 0,04 | 0,02 | (0,15) | 24,44 | 37,80 | 154,66 | 3,12 | 2,02 |
| 1983 | 0,22 | 0,04 | (0,06) | 23,03 | 36,40 | 158,08 | 3,29 | 2,08 |
| 1984 | (0,0777) | 0,0652 | (0,0630) | 21,6612 | 35,0000 | 161,5795 | 3,4100 | 2,1100 |
| 1985 | 0,2536 | 0,0240 | (0,1007) | 19,6787 | 32,5000 | 165,1536 | 3,5300 | 2,1400 |
| 1986 | (0,0680) | 0,0555 | (0,0621) | 18,5282 | 31,2500 | 168,6620 | 4,4500 | 2,6400 |
| 1987 | 0,0736 | 0,0469 | (0,0638) | 17,4171 | 30,0000 | 172,2448 | 4,3900 | 2,5500 |
| 1988 | 0,1627 | 0,0546 | (0,0712) | 16,2589 | 28,6000 | 175,9038 | 4,9400 | 2,8100 |
| 1989 | 0,1823 | 0,0694 | (0,0469) | 15,5310 | 27,9000 | 179,6406 | 5,1600 | 2,8700 |
| 1990 | 0,1776 | 0,0675 | (0,0475) | 14,8264 | 27,2000 | 183,4567 | 5,8200 | 3,1700 |
| 1991 | 0,1083 | 0,0672 | 0,0149 | 15,0509 | 26,5500 | 176,4009 | 4,3400 | 2,4600 |
| 1992 | 0,1435 | 0,0584 | (0,0677) | 14,0964 | 26,2300 | 186,0400 | 4,7600 | 2,5600 |
| 1993 | 0,1000 | 0,0610 | (0,0252) | 13,7503 | 25,9000 | 188,3600 | 5,2000 | 2,7600 |
| 1994 | 0,0763 | 0,0701 | (0,0860) | 12,6619 | 24,2500 | 191,5200 | 8,3500 | 4,3600 |
| 1995 | 0,0419 | 0,0760 | (0,0527) | 12,0276 | 23,4300 | 194,7600 | 14,1000 | 7,2400 |
| 1996 | 0,2053 | 0,0725 | (0,0284) | 11,6953 | 22,6000 | 193,2401 | 9,4500 | 4,8900 |
| 1997 | 0,2478 | 0,0449 | 0,3475 | 17,9247 | 36,0500 | 201,1190 | 9,7100 | 4,8300 |
| 1998 | 0,3670 | (0,1511) | 0,2612 | 24,2610 | 49,5000 | 204,0308 | 11,1400 | 5,4591 |
| 1999 | 0,2553 | 0,0078 | (0,0365) | 23,4057 | 47,9700 | 204,9502 | 13,0300 | 6,3579 |
| 2000 | (0,0470) | 0,0469 | (0,2406) | 18,8659 | 38,7000 | 205,1320 | 12,4700 | 6,0775 |
| 2001 | 0,3516 | 0,0369 | (0,0465) | 18,0276 | 37,9000 | 210,2337 | 17,0300 | 8,1012 |
| 2002 | (0,0602) | 0,0419 | 0,0107 | 18,2218 | 38,4000 | 210,7363 | 19,1000 | 9,0615 |
| 2003 | 0,1443 | 0,0465 | (0,0432) | 17,4666 | 37,3000 | 213,5505 | 20,6500 | 9,6700 |
| 2004 | 0,1186 | 0,0466 | (0,0469) | 16,6835 | 36,1000 | 216,3816 | 21,3400 | 9,8600 |
| 2005 | 0,1618 | 0,0530 | (0,0419) | 16,0128 | 35,1000 | 219,2000 | 23,5600 | 10,7500 |
| 2006 | 0,2361 | 0,0526 | 0,0866 | 17,5309 | 39,0500 | 222,7500 | 23,0900 | 10,3650 |
| 2007 | 0,1195 | 0,0599 | (0,0642) | 16,4730 | 37,1700 | 225,6420 | 21,2800 | 9,4300 |
| 2008 | 0,2314 | 0,0567 | (0,0768) | 15,2982 | 34,9600 | 228,5233 | 19,2500 | 8,4250 |
| 2009 | (0,0333) | 0,0435 | (0,0834) | 14,1208 | 32,5300 | 230,3695 | 18,4400 | 8,0058 |
| 2010 | na | na | na | na | na | na | na | na |

eq_1x

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/17/11 Time: 08:36

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| M2_GDP | 2,2495 | 3,822144 | 0,588536 | 0,56110 |
| RCR | -3,7372 | 0,366805 | -10,18843 | 0,00000 |
| D_CRISIS | 0,6947 | 0,204918 | 3,39027 | 0,00220 |
| IHK | 0,0781 | 0,011236 | 6,948651 | 0,00000 |
| C | 13,5971 | 4,209829 | 3,229835 | 0,00320 |
| AR(1) | 0,8577 | 0,043188 | 19,85989 | 0,00000 |
| R-squared | 0,9517 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,9427 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,4894 | Akaike info criterion | 3,797577 | |
| Sum squared resid | 59,8937 | Schwarz criterion | 4,069669 | |
| Log likelihood | -56,6600 | Hannan-Quinn criter. | 3,889128 | |
| F-statistic | 106,3111 | Durbin-Watson stat | 2,300323 | |
| Prob(F-statistic) | 0,0000 | | | |

Inverted AR Roots 0,86

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,723545 | Prob. F(2,25) | 0,4949 |
| Obs*R-squared | 1,805642 | Prob. Chi-Square(2) | 0,4054 |

eq_1xa

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/17/11 Time: 08:40

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| M2_GDP | 2,249468 | 4,457987 | 0,504593 | 0,6179 |
| RCR | -3,73717 | 0,449177 | -8,32003 | 0,00000 |
| D_CRISIS | 0,694728 | 0,236215 | 2,94108 | 0,00660 |
| IHK | 0,078078 | 0,013205 | 5,91285 | 0,00000 |
| C | 13,59705 | 5,31465 | 2,55841 | 0,01640 |
| AR(1) | 0,857712 | 0,055102 | 15,56600 | 0,00000 |
| R-squared | 0,951661 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,942709 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,489391 | Akaike info criterion | 3,797577 | |
| Sum squared resid | 59,89368 | Schwarz criterion | 4,069669 | |
| Log likelihood | -56,66 | Hannan-Quinn criter. | 3,889128 | |
| F-statistic | 106,3111 | Durbin-Watson stat | 2,300323 | |
| Prob(F-statistic) | 0,000000 | | | |

Inverted AR Roots 0,86

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,723545 | Prob. F(2,25) | 0,4949 |
| Obs*R-squared | 1,805642 | Prob. Chi-Square(2) | 0,4054 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/17/11 Time: 08:39

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/17/11 Time: 08:41

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| M2_GDP | 1,507487 | 5,357179 | 0,281396 | 0,7807 |
| RCR | 0,009529 | 1,077897 | 0,00884 | 0,993 |
| D_CRISIS | 1,04686 | 1,424334 | 0,734982 | 0,4692 |
| IHK | -0,00084 | 0,026857 | -0,031293 | 0,9753 |
| C | -1,45368 | 4,455116 | -0,326295 | 7,47E-01 |
| AR(1) | 0,018086 | 0,049196 | 0,367622 | 0,7162 |
| RESID(-1) | -0,318232 | 0,271098 | -1,173864 | 0,2515 |
| RESID(-2) | -0,052584 | 0,349326 | -0,15053 | 0,8816 |
| R-squared | 0,054716 | Mean dependent var | -2,43E-11 | |
| Adjusted R-squared | -0,209963 | S.D. dependent var | 1,368093 | |
| S.E. of regression | 1,504879 | Akaike info criterion | 3,862519 | |
| Sum squared resid | 56,61651 | Schwarz criterion | 4,225308 | |
| Log likelihood | -55,73156 | Hannan-Quinn criter. | 3,984586 | |
| F-statistic | 0,206727 | Durbin-Watson stat | 1,934395 | |
| Prob(F-statistic) | 0,980786 | | | |

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| M2_GDP | 1,51E+00 | 5,357179 | 0,281396 | 0,7807 |
| RCR | 0,009529 | 1,077897 | 0,00884 | 0,993 |
| D_CRISIS | 1,04686 | 1,424334 | 0,734982 | 0,4692 |
| IHK | -0,00084 | 0,026857 | -0,031293 | 0,9753 |
| C | -1,45368 | 4,455116 | -0,326295 | 0,7469 |
| AR(1) | 0,018086 | 0,049196 | 0,367622 | 0,7162 |
| RESID(-1) | -0,31823 | 0,271098 | -1,173864 | 2,52E-01 |
| RESID(-2) | -0,05258 | 0,349326 | -0,15053 | 0,8816 |
| R-squared | 0,054716 | Mean dependent var | -2,43E-11 | |
| Adjusted R-squared | -0,20996 | S.D. dependent var | 1,368093 | |
| S.E. of regression | 1,504879 | Akaike info criterion | 3,862519 | |
| Sum squared resid | 56,61651 | Schwarz criterion | 4,225308 | |
| Log likelihood | -55,7316 | Hannan-Quinn criter. | 3,984586 | |
| F-statistic | 0,206727 | Durbin-Watson stat | 1,934395 | |
| Prob(F-statistic) | 0,980786 | | | |

eq_3x

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/15/11 Time: 22:33

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 6 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| RGDPR | -8,778601 | 8,124013 | -1,080574 | 0,28940 |
| RCR | -3,587661 | 0,635467 | -5,645708 | 0,00000 |
| D_CRISIS | 0,597503 | 0,301484 | 1,981873 | 0,05780 |
| IHK | 0,059808 | 0,024336 | 2,457622 | 0,02070 |
| C | 15,55178 | 3,237346 | 4,803866 | 0,00010 |
| AR(1) | 0,84812 | 0,044333 | 19,13077 | 0,00000 |
| R-squared | 0,952424 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,943614 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,47759 | Akaike info criterion | 3,781668 | |
| Sum squared resid | 58,94837 | Schwarz criterion | 4,05376 | |
| Log likelihood | -56,39752 | Hannan-Quinn criter. | 3,873219 | |
| F-statistic | 108,1025 | Durbin-Watson stat | 2,275774 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,85 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,685183 | Prob. F(2,25) | 0,5132 |
| Obs*R-squared | 1,714883 | Prob. Chi-Square(2) | 0,4242 |

eq_4x

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 21:33

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 8 iterations

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| LOG(GDPR) | -19,8222 | 6,220019 | -3,186845 | 0,0035 |
| LOG(DPK) | 5,558568 | 1,318023 | 4,217352 | 0,0002 |
| D_CRISIS | 0,351282 | 0,160233 | 2,192317 | 0,0368 |
| C | 223,0956 | 87,58324 | 2,547241 | 0,0166 |
| AR(1) | 0,879798 | 0,042346 | 20,77634 | - |
| R-squared | 0,935972 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,926825 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,683243 | Akaike info criterion | 4,018048 | |
| Sum squared resid | 79,33255 | Schwarz criterion | 4,244792 | |
| Log likelihood | -61,2978 | Hannan-Quinn criter. | 4,094341 | |
| F-statistic | 102,3277 | Durbin-Watson stat | 2,150251 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,88 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,566919 | Prob. F(2,26) | 0,5741 |
| Obs*R-squared | 1,378966 | Prob. Chi-Square(2) | 0,5018 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/11 Time: 22:37

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| RGDPR | -2,367996 | 10,99387 | -0,215392 | 0,8312 |
| RCR | 0,297775 | 1,115644 | 0,266908 | 0,7917 |
| D_CRISIS | 0,885564 | 1,361085 | 0,650631 | 0,5212 |
| IHK | -0,015065 | 0,037222 | -0,404737 | 0,6891 |
| C | -0,150126 | 2,266148 | -0,066247 | 0,9477 |
| AR(1) | 0,008102 | 0,039504 | 0,205086 | 0,8392 |
| RESID(-1) | -0,268501 | 0,251704 | -1,066735 | 0,2963 |
| RESID(-2) | 0,099206 | 0,29483 | 0,336486 | 0,7393 |
| R-squared | 0,051966 | Mean dependent var | -8,60E-14 | |
| Adjusted R-squared | -0,213483 | S.D. dependent var | 1,357253 | |
| S.E. of regression | 1,495126 | Akaike info criterion | 3,849515 | |
| Sum squared resid | 55,88505 | Schwarz criterion | 4,212305 | |
| Log likelihood | -55,517 | Hannan-Quinn criter. | 3,971583 | |
| F-statistic | 0,195767 | Durbin-Watson stat | 1,927078 | |
| Prob(F-statistic) | 0,983553 | | | |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 21:35

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| LOG(GDPR) | 1,596855 | 8,745536 | 0,182591 | 0,8565 |
| LOG(DPK) | 0,396958 | 3,492038 | 0,113675 | 0,9104 |
| D_CRISIS | 1,861492 | 2,289131 | 0,813187 | 0,4235 |
| C | -29,638 | 117,3071 | -0,252653 | 0,8025 |
| AR(1) | 0,024284 | 0,085359 | 0,284489 | 0,7783 |
| RESID(-1) | -0,36547 | 0,383219 | -0,953687 | 0,349 |
| RESID(-2) | 0,001341 | 0,314389 | 0,004266 | 0,9966 |
| R-squared | 0,041787 | Mean dependent var | -4,02E-11 | |
| Adjusted R-squared | -0,17934 | S.D. dependent var | 1,574529 | |
| S.E. of regression | 1,709898 | Akaike info criterion | 4,096575 | |
| Sum squared resid | 76,01749 | Schwarz criterion | 4,414016 | |
| Log likelihood | -60,5935 | Hannan-Quinn criter. | 4,203385 | |
| F-statistic | 0,188973 | Durbin-Watson stat | 1,959458 | |
| Prob(F-statistic) | 0,977237 | | | |

eq_3xa

Dependent Variable: LOG(P_MIS)

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 17:15

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 5 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| RCR | -0,001771 | 0,0003 | -5,902035 | 0,00000 |
| D_CRISIS | 0,035246 | 0,012673 | 2,781162 | 0,00960 |
| IHK | 0,003698 | 0,000852 | 4,341912 | 0,00020 |
| C | 2,727894 | 0,259863 | 10,49745 | 0,00000 |
| AR(1) | 0,861385 | 0,090456 | 9,522736 | 0,00000 |
| R-squared | 0,89758 | Mean dependent var | 2,939011 | |
| Adjusted R-squared | 0,882948 | S.D. dependent var | 0,285176 | |
| S.E. of regression | 0,097567 | Akaike info criterion | -1,67783 | |
| Sum squared resid | 0,266539 | Schwarz criterion | -1,45109 | |
| Log likelihood | 32,68425 | Hannan-Quinn criter. | -1,60154 | |
| F-statistic | 61,34594 | Durbin-Watson stat | 2,248842 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,86 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,506979 | Prob. F(2,26) | 0,6081 |
| Obs*R-squared | 1,238642 | Prob. Chi-Square(2) | 0,5383 |

eq_4xa

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 17:17

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 6 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| RCR | -0,03866 | 0,005585 | -6,922325 | 0,00000 |
| D_CRISIS | 0,687055 | 0,244065 | 2,815055 | 0,00880 |
| IHK | 0,081413 | 0,014689 | 5,542424 | 0,00000 |
| C | 15,04947 | 2,921621 | 5,151067 | 0,00000 |
| AR(1) | 0,846139 | 0,044626 | 18,96081 | 0,00000 |
| R-squared | 0,951441 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,944504 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,465872 | Akaike info criterion | 3,741504 | |
| Sum squared resid | 60,16583 | Schwarz criterion | 3,968248 | |
| Log likelihood | -56,7348 | Hannan-Quinn criter. | 3,817797 | |
| F-statistic | 137,1556 | Durbin-Watson stat | 2,274013 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,85 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,583496 | Prob. F(2,26) | 0,5651 |
| Obs*R-squared | 1,417555 | Prob. Chi-Square(2) | 0,4922 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 17:16

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 17:18

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| RCR | 5,65E-07 | 0,000709 | 0,000796 | 0,9994 |
| D_CRISIS | 0,060049 | 0,095292 | 0,630158 | 0,5341 |
| IHK | -0,000129 | 0,001715 | -0,075134 | 0,9407 |
| C | -0,03828 | 0,164642 | -0,232502 | 0,818 |
| AR(1) | 0,022434 | 0,066247 | 0,33864 | 0,7376 |
| RESID(-1) | -0,259654 | 0,265372 | -0,978454 | 0,3369 |
| RESID(-2) | 0,013338 | 0,293546 | 0,045438 | 0,9641 |
| R-squared | 0,037535 | Mean dependent var | -2,42E-11 | |
| Adjusted R-squared | -0,184573 | S.D. dependent var | 0,091265 | |
| S.E. of regression | 0,099331 | Akaike info criterion | -1,59488 | |
| Sum squared resid | 0,256535 | Schwarz criterion | -1,27744 | |
| Log likelihood | 33,3155 | Hannan-Quinn criter. | -1,48807 | |
| F-statistic | 0,168993 | Durbin-Watson stat | 1,978337 | |
| Prob(F-statistic) | 0,982855 | | | |

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| RCR | 0,001253 | 0,0106 | 0,118209 | 0,9068 |
| D_CRISIS | 0,84138 | 1,36646 | 0,615737 | 0,5434 |
| IHK | -0,00677 | 0,025631 | -0,264047 | 0,7938 |
| C | -0,29611 | 2,139131 | -0,138423 | 0,891 |
| AR(1) | 0,007927 | 0,039718 | 0,199578 | 0,8434 |
| RESID(-1) | -0,24382 | 0,243766 | -1,000231 | 0,3264 |
| RESID(-2) | 0,074458 | 0,284314 | 0,261888 | 0,7955 |
| R-squared | 0,042956 | Mean dependent var | -4,64E-13 | |
| Adjusted R-squared | -0,1779 | S.D. dependent var | 1,371197 | |
| S.E. of regression | 1,488176 | Akaike info criterion | 3,81881 | |
| Sum squared resid | 57,58134 | Schwarz criterion | 4,136251 | |
| Log likelihood | -56,0104 | Hannan-Quinn criter. | 3,92562 | |
| F-statistic | 0,194499 | Durbin-Watson stat | 1,966063 | |
| Prob(F-statistic) | 0,975532 | | | |

eq_5x

Dependent Variable: LOG(P_MIS)

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 15:43

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 14 iterations

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| LOG(GOV) | 0,212608 | 0,104314 | 2,038164 | 0,05070 |
| IHK | 0,001651 | 0,000641 | 2,575535 | 0,01540 |
| C | -0,384507 | 1,36156 | -0,282402 | 0,77960 |
| AR(1) | 0,932487 | 0,024065 | 38,74921 | 0,00000 |
| R-squared | 0,878303 | Mean dependent var | 2,939011 | |
| Adjusted R-squared | 0,865713 | S.D. dependent var | 0,285176 | |
| S.E. of regression | 0,104503 | Akaike info criterion | -1,56599 | |
| Sum squared resid | 0,316707 | Schwarz criterion | -1,38459 | |
| Log likelihood | 29,83875 | Hannan-Quinn criter. | -1,50495 | |
| F-statistic | 69,76528 | Durbin-Watson stat | 2,118257 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,93 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,083338 | Prob. F(2,27) | 0,9203 |
| Obs*R-squared | 0,202465 | Prob. Chi-Square(2) | 0,9037 |

eq_5xa

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 15:40

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 6 iterations

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| RGOV | 0,024374 | 0,018542 | 1,31454 | 0,1990 |
| IHK | 0,038407 | 0,018478 | 2,078555 | 0,0466 |
| C | 14,99737 | 2,307294 | 6,499979 | 0,0000 |
| AR(1) | 0,837765 | 0,044983 | 18,62406 | 0,0000 |
| R-squared | 0,927384 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,919872 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,761405 | Akaike info criterion | 4,083314 | |
| Sum squared resid | 89,97392 | Schwarz criterion | 4,264708 | |
| Log likelihood | -63,3747 | Hannan-Quinn criter. | 4,144347 | |
| F-statistic | 123,4534 | Durbin-Watson stat | 2,020792 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |
| Inverted AR Roots | 0,84 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,035643 | Prob. F(2,27) | 0,965 |
| Obs*R-squared | 0,086898 | Prob. Chi-Square(2) | 0,9575 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 15:44

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/27/10 Time: 15:41

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| LOG(GOV) | 0,002453 | 0,135031 | 0,018167 | 0,9856 |
| IHK | -0,000127 | 0,001353 | -0,094049 | 0,9258 |
| C | -0,061166 | 2,168863 | -0,028202 | 0,9777 |
| AR(1) | 0,001959 | 0,037787 | 0,051856 | 0,959 |
| RESID(-1) | -0,078587 | 0,199125 | -0,394661 | 0,6962 |
| RESID(-2) | 0,019302 | 0,271097 | 0,071198 | 0,9438 |
| R-squared | 0,006135 | Mean dependent var | 1,87E-14 | |
| Adjusted R-squared | -0,177914 | S.D. dependent var | 0,099484 | |
| S.E. of regression | 0,107972 | Akaike info criterion | -1,45093 | |
| Sum squared resid | 0,314764 | Schwarz criterion | -1,17883 | |
| Log likelihood | 29,94029 | Hannan-Quinn criter. | -1,35938 | |
| F-statistic | 0,033335 | Durbin-Watson stat | 1,954514 | |
| Prob(F-statistic) | 0,999358 | | | |

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| RGOV | -0,00069 | 0,019395 | -0,035421 | 0,972 |
| IHK | -0,00288 | 0,022227 | -0,129347 | 0,898 |
| C | 0,024123 | 2,425299 | 0,009947 | 0,9921 |
| AR(1) | -9,97E-05 | 0,048884 | -0,002039 | 0,9984 |
| RESID(-1) | -0,03674 | 0,203662 | -0,180415 | 0,8582 |
| RESID(-2) | 0,046935 | 0,229749 | 0,204287 | 0,8397 |
| R-squared | 0,002633 | Mean dependent var | -2,06E-12 | |
| Adjusted R-squared | -0,18206 | S.D. dependent var | 1,676808 | |
| S.E. of regression | 1,823072 | Akaike info criterion | 4,201889 | |
| Sum squared resid | 89,73699 | Schwarz criterion | 4,473981 | |
| Log likelihood | -63,3312 | Hannan-Quinn criter. | 4,29344 | |
| F-statistic | 0,014257 | Durbin-Watson stat | 1,936426 | |
| Prob(F-statistic) | 0,99992 | | | |

eq_6x

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 22:22

Sample (adjusted): 1977 2009

Included observations: 33 after adjustments

Convergence achieved after 16 iterations

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| LOG(GOV) | 3,700592 | 1,299065 | 2,848659 | 0,00830 |
| LOG(CR) | -4,19582 | 1,887765 | -2,222639 | 0,03480 |
| D_CRISIS | 1,285441 | 0,474572 | 2,708629 | 0,01160 |
| IHK | 0,067801 | 0,017845 | 3,799457 | 0,00080 |
| C | 23,55485 | 10,89353 | 2,162279 | 0,03960 |
| AR(1) | 0,792136 | 0,084085 | 9,420628 | - |
| R-squared | 0,941402 | Mean dependent var | 19,70555 | |
| Adjusted R-squared | 0,93055 | S.D. dependent var | 6,222526 | |
| S.E. of regression | 1,639844 | Akaike info criterion | 3,990045 | |
| Sum squared resid | 72,60539 | Schwarz criterion | 4,262137 | |
| Log likelihood | -59,83574 | Hannan-Quinn criter. | 4,081596 | |
| F-statistic | 86,75275 | Durbin-Watson stat | 2,206959 | |
| Prob(F-statistic) | 0 | | | |

Inverted AR Roots 0,79

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1,229727 | Prob. F(2,25) | 0,3095 |
| Obs*R-squared | 2,955703 | Prob. Chi-Square(2) | 0,2281 |

eq_6xa

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/13/11 Time: 21:47

Sample (adjusted): 1990 2009

Included observations: 20 after adjustments

Convergence achieved after 14 iterations

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| LOG(KUK) | -1,64889 | 1,19635 | -1,378269 | 0,18970 |
| P_UNEMPL | 0,71529 | 0,249767 | 2,863826 | 0,01250 |
| D_CRISIS | 5,94459 | 0,731978 | 8,121266 | 0,00000 |
| IHK | 0,043757 | 0,017743 | 2,466158 | 0,02720 |
| C | 28,31439 | 11,86589 | 2,386201 | 0,03170 |
| AR(1) | -0,27833 | 0,245016 | -1,135963 | 0,27500 |
| R-squared | 0,696411 | Mean dependent var | 16,74865 | |
| Adjusted R-squared | 0,587986 | S.D. dependent var | 3,18051 | |
| S.E. of regression | 2,041516 | Akaike info criterion | 4,508587 | |
| Sum squared resid | 58,349 | Schwarz criterion | 4,807307 | |
| Log likelihood | -39,0859 | Hannan-Quinn criter. | 4,5669 | |
| F-statistic | 6,422992 | Durbin-Watson stat | 2,042296 | |
| Prob(F-statistic) | 0,002665 | | | |

Inverted AR Roots -0,28

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,154943 | Prob. F(2,12) | 0,8582 |
| Obs*R-squared | 0,503475 | Prob. Chi-Square(2) | 0,7774 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 22:26

Sample: 1977 2009

Included observations: 33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/13/11 Time: 21:52

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| LOG(GOV) | 0,862246 | 1,881414 | 0,458297 | 0,6507 |
| LOG(CR) | -0,03253 | 2,102791 | -0,01547 | 0,9878 |
| D_CRISIS | 3,074772 | 2,353647 | 1,306387 | 0,2033 |
| IHK | 0,00277 | 0,032255 | 0,085877 | 0,9322 |
| C | -11,101 | 17,10506 | -0,648989 | 0,5223 |
| AR(1) | 0,067917 | 0,093163 | 0,729009 | 0,4728 |
| RESID(-1) | -0,616199 | 0,397424 | -1,550484 | 0,1336 |
| RESID(-2) | -0,220184 | 0,342226 | -0,643387 | 0,5258 |
| R-squared | 0,089567 | Mean dependent var | -7,12E-10 | |
| Adjusted R-squared | -0,165355 | S.D. dependent var | 1,506293 | |
| S.E. of regression | 1,626067 | Akaike info criterion | 4,017422 | |
| Sum squared resid | 66,10236 | Schwarz criterion | 4,380212 | |
| Log likelihood | -58,28747 | Hannan-Quinn criter. | 4,13949 | |
| F-statistic | 0,351351 | Durbin-Watson stat | 2,012596 | |
| Prob(F-statistic) | 0,921563 | | | |

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| LOG(KUK) | 0,280841 | 1,50352 | 0,186789 | 0,8549 |
| P_UNEMPL | -0,04416 | 0,332519 | -0,132793 | 0,8966 |
| D_CRISIS | -0,02402 | 1,476937 | -0,016265 | 0,9873 |
| IHK | 0,009719 | 0,047748 | 0,203556 | 0,8421 |
| C | -2,91248 | 14,53437 | -0,200385 | 0,8445 |
| AR(1) | 1,554275 | 2,953474 | 0,526253 | 0,6083 |
| RESID(-1) | -1,56182 | 2,94527 | -0,53028 | 0,6056 |
| RESID(-2) | 0,383151 | 0,899907 | 0,425768 | 0,6778 |
| R-squared | 0,025174 | Mean dependent var | 9,85E-11 | |
| Adjusted R-squared | -0,54348 | S.D. dependent var | 1,752427 | |
| S.E. of regression | 2,177157 | Akaike info criterion | 4,683091 | |
| Sum squared resid | 56,88014 | Schwarz criterion | 5,081384 | |
| Log likelihood | -38,8309 | Hannan-Quinn criter. | 4,760842 | |
| F-statistic | 0,044269 | Durbin-Watson stat | 1,991778 | |
| Prob(F-statistic) | 0,999804 | | | |

eq_7x

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/14/11 Time: 10:24

Sample (adjusted): 1991 2009

Included observations: 19 after adjustments

Convergence achieved after 16 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| RKUK | -6,877814 | 1,769014 | -3,887936 | 0,00150 |
| D_CRISIS | 4,125945 | 1,140481 | 3,617725 | 0,00250 |
| C | 16,69289 | 0,934858 | 17,85607 | 0,00000 |
| AR(1) | 0,413918 | 0,366968 | 1,127938 | 0,27710 |
| R-squared | 0,708076 | Mean dependent var | 16,83542 | |
| Adjusted R-squared | 0,649691 | S.D. dependent var | 3,243251 | |
| S.E. of regression | 1,91958 | Akaike info criterion | 4,326753 | |
| Sum squared resid | 55,27179 | Schwarz criterion | 4,525583 | |
| Log likelihood | -37,10416 | Hannan-Quinn criter. | 4,360403 | |
| F-statistic | 12,12774 | Durbin-Watson stat | 1,932709 | |
| Prob(F-statistic) | 0,000273 | | | |

Inverted AR Roots 0,41

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,730564 | Prob. F(2,13) | 0,5004 |
| Obs*R-squared | 1,919728 | Prob. Chi-Square(2) | 0,3829 |

eq_7xa

Dependent Variable: P_MIS

Method: Least Squares

Date: 01/14/11 Time: 10:33

Sample (adjusted): 1990 2009

Included observations: 20 after adjustments

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| RKUK | -5,56907 | 1,620992 | -3,435591 | 0,00340 |
| D_CRISIS | 5,54279 | 0,734612 | 7,545199 | 0,00000 |
| P_UNEMPL | 0,288733 | 0,113139 | 2,55201 | 0,02130 |
| C | 14,51805 | 0,952618 | 15,24015 | 0,00000 |
| R-squared | 0,716378 | Mean dependent var | 16,74865 | |
| Adjusted R-squared | 0,663199 | S.D. dependent var | 3,18051 | |
| S.E. of regression | 1,845796 | Akaike info criterion | 4,240554 | |
| Sum squared resid | 54,51139 | Schwarz criterion | 4,439701 | |
| Log likelihood | -38,4055 | Hannan-Quinn criter. | 4,27943 | |
| F-statistic | 13,47103 | Durbin-Watson stat | 1,908694 | |
| Prob(F-statistic) | 0,000121 | | | |

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0,164849 | Prob. F(2,14) | 0,8496 |
| Obs*R-squared | 0,46016 | Prob. Chi-Square(2) | 0,7945 |

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 01/14/11 Time: 10:26
 Sample: 1991 2009
 Included observations: 19
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 01/14/11 Time: 10:35
 Sample: 1990 2009
 Included observations: 20
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| RKUK | 0,765425 | 2,487198 | 0,307746 | 0,7632 | RKUK | 0,514139 | 2,472442 | 0,207948 | 0,8383 |
| D_CRISIS | -0,288247 | 1,687973 | -0,170765 | 0,867 | D_CRISIS | 0,200864 | 1,184873 | 0,169523 | 0,8678 |
| C | 0,136443 | 1,002875 | 0,136052 | 0,8939 | P_UNEMPL | -0,00349 | 0,169768 | -0,02058 | 0,9839 |
| AR(1) | -0,644242 | 0,925773 | -0,695896 | 0,4987 | C | -0,10831 | 1,38484 | -0,078209 | 0,9388 |
| RESID(-1) | 0,63512 | 1,037408 | 0,612219 | 0,551 | RESID(-1) | -0,06012 | 0,28811 | -0,208668 | 0,8377 |
| RESID(-2) | 0,533326 | 0,455841 | 1,169984 | 0,263 | RESID(-2) | 0,161741 | 0,30723 | 0,526451 | 0,6068 |
| R-squared | 0,101038 | Mean dependent var | -8,91E-11 | | R-squared | 0,023008 | Mean dependent var | | -2,35E-15 |
| Adjusted R-squared | -0,244716 | S.D. dependent var | 1,752329 | | Adjusted R-squared | -0,32592 | S.D. dependent var | | 1,693818 |
| S.E. of regression | 1,955018 | Akaike info criterion | 4,430765 | | S.E. of regression | 1,950406 | Akaike info criterion | | 4,417278 |
| Sum squared resid | 49,68722 | Schwarz criterion | 4,729009 | | Sum squared resid | 53,25719 | Schwarz criterion | | 4,715997 |
| Log likelihood | -36,09227 | Hannan-Quinn criter. | 4,48124 | | Log likelihood | -38,1728 | Hannan-Quinn criter. | | 4,475591 |
| F-statistic | 0,292226 | Durbin-Watson stat | 2,254502 | | F-statistic | 0,06594 | Durbin-Watson stat | | 1,893907 |
| Prob(F-statistic) | 0,908808 | | | | Prob(F-statistic) | 0,996374 | | | |